

# **Dislokasi Wacana Kewarganegaraan**

Melampaui Liberalisme Menuju Wacana Agonistik



# **Dislokasi Wacana Kewarganegaraan**

Melampaui Liberalisme Menuju Wacana Agonistik

**Ignasius Jaques Juru**

## **DISLOKASI WACANA KEWARGANEGARAAN**

### **Melampaui Lebaralisme Menuju Wacana Agonistik**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*All Right Reserved*

**Penulis** : Ignasius Jaques Juru

**Editor Teknis** :

**Sampul & Layout** : Dany RGB & Eko

**Cetakan I Maret**

#### **Diterbitkan Oleh:**

Research Center for Politics and Governance

Jurusan Politik dan Pemerintahan

Universitas Gajah Mada

Jln. Socio Yustica 2, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

[www.jpp.fisipol.ugm.ac.id](http://www.jpp.fisipol.ugm.ac.id)

email: [polgov.ugm@gmail.com](mailto:polgov.ugm@gmail.com)

telp/fax: +62 274 552212

ISBN :

# Daftar Isi

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DARI PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAGIAN SATU</b>	
<b>Plot Awal Diskursus Kewarganeraan .....</b>	<b>1</b>
Exordium: Permulaan Wacana .....	1
Kewarganegaraan sebagai wacana .....	6
Peta Buku.....	16
<b>BAGIAN DUA</b>	
<b>Diskursus Kewarganegaraan Liberal .....</b>	<b>19</b>
Gerak awal Liberalisme .....	19
Kewarganegaraan Liberal: Rasionalitas dan Teknologi Kekuasaan.....	23
Spiritualitas Individualisme .....	23
Warga negara dan hak individu.....	32
Warga Negara Beraktus dalam Nalar Prosedural .....	34
Menjalin Konsensus Antara Warga Negara: Elemen Deliberatif Wacana Kewarganegaraan Liberal .....	40
Kewarganegaraan dan praktik <i>Liberal Governance</i> .....	46

## **BAGIAN TIGA**

<b>Paradoks Wacana Kewarganegaraan Liberal.....</b>	<b>53</b>
Kepolitikan yang Absen .....	54
Etika Humanitarian: Wajah Janus dan Pelemahan Warga Negara sebagai Subyek yang Berjuang.....	64
Individualisasi Warga Negara sebagai Bentuk Pendistorasian Artikulasi Kolektif Warga Negara .....	68
Pasifisasi Warga Negara Melalui Kerangka Prosedural ....	71
Paradoks warga negara sebagai subyek otonom .....	76
Konsensus Mengeliminasi Hasrat dan Merayakan Rasionalitas .....	77

## **BAGIAN EMPAT**

### **Wacana Kewarganegaraan Agonistik: Mengisi Jejak**

<b>Kerentanan dalam Liberalisme .....</b>	<b>81</b>
Identitas sebagai penjelas awal.....	83
Warga negara dalam relasi Antagonistik dan Agonistik ....	91
<i>Liberty</i> dan <i>equality</i> sebagai etika-kepolitikan Kewarganegaraan Agonistik .....	98
Hegemoni dan Kewarganegaraan .....	101

## **BAGIAN LIMA**

<b>Postskriptum, Refleksi Kekitaan dalam Dua Paradoks .....</b>	<b>117</b>
Postscriptum .....	127
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>131</b>

## Dari Penulis

Ada seorang Opsir Jerman yang sering mengunjungi Picasso di Studionya, di Paris selama perang dunia II. Dia melihat Guernica dan kaget pada lukisan “modernist Chaos” itu. Sang perwira bertanya kepada Picasso, “apakah kamu yang melakukan ini?” dengan tenang Picasso menjawab, “tidak. Kamulah yang melakukan ini!”. Jawaban yang mengusik kesadaran reflektif terhadap realitas ini menjadi suatu ilustrasi sederhana dari keseluruhan isi buku ini.

Buku ini dipahami sebagai langkah “menuju dua arah”: *pertama*, mendekonstruksi wacana Kewarganegaraan Liberal; dan *kedua*, mengkonstruksi identitas baru kewarganegaraan. Mendekonstruksi tapi sekaligus mengkonstruksi adalah wujud dislokasi dari wacana kewarganegaraan. Identifikasi berbagai elemen demokratis yang tidak tersymbolisasi dalam wacana Kewarganegaraan Liberal melahirkan subversi terhadap tatanan simbolik tersebut. Subversi terhadap Liberalisme secara positif mendorong terjalannya artikulasi elemen-elemen demokratis dalam wacana kewarganegaraan agonistik.

Jawaban Picasso terhadap sang perwira memiliki logika yang sama dengan argumentasi yang dijelaskan di dalam buku ini. Sang Perwira adalah analogi bagi Liberalisme yang sering gagap menjelaskan kehadiran secara politik warga negara dalam

ruang publik. Berbagai bentuk artikulasi hak warga negara secara kolektif pada akhirnya tidak mampu diakomodasi dalam nalar individualisme wacana Kewarganegaraan Liberal. Proseduralisme yang ditekankan dalam liberalisme pun hanya mampu melahirkan kepasifan politik dalam tubuh warga negara. Selain itu, merayakan warga negara sebagai subyek otonom yang rasional sama halnya mengabaikan identifikasi subyek politik dalam tantangan simbolik tertentu. Inilah kerentanan yang menjadi persoalan mendasar bagi wacana Kewarganegaraan Liberal. Kita menemukan jawaban yang lugas dan tegas bahwa sesungguhnya berbagai persoalan yang muncul sebagai realitas buram politik kewarganegaraan adalah fakta yang muncul dalam pusaran Liberalisme itu sendiri.

Paradoks dalam wacana Kewarganegaraan Liberal tentu menjadi pijakan penting untuk memikirkan model baru artikulasi wacana kewarganegaraan. Paradoks tersebut menjelaskan tidak tersymbolisasinya berbagai elemen penting yang seharusnya hadir di dalam gagasan atau praktik kewarganegaraan. Dalam konteks inilah kita perlu memikirkan wacana tandingan terhadap Liberalisme, yakni wacana Kewarganegaraan Agonistik. Dengan mengartikulasikan Kewarganegaraan Agonistik maka kita menghadirkan kepolitikan atau *political* sebagai aspek ontologis kewarganegaraan. Wacana Kewarganegaraan Agonistik pun dibangun di atas cara baru dalam menjelaskan identitas politik sebagai warga negara, relasi konfliktual dalam dua model kepolitikan yakni antagonistik dan agonistik, etika kepolitikan bagi warga negara, dan terakhir penjelasan mengenai relasi hegemonik antara warga negara.

Berbagai elemen yang melekat dalam wacana Kewarganegaraan Agonistik ini menandakan sifat radikal dalam relasi politik demokrasi. Keradikalannya mewujud dalam pengakuan akan pluralisme sebagai ciri dasar yang membentuk identitas demokrasi

atau dalam narasi yang lain, keradikalannya hadir dalam bentuk ketiadaan identitas tunggal dan yang sifatnya esensial karena kerentanan yang melekat dalam setiap identitas tersebut.

Melalui buku ini, saya tidak menawarkan kepada pembaca suatu kajian empiris mengenai aktus politik warga negara walaupun dalam beberapa fragmen saya menyertakan fakta empiris namun itu bersifat ilustrasi. Sesungguhnya buku ini merupakan suatu kajian teori politik yang merujuk pada pemikiran Post-marxis. Dua Pemikir Kiri Baru (*New Left*), Laclau dan Mouffe, menjadi rujukan utama yang mendasari premis-premis analitis dalam buku ini. Sesungguhnya kedua pemikir ini tidak secara spesifik menghadirkan kewarganegaraan sebagai suatu kategori analisis yang khusus dalam tulisan-tulisan mereka namun saya mencoba mengartikulasikan gagasan mereka tentang politik, kekuasaan, dan identitas untuk membingkai penjelasan mengenai Kewarganegaraan Agonistik.

Pembaca yang budiman, ada seorang yang tidak waras menganggap dirinya adalah sebutir jagung. Setelah menjalani perawatan dan dipulangkan ke rumah, ia kembali ke dokter dan menyatakan bahwa ia baru saja berpapasan dengan seekor ayam yang dia pikir akan mematumnya. Dengan tegas sang dokter menjelaskan bahwa ia adalah seorang manusia dan bukannya sebutir jagung. Tapi orang itu membalas: ya aku tahu itu dokter, tapi apakah ayam jago tahu bahwa aku ini bukan sebutir jagung? Akhirnya pengakuan terhadap buku ini adalah domain pembaca dalam proses dialektisnya dengan teks yang tersaji.

Lembor, 2012

**Ignasius Jaques Juru**



# BAGIAN SATU

## Plot Awal Diskursus Kewarganeraan

*Human beings are thrown into and inhabit a world of meaningful discourses and practice and can not conceive or think about object outside it (Heidegger dalam Mulhall, 1996)*

*(Manusia menempati suatu dunia dengan berbagai wacana bermakna dan praktik serta tidak dapat memahami dan berpikir tentang objek di luarnya.)*

### **Exordium<sup>1</sup>: Permulaan Wacana**

Buku ini menjadi titik tolak, *terminus a quo*, untuk membahas wacana Kewarganegaraan Agonistik. Membahas wacana Kewarganegaraan Agonistik tidak lepas dari usaha kita untuk mengambil jarak atau melepaskan diri dari posisi diskursif Kewarganegaraan Liberal yang menyimpan berbagai kerentanan di dalam premis-premis-nya. Oleh karena itu, wacana Kewarganegaraan Agonistik tidak hanya menjadi bentuk artikulasi baru wacana kewarganegaraan, tetapi sekaligus sebagai penjelas bagi kerentanan dalam wacana Kewarganegaraan Liberal. Dengan kata lain, kerentanan dalam wacana Kewarganegaraan Liberal memungkinkan

---

<sup>1</sup> *Exordium* berasal dari Bahasa Latin yakni *exordiri* atau permulaan, dalam Bahasa Inggris secara spesifik kata ini diartikan sebagai suatu permulaan dari diskursus (Concise Oxford English Dictionary, 2004)

kita untuk memikirkan artikulasi baru Kewarganegaraan. Inilah titik penting makna dislokasi wacana kewarganegaraan. Dislokasi merupakan bentuk subversi terhadap diskursus hegemonik oleh hal-hal yang tidak berhasil disimbolisasikan atau diintegrasikan ke dalam diskursus hegemonik -dalam hal ini Liberalisme- sehingga menjadi rentan (cf Laclau, 1990: 39). Dengan demikian dislokasi merupakan fondasi di mana perubahan politik dimungkinkan dan penjelasan baru mengenai warga negara dapat terbentuk. Atau secara umum dislokasi merupakan peristiwa atau hal yang tidak dapat disimbolkan oleh aturan diskursif yang ada, dan menjadi fungsi yang menyubversi wacana yang telah mapan. Lebih sederhana lagi kita dapat memahaminya dalam prinsip “melampaui yang positif selalu ada yang negatif”.

Wacana kewarganegaraan saat ini membiak di tengah perkembangan demokrasi yang meluas. Mantan Presiden Brazil, yang juga seorang sosiolog, Fernando Henrique Cardoso (2000) menyebutnya sebagai “an age of citizenship”. Sementara Michael Ignatieff melihat trend ini sebagai “Right Revolution”. Perjuangan hak-hak perempuan, hak-hak seksual untuk kelompok lesbi dan gay, dan perjuangan berbagai identitas keagamaan menjadi penanda yang cukup gamblang menjelaskan arti penting kewarganegaraan dalam politik demokrasi. Di Indonesia sendiri isu-isu seperti pluralisme kewargaan menjadi begitu mendesak untuk diperdebatkan karena fakta mengenai keragaman identitas politik adalah suatu keniscayaan. Hal itu dapat kita temukan dalam berbagai publikasi yang salah satunya adalah publikasi Center for Religious & Cross-Cultural Studies UGM (CRCS) (2011). Apa yang mau dijelaskan oleh berbagai fakta politik ini adalah meluasnya artikulasi hak dan politik pengakuan dalam ruang demokrasi.

Meluasnya studi-studi menyangkut kewarganegaraan tak diragukan lagi tidak hanya berkaitan dengan konteks berkembangnya demokrasi namun berasosiasi juga dengan kondisi-kondisi seperti post-modernisasi dan globalisasi yang termanifestasi dalam isu-isu seperti: rekonfigurasi kelas-kelas sosial, munculnya pemerintahan internasional, rasionalitas baru dalam pemerintahan, dan juga merebaknya gerakan sosial baru yang memperjuangkan politik pengakuan dan redistribusi.

Namun sesungguhnya kita tidak dapat memungkiri bahwa arus utama diskursus kewarganegaraan dewasa ini adalah wacana Kewarganegaraan Liberal. Artikulasi hak untuk memilih yang diterjemahkan ke dalam politik mobilisasi menuju bilik-bilik suara setidaknya menjadi sedikit bukti dari fakta yang cukup menjelaskan kondisi tersebut. Terhadap hal ini, kalangan liberal mengklaim bahwa “hal krusial dari kewarganegaraan adalah hak untuk memilih” (Bellamy, 2008:5).

Hak untuk memilih ini terlihat jelas dalam literatur *mainstream* yang mengutamakan penjelasan mengenai demokrasi dalam aspek prosedural. Misalnya Diamond, Linz dan Lipset menandai demokrasi dari tingkat partisipasi politik terbuka yang sangat tinggi dalam pemilihan pemimpin dan pengambil kebijakan, setidaknya melalui pemilu yang adil dan reguler (Abrhamsen, 2000:113)

Pemilihan pemimpin dalam nalar liberal merupakan cara untuk melegitimasi para pemimpin dan memberi mereka dukungan massa. Jadi peran warga negara dalam demokrasi hanya semata-mata melahirkan pemerintah. Dalam konteks seperti ini kita menemukan paradoks dalam wacana liberal. Pada satu sisi warga negara memiliki hak individu untuk memilih, tapi di sisi lain hak itu pada akhirnya melahirkan oligarki politik.

Paradoks dalam wacana Kewarganegaraan Liberal tidak hanya sebatas pada logika elektoralis namun dapat kita temukan dalam berbagai elemen konstitutifnya seperti Individualisme, rasionalitas dan skema deliberasi relasi politik warga negara.

Menurut skenario Liberalisme, aktor politik dilihat sebagai individu rasional yang digerakkan hanya oleh kepentingan pribadinya sendiri, bertindak dalam batasan-batasan moral tertentu. Hasrat dilenyapkan dari ruang politik yang mana direduksi ke wilayah netral dalam kontestasi kepentingan. Dengan menolak fakta antagonisme, pendekatan ini menutup kemungkinan terhadap dinamika kehadiran berbagai bentuk artikulasi identitas politik kewarganegaraan. Dalam bahasa bernada poststrukturalis, kita dapat menegaskan bahwa wajah politik kita terjebak oleh ilusi atau narasi besar wacana Kewarganegaraan Liberal.

Kita perlu memikirkan suatu ide tentang kewarganegaraan yang mampu menjawab persoalan demokrasi saat ini. Kita membutuhkan strategi baru dalam mengerangakai politik demokrasi khususnya membingkai relasi politik warga negara. Mengapa kita sibuk mendiskusikan desain pemilu? Mengapa kita direpotkan untuk mengurus kecurangan-kecurangan Pemilu? Mengapa kita berpikir bahwa bahasa konsensus sangat demokratis untuk memikirkan pengelolaan warga negara? hal-hal seperti itulah yang dijelaskan dalam wacana politik liberal. Tetapi dimensi yang absen saat ini adalah penjelasan mengenai radikalisasi relasi kewarganegaraan dan kerangka perjuangan hegemonik warga negara. Hal tersebut menjadi titik penjelasan yang penting dalam wacana Kewarganegaraan Agonistik.

Wacana Kewarganegaraan Agonistik hadir untuk mengisi jejak kerentanan dalam wacana Liberal. Kerentanan-kerentanan itu muncul karena tidak tersimbolisasiannya berbagai elemen

elemen penjelas dari realitas *sosio politiko*. Secara cepat kita dapat mengatakan bahwa penjelasan utama kerentanan tersebut dipengaruhi oleh tendensi universalitas, penjelasan yang memusat pada pengagungan individu, dimensi rasional, model konsensus dan juga penekanan pada *modus procedendi* (model prosedural) wacana Liberal. Oleh karena itu, wacana Kewarganegaraan Liberal pada beberapa penjelasannya mengeliminasi sifat kepolitikan dari tubuh kewarganegaraannya<sup>2</sup>.

Namun, ironi tidak menjelaskan runtuhnya wacana Kewarganegaraan Liberal saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh gerak normalisasi Liberalisme yang pada akhirnya menempatkan dia pada posisi hegemonik. Perluasan wacana kekuasaannya baik pada level teoretik maupun praktik dimaknai sebagai bagian dari partisipasi Liberalisme ke dalam berbagai ranah sosial dan politik kita. Operasi kekuasaannya menciptakan jejaring keteraturan sehingga subyek Liberal bisa diproduksi atau dijinakkan. Kekuasaan pun menjadi produktif pada level ini. Dengan demikian kita menyaksikan bahasa kemenangan, *victorious language*, yang pada akhirnya menjadi ilusi komunisme linguistik, *the illusion of communism language*<sup>3</sup> ( Bourdeau, 1991:5).

Kewarganegaraan Agonistik sebagai ide dekonstruktif bekerja untuk menunda perayaan kemenangan wacana Kewarganegaraan Liberal yang sudah disoraki dan disuarakan oleh berbagai politikus, intelektual kampus dan berbagai subyek Liberal. Dimensi profetik

---

2 Pembahasan mengenai sub tema ini akan dijelaskan pada bab III

3 Kedua istilah Bourdeau saya pakai sebagai metafor. Bahasa kemenangan, *victorious language*, merupakan metafor untuk menjelaskan dominasi wacana Liberal. Namun demikian wacana dominasi ini bagi Bourdeau menjadi suatu ilusi yang dia sebut sebagai *l'illusion du communisme linguistique/ the illusion of communism language*. ilusi yang dimetaforkan sebagai komunisme linguistik merujuk pada penunggalan realitas dengan mengabaikan berbagai kondisi sosio-historis.

dari artikulasi kewarganegaraan Agonistik membawa kita pada suatu refleksi radikal akan eksistensi warga negara dalam sistem yang kita sebut demokrasi. Akhirnya, kita perlu menyadari bahwa wacana Kewarganegaraan Agonistik tidak menjadi titik tuju, *terminus ad quem*, penjelasan mengenai warga negara melainkan menjadi salah satu posisi yang menempati persimpangan jalan dari berbagai wacana kewarganegaraan. Tetapi posisi ini tidak dapat direduksi ke dalam pilihan relatif melainkan sesuatu yang harus dipahami sebagai bentuk artikulasi spesifik dari posisi diskursus yang diyakini mampu membawa perubahan bagi politik demokrasi kita saat ini.

## **Kewarganegaraan sebagai wacana**

Apa itu warga negara? apa dia terdefinisikan secara ontologis? bahwa warga negara adalah a) status istimewa dari individu yang dijamin hak-haknya oleh negara atau individu yang memiliki kebebasan dan otonomi untuk mencapai kepentingan politik-ekonominya, b) warga negara adalah komunitas politik yang terikat dalam satu ide bersama untuk mencapai kepentingan bersama, c) warga negara adalah subyek politik yang aktif seperti yang sering diajarkan di dalam kuliah-kuliah kita, d) warga negara adalah orang yang secara politik tidak lagi dibatasi oleh demarkasi teritorial<sup>4</sup> ( Nasbaum, 1997) dan e) warga negara adalah identitas

---

4 Wacana transnasionalisme memandang warga negara tidak lagi dibatasi oleh teritorial negara bangsa semata. Berbagai identitas politik kini terhubungkan satu sama lain dalam mekanisme global. David Held ( 1999), mengemukakan bahwa warga negara transnasional memperkuat kedaulatan individu dalam komunitas global daripada kekuatan negara. Apa yang dikemukakan oleh Held menandakan ekspansi dan hegemonisasi penjelasan Liberalisme sebagai wacana unipolar. Terlepas dari hal itu, warga negara transnasionalisme bukan hanya menjadi fakta kekinian karena artefak sejarah masa lalu menyimpan cerita tentang hal yang sama. Kita tahu bahwa berabad-abad yang lalu Diogenes Laertius pernah mengatakan bahwa saya adalah warga negara dunia. Pernyataan ini merupakan cerita

politik yang memiliki dimensi sipil (*civil citizenship*), politik (*political citizenship*), sosial (*social citizenship*)<sup>5</sup> (Marshall, 1950: 10-14). Kompleksitas dan keragaman makna warga negara di atas menandakan satu hal bahwa warga negara ditentukan oleh berbagai diskursus yang melingkupinya. Dari penjelasan tersebut tentu kita tidak dapat secara *a priori* mendefinisikan apa itu warga negara. Pendefinisian warga negara ditentukan oleh artikulasi berbagai elemen yang membentuknya dan kemudian menjadi perangkat aturan yang menentukan. Oleh karena itu pertanyaannya bergeser dari *apa itu warga negara?* menjadi *bagaimana kewarganegaraan dikonstruksi menjadi suatu wacana politik?*

Kewarganegaraan sebagai diskursus dipahami sebagai suatu totalitas terstruktur dari praktik artikulasi berbagai elemen pembentuknya. Ide kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang bersifat netral tetapi sangat ditentukan oleh berbagai model interpretasi dan jenis artikulasi yang terbangun di antara posisi subyek yang berbeda. Dengan kata lain, Kewarganegaraan sebagai diskursus harus dipahami sebagai tubuh sosial yang maknanya ditentukan oleh perangkat-perangkat aturan (*system of rules*) dan

---

akhir dari perjalanannya melihat berbagai suku bangsa di dunia. Secara filosofis wacana transnasionalisme banyak dipengaruhi oleh filsafat Kant, khususnya gagasan mengenai moral universal. Gagasan ini pada akhirnya banyak mempengaruhi konstruksi universal hak asasi manusia.

- 5 Konsep ini dikemukakan oleh T. H. Marshall yang menekankan pada tiga elemen kewarganegaraan. *Pertama*, sipil yakni berkaitan dengan hak individu untuk berpendapat, berkeyakinan, dan hak akan kepemilikan. Element ini muncul pada abad ke 18 di Inggris ketika sistem kapitalis memwabah. *Kedua*, politik, berbicara soal hak untuk berpartisipasi dalam konteks pengejawantaan kekuasaan. elemen ini dalam ide kewarganegaraan muncul pada abad ke 19. *Ketiga*, sosial, merentang dari hak untuk mendapat jaminan kesejahteraan ekonomi sampai pada jaminan pendidikan dan pelayanan sosial. Element ini mencuat pada abad ke 20 dan banyak menginspirasi pembentukan negara kesejahteraan, *welfare state*.

praktik-praktik yang membentuk dia sebagai suatu pewacanaan (Mouffe, 1992a: 31; Laclau, 1985: 113; Foucault, 1972: 49).

Wacana kewarganegaraan sangatlah konstruktif karena karakter wacana yang bersifat historis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik diskursif. Praktik diskursif ini dapat berupa terminologi, nilai, kebiasaan, retorika, di mana semuanya itu menjadi bagian yang terjalin untuk membentuk suatu wacana (Cherryholmes, 1988: 2-3)

Selain hal di atas, kewarganegaraan sebagai wacana mengandung makna kepolitikan. Dalam nalar ini kewarganegaraan dipahami sebagai sistem konkret dari relasi sosial dan praktik politik di mana wilayah pembentukannya atau formasinya secara intrinsik bersifat *political*. Artinya, sebagai suatu wacana, kewarganegaraan merupakan penanda yang terstruktur dari berbagai artikulasi. Dalam tindak artikulatif, kekuasaan hadir sebagai bagian konstitutif terhadap proses pewacanaan dari berbagai posisi subyek dalam suatu medan diskursif (Dyrberg, 1997: 118-119). Oleh karena itu wilayah diskursif kewarganegaraan menjadi artikulasi yang khas dari berbagai bentuk identifikasi yang mencirikan gesekan berbagai antagonisme (nalar *difference* dari wacana).

Dalam wacana kewarganegaraan Atenian, misalnya, kita dapat melihat bagaimana ide kewarganegaraan dibangun dari elemen-elemen dramaturgis khususnya berkaitan dengan pementasan *Drama Tragedi*. Audiens, produser dan pementas, jalin menjalin menjadi *nexus*<sup>6</sup> dari suatu tragedi yang merefleksikan dinamika sosial politik kewarganegaraan di Atena. Drama tragedi menjadi gambaran

---

6 *Nexus* dalam konteks ini dipakai untuk menjelaskan keterjalinan dari satu-satuan aktual yang membentuk suatu tatanan tertentu. sebenarnya istilah ini dipakai oleh Whitehead untuk menjelaskan jalinan-jalinan yang menentukan kosmologi (Ohoitumur, 2006: 120).

artifisial dari realitas kehidupan institusi dan pertukaran ide dalam ruang publik. Elemen-elemen penentu dalam pembentukan wacana kewarganegaraan ini adalah *speech/ lexis dan action/ praxis, kemampuan berbicara dan tindakan*. Kemampuan berbicara dalam suatu pementasan dikatakan dengan kualitas warga negara untuk mengartikulasikan pendapat atau kepentingannya melalui komunikasi. *Praxis* merujuk pada tindakan konkret warga negara dalam proses kepublikan. Kedua elemen ini menjadi penjelas utama bagi warga negara yang aktif di Atena (Barke, 2009: 3-4). Selain penekanan pada partisipasi aktif, warga negara menjadi penjelas bagi bentuk relasi konfliktual karena ketegangan-ketegangan yang dihadapi dari kehidupan politik, seperti ketegangan yang terjelaskan dalam pementasan tragedi. Tetapi apakah identitas sebagai warga negara bersifat inklusif dalam wacana Atenian?

Sebagai suatu pewartanaan politik, karakter eksklusif atau penarikan tapal batas melekat dalam pembentukan identitas sebagai warga negara Atena. Laki-laki dewasa secara politik disebut sebagai warga negara sedangkan anak-anak, perempuan dan budak menjadi orang yang terabaikan dari proses politik yang ada (Burchell, 2002). Kita dapat merujuk pada pengaruh Aristotelian yang mereduksi perempuan pada persoalan reproduksi dan memposisikan perempuan hanya pada wilayah privat. Hal ini berdampak pada tidak diakuinya perempuan dalam proses kepublikan di mana laki-laki dewasa mendapatkan hak istimewa untuk mengurusinya (Smith, 1999: 141). Logika eksklusif dalam wacana Atenian menandakan bekerjanya kekuasaan sebagai elemen penting dalam proses identifikasi dari suatu wacana.

Contoh Kewarganegaraan Atenian hanya sebatas gambaran awal tentang bekerjanya logika diskursif. Sekarang kita menuju penguraian awal mengenai dua wacana kewarganegaraan yang

dikemukakan di dalam skripsi ini. *Pertama* adalah wacana Kewarganegaraan Liberal dan *kedua* wacana Kewarganegaraan Agonistik.

Wacana Kewarganegaraan Liberal menggarit melalui normalisasi model-model pengaturan politik berdasarkan rasionalitas liberal, seperti, Model Agregatif Schumpeterian, Model Deliberatif Rawlsian dan Habermasian, serta elemen-elemen individualisme dan rasionalisme. Dengan kata lain, Wacana Kewarganegaraan Liberal dibentuk oleh berbagai elemen-elemen formatif seperti rasionalisme, individualisme, agregatif dan deliberatif. Elemen-elemen ini menjadi perangkat aturan yang menentukan makna Kewarganegaraan Liberal. Dalam setiap perbedaanya elemen-elemen di atas dimaknai sebagai keserupaan dalam suatu diskursus.

Sentralitas individualisme dan rasionalisme dapat kita temukan dalam pemikiran John Locke. Locke memperkenalkan konsepsi mengenai *Voice of God*, Suara Tuhan. John Locke menjelaskan bahwa: setiap individu diberkahi oleh nalar yang diasosiasikan sebagai Suara Tuhan. Melalui hal tersebut, individu betindak dan mampu melihat dunia berdasarkan hukum alam yang melekat di dalam diri mereka. Semenjak lahir individu menempati posisi yang setara karena nalar yang melekat di dalam dirinya. Sebagai makhluk rasional manusia mampu bertindak secara otonom untuk menentukan posisinya dalam politik dan dengan posisi yang setara setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan atau kepentingan politiknya (Locke, 1960: 117-120). Dipengaruhi oleh pemikiran Locke, Fukuyama menegaskan bahwa warga negara Liberal harus dipahami dalam kondisi di mana ada struktur yang memungkinkan perlindungan wilayah privat dan memastikan dimensi kompetitif antara individu (Barke, 2009:92). Individu memiliki berbagai kepentingan sebagai warga negara. Kepentingan tersebut

diterjemahkan dalam kerangka hak prosedural warga negara liberal. Hak prosedural menjadi bagian penting dari elemen agregatif.

Melalui elemen agregatif wacana Kewarganegaraan Liberal dijelaskan dengan modus prosedural (*modus procedendi*). Artinya warga negara dipahami sebagai individu yang secara rasional bertindak untuk memperjuangkan hak-haknya secara prosedural. Namun demikian, penekanan pada aspek prosedural justru menciptakan destruksi bagi bentuk Kewarganegaraan Liberal. Habermas dan Rawls mencoba menawarkan pendekatan normatif untuk mengisi dimensi yang kurang dalam elemen agregatif. Melalui model deliberatif, John Rawls dan Habermas menekankan prinsip moral baru untuk memperkuat kerangka pengelolaan Kewarganegaraan Liberal. Logika deliberatif hadir dalam Wacana Kewarganegaraan Liberal untuk menjelaskan sifat konsensus sebagai aspek moral dan rasional dalam relasi antar warga negara.

Gagasan mengenai nalar publik muncul sebagai bagian dari metodologi menemukan konsensus itu. Nalar publik ini seolah-olah menjadi wilayah netral yang memungkinkan setiap kelompok memiliki argumentasi yang dapat diterima di dalam ruang publik. Selain nalar publik, aspek *reasonable*<sup>7</sup> menjadi salah satu penentu konsensus. *Reasonable* merupakan refleksi *civilitas* yakni kemampuan dan watak untuk saling menghargai satu sama lain serta kemampuan untuk mencapai keputusan kolektif atau konsensus di mana bersifat akomodatif bagi semua warga negara (Rawls, 1996).

Jika Rawls menegaskan aspek *reasonable* untuk mengerangakai relasi antara warga negara dalam mencapai nalar publik maka Habermas menekankan komunikasi rasional. Dipengaruhi oleh Liberalisme Kantian, Habermas berpendapat bahwa konsensus

---

7 Penjelasan mengenai gagasan *reasonable* akan diperjelas dalam bab II

sosial antara warga negara tidak didasarkan pada sesuatu yang bersifat *a priori*, tetapi dibentuk oleh dialog sosial dengan mekanisme yang telah disepakati yang memastikan partisipasi universal dengan basis persetujuan rasional.

Wacana Kewarganegaraan Liberal pun bergerak menjadi wacana dominan saat ini. Bagaimana posisi hegemoni ini dicapai? Untuk menjawab hal itu, studi *governmentality* diperlukan di sini. Pendekatan *governmentality* dipakai untuk mengetahui bagaimana rasionalitas Kewarganegaraan Liberal beroperasi dalam relasi kekuasaan dan pada akhirnya membentuk atau menormalisasi subyek politiknya (Foucault, [1978-79] 2008) .

Dua hal yang harus dilihat dalam *governmentality* adalah rasionalitas kepolitikan dan teknologi kekuasaan. Rasionalitas kepolitikan merupakan bentuk konseptualisasi dari kekuasaan, justifikasi moral, gagasan mengenai mana yang tepat, dan gagasan mengenai proporsi distribusi dalam tugas-tugas berbagai kelompok. Teknologi kekuasaan berkaitan dengan kompleksitas relasi dari berbagai program, kalkulasi, teknik, aparatus, dokumen dan berbagai prosedur untuk menciptakan efek bagi ambisi rezim (Miller dan Rose, 1992: 3).

Menurut Miller dan Rose ada tiga karakter rasionalitas kepolitikan. *Pertama*, rasionalitas kepolitikan memiliki karakter moral. Bentuk moral merupakan prinsip bagi rezim untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Bentuk ini memberi defenisi moral bagi praktik kekuasaan. *Kedua*, rasionalitas kepolitikan mempunyai karakter epistemologi. Artinya, rasionalitas kepolitikan memiliki konsepsi-konsepsi pengetahuan yang memberi justifikasi terhadap produksi dan praktek kekuasaan.

*Ketiga*, rasionalitas kepolitikan diartikulasi dalam idiom khusus. Bahasa di sini bukan hanya persoalan retorik melainkan harus

dilihat sebagai mesin intelektual atau aparatus yang memungkinkan realitas dapat dipikirkan dan diterima sebagai kebenaran dalam diskursus politik tertentu (*ibid*, hal. 7-8) Dalam kaitannya dengan Kewarganegaraan Liberal, *governmentality* Kewarganegaraan Liberal dapat dijelaskan sebagai berikut: *liberal citizenship as political rationality is morally coloured, grounded upon knowledge, and made thinkable through language* (Kewarganegaraan Liberal sebagai suatu rasionalitas kepolitikan mendapatkan afirmasi moral dan didasarkan pada pengetahuan serta dipahami melalui bahasa).

Normalisasi wacana Kewarganegaraan Liberal tidak bisa diterima sebagai ruang tertutup bagi eksistensi wacana politik di luarnya. Sehingga usaha denormalisasi atau dekonstruksi<sup>8</sup> menjadi suatu aktus politik yang perlu dipikirkan. Mengapa demikian? Kita hidup di dalam dunia yang dibentuk oleh berbagai wacana yang merujuk pada posisi-posisi politik yang berbeda dan mekanisme-mekanisme pengelolaan politik yang bervariasi. Kondisi ini memungkinkan kita berpikir secara radikal mengenai identitas kita sebagai warga negara. Warga negara sebagai identitas dipahami dalam logika *difference* yakni kompleksitas posisi subyek yang ditentukan oleh berbagai medan diskursif (Laclau, 2001: xiii) atau dalam penjelasan Derrida: “....*identity as difference is always unstable and never absolute, because it remains open to the other, it can become a motif for anti authoritarian form of politic* (Derrida, 1982: 22) ( Identitas sebagai *difference* selalu tidak stabil dan tak pernah mutlak, karena hal itu terbuka bagi yang lain, hal itu dapat menjadi dasar bagi politik antioritarian).

Apa yang dijelaskan oleh Laclau dan Derrida pada intinya mengakui dimensi kontingensi dari identitas yang memungkinkan

---

8 Dekonstruksi perlu kita maknai sebagai strategi politik untuk membongkar tatanan yang menganggap dirinya final sebagai suatu bentuk kekuasaan. Oleh karena itu dekonstruksi merupakan penjas bagi perjuangan kebebasan atau emansipasi (Haryatmoko, 2007: 4)

bekerjanya logika kepolitikan. Dalam logika kepolitikan warga negara dimaknai sebagai identitas-identitas yang mengartikulasikan berbagai tuntutan-tuntutan politiknya atau hak yang dimiliki sehingga warga negara tidak dapat dideterminasi oleh logika tunggal melainkan akan selalu berada dalam kontingensinya dan perjuangan yang konstan dari berbagai identitas politik.

Sifat kontingensi suatu diskursus memungkinkan kita melakukan dislokasi terhadap wacana dominan Kewarganegaraan Liberal. Perlu kita sadari sebelumnya bahwa ketegangan antara Komunitarianisme dengan Liberalisme yang mengisi perdebatan filosofis dewasa ini (Matravers dan Pike *ed.*, 2003) merupakan bentuk nyata di mana medan diskursif selalu diisi oleh berbagai diskursus yang bergerak dan saling berusaha untuk mendislokasi satu sama lain. Kita tentu berpikir bahwa salah satu cara untuk mendislokasi kerentanan wacana Kewarganegaraan Liberal adalah perlunya memikirkan komunitas politik yang menjelaskan keterlibatan aktif dalam urusan publik. Wacana Komunitarianisme pun menawarkan hal itu, tetapi Komunitarianisme tidak bisa keluar dari ide mengenai *common goods* yang menjadi rujukan yang mengikat pengorganisasian warga negara. Wacana ini pun secara langsung mengorbankan individu sebagai subyek yang memiliki hak (Abowitz dan Jason Harnish, 2006). Bertolak dari hal itu kita perlu memikirkan model pendislokasian yang lain. Sebagai bentuk pendislokasian, Kewarganegaraan Agonistik bergerak dalam dua jalur, yakni *pertama*, pengafirmasian terhadap setiap kerentanan yang ada dalam wacana Liberal dan *kedua*, dislokasi mendorong terbentuknya identitas kewarganegaraan baru yakni kewarganegaraan dalam wacana Agonistik.

Membahas Kewarganegaraan Agonistik tidak lepas dari penjelasan mengenai demokrasi khususnya demokrasi radikal.

Demokrasi radikal mengidentifikasi tiga prinsip kunci untuk memahami politik kontemporer. *Pertama*, semua perjuangan politik bersifat temporer dan kontekstual. Hal tersebut menandakan kontingensinya. Kontingensi didasarkan pada antagonisme yang menjelaskan politik saat ini. *Kedua*, kewarganegaraan atau agen politik didefinisikan bukan sebagai pencapaian dan kepemilikan melainkan perjuangan berkelanjutan dalam kontingensinya dan relasi kekuasaan yang bergeser terus-menerus. *Ketiga*, lokasi relasi kekuasaan tidak hanya berada dalam kontestasi kepentingan warga negara tetapi ruang pembentukan subyek di mana warga negara memahami relasi mereka dalam dunia kepolitikan. Tiga hal di atas menjelaskan ketidakmungkinan kita untuk melepas Kewarganegaraan Agonistik dari ruang Demokrasi Radikal. Dengan kata lain, radikalisasi demokrasi selaras dengan usaha kita memikirkan ulang tentang arena warga negara di dalam politik. Salah satunya yang dapat kita pikirkan adalah komitmen egalitarianisme yang melihat seluruh subyek sebagai subyek politik dan mengakui secara luas aktivitas sebagai aktivitas kepolitikan dan secara potensial mengandung nilai perjuangan di dalamnya.

Dalam model Agonistik kita akan melihat dimensi kepolitikan, *the political*, yang hilang dari penjelasan wacana Kewarganegaraan Liberal. Dengan kata lain kepolitikan dapat dilihat sebagai dimensi bawah sadar dari politik liberal; hal itu menjadi ruang traumatik yang direpresi atau dihilangkan dari pewacanaan liberal (Newman, 2005: 153). Dimensi kepolitikan memiliki efek meluas yakni, *pertama*, sebagai kesadaran baru untuk mendestabilisasi wacana esensialis; *kedua*, mengkondisikan artikulasi tuntutan politik dari berbagai posisi politik warga negara; *ketiga*, memungkinkan perjuangan hegemonik yang bermakna demokratis, dan *keempat*, memungkinkan relasi konfliktual dari berbagai identitas karena identitas tidak akan pernah mencapai satu titik yang tunggal atau

final sehingga menyebar sebagai identitas yang menempati posisi berbeda. Perbedaan ini mendorong lahirnya antagonisme yang berelasi secara konfliktual.

Kita juga perlu merefleksikan bahwa dimensi kepolitikan yang hadir dari penjelasan wacana Kewarganegaraan Agonistik menandakan adanya politisasi warga negara. Politisasi warga negara berdampak pada sifat aktif warga negara. Warga negara Agonistik berpolitik sebagai warga negara yang aktif karena kewarganegaraan menjadi pengada yang aktif dan memiliki peran dalam penentuan keputusan politik (Rasmussen dan Brown, 2002: 178). Oleh karena itu, warga negara harus dilihat sebagai identitas politik yang terus menerus menentukan posisi-posisi politiknya dalam arena *sosio politiko*. Partisipasi ini bersifat radikal karena partisipasi di sini tidak diikat dalam teknis-teknis prosedural semata melainkan menjadi medan terbuka bagi setiap aktus dan artikulasi politik dari berbagai identitas politik.

Kondisi di atas memungkinkan kita untuk memikirkan praktik hegemonik di dalam wacana Kewarganegaraan Agonistik. Hal tersebut menjadi sesuatu yang baru dari kajian kewarganegaraan. Hegemoni menarik karena dikaitkan dengan persoalan artikulasi dari berbagai tuntutan politik. Hegemoni berusaha menjelaskan perjuangan aktif yang kontekstual dari berbagai identitas politik untuk menentukan keputusan-keputusan politik dalam rangka perjuangan menuju politik pengakuan. Melampaui hal itu hegemoni memungkinkan terciptanya tatanan dan budaya politik baru yang lebih demokratis.

## Peta Buku

Buku ini dibagi ke dalam lima bagian. **Bagian pertama** merupakan anabasis atau plot yang membuka suatu diskursus

mengenai warga negara. Bagian ini memberi sedikit pemahaman kepada kita hubungan antara wacana dan kewarganegaraan. **Bagian kedua** bercerita tentang diskursus Kewarganegaraan Liberal. Dalam bagian ini, saya berusaha menjelaskan aspek-aspek diskursif Kewarganegaraan Liberal. Penjelasan mengenai aspek diskursif ini mengharuskan saya menjelaskan elemen-elemen formatif yang membentuk wacana Kewarganegaraan Liberal. **Bagian ketiga**, setelah menjelaskan elemen formatif pada Bagian dua maka di bagian ini penulis berusaha untuk menghadirkan penjelasan mengenai paradoks dari setiap elemen formatif wacana Kewarganegaraan Liberal. Merentani wacana Kewarganegaraan Liberal dimungkinkan melalui penjelasan dekonstruktif yang ada dalam Wacana Agonistik. **Bagian keempat** berisi tentang wacana Kewarganegaraan Agonistik. Bagian ini menjadi momen dislokatif karena di sini penulis berusaha untuk mengisi kerentanan dalam liberalsisme dengan mengartikulasikan wacana Agonistik. **Bagian kelima**, merupakan epilog yang berisi *postscriptum* dan kesimpulan. *Postscriptum* merupakan refleksi singkat penulis mengenai paradoks politik kewarganegaraan di Indonesia.



# BAGIAN DUA

## Diskursus Kewarganegaraan Liberal

Pada bagian ini saya akan menjelaskan elemen-elemen formatif wacana Kewarganegaraan Liberal. Konsekuensinya, *pertama*, ide Kewarganegaraan Liberal dipahami sebagai struktur yang terartikulasi dari berbagai elemen yang membentuknya. *Kedua*, sebagai suatu diskursus hegemonik, wacana Kewarganegaraan Liberal beroperasi melalui teknologi dan rasionalitas kekuasaan sehingga melahirkan Subyek Liberal. *Ketiga*, kehadiran Liberalisme tidak dilihat sebagai suatu kehadiran tanpa relasi antagonisme. Hal ini didasarkan pada sifat kekuasaan yang tidak berujung pada kepenuhannya melainkan penanda yang selalu menunjukkan sifat pertarungan dari setiap kehendak-kehendak kekuasaan dalam tubuh identitas. Setiap realitas sosial bersifat politik dan menandakan bekerjanya kekuasaan. Kekuasaan menghadirkan pertarungan antagonisme dan pada saat yang sama proses dislokasi bergerak menuju arah pembentukan identitas politik.

### **Gerak awal Liberalisme**

Kehadiran Liberalisme sebagai suatu wacana politik dan kekuasaan tidak lepas dari suatu konteks historis. Liberalisme

sama seperti ideologi lainnya mewujudkan sebagai gerak revolusioner-penanda *aufklarung*- baik pada tingkat ide maupun praktek. Totalitas ide dan praktek Liberalisme membentuk apa yang kita sebut wacana hegemonik Liberalisme. Hegemoni Liberalisme “menjadi dan mengokoh” oleh praktik-praktik diskursif yang merebak dalam institusi-institusi yang mendukungnya. Dalam nalar itulah Subyek Liberal diproduksi.

Antara pertengahan abad 17 dan pertengahan abad 19, Liberalisme tersedimentasi menjadi gerak perlawanan terhadap laku opresi, kesewenang-wenangan, dan penyelewangan kekuasaan rejim Teokrasi dan Monarki di Eropa. Gema kebebasan individu menjadi wacana utama dalam membentuk relasi kekuasaan baru. Liberalisme diidentifikasi sebagai aspirasi emansipasi dari spritualitas *enlightenment* yang mengartikulasikan gagasan-gagasan seperti Hak Asasi Universal, toleransi beragama, promosi komersial dan pengetahuan, serta penolakan terhadap bentuk-bentuk teokratik dan etos abad pertengahan. Hal ini diekspresikan dalam agenda-agenda politik kelas menengah di Amerika dan Inggris. Kebebasan yang diartikulasikan oleh kaum liberal terinstitusionalisasi dalam wacana kekuasaan kelompok Whig. Intervensi relasi kekuasaan baru ini mengeliminasi rezim Tory yang mendasarkan rasionalitas dan praktek kekuasaannya pada elemen-elemen Teokrasi dalam Monarki, dengan semangat *Patriarcha*<sup>9</sup> (Schamandt, 2005: 331-332).

Hal senada diungkapkan oleh John Rawls (Freeman *ed*, 2007: 11) bahwa kemunculan Liberalisme ditandai oleh reformasi dan perang agama pada abad 16 dan 17 yang berakhir dengan munculnya kelas menengah dan terciptanya rezim konstitusional yang membatasi kekuasaan monarki. Gerak kebebasan ini terinstitusi dalam rezim-

---

9 Terma *patriarcha* merupakan model pengolahan kekuasaan yang melegitimasi monarki (Schmandt, 2005: 330)

rezim konstitusional atau demokrasi yang berkembang di belahan Eropa dan belahan dunia lainnya dalam gerak perkembangan yang berbeda di setiap negara. Menurut para pembela Liberalisme, gereja dan negara merupakan “hantu” bagi kebebasan individu sehingga kebebasan individu harus diletakkan dan dirayakan sebagai spiritualitas baru. Salah satu bentuk pengokohan wacana Liberalisme adalah intervensi relasi kekuasaan melalui deklarasi *Bill of Right* di Amerika. Hal ini menandakan bekerjanya aparatus<sup>10</sup> liberal di mana kebijakan menjadi hal penting bagi pembentukan logika politik yang membentuk subyek barunya, yakni -dalam konteks ini- subyek Liberal. Dengan kata lain *Bill of Right* menjadi strategi kekuasaan liberal untuk mendefinisikan subyek politiknya yang menekankan kebebasan personal atau individu. Selain berbentuk kebijakan, aparatus juga ditandai oleh dukungan atau justifikasi pengetahuan tertentu. Dalam kaitan dengan Liberalisme, ide kebebasan dalam masyarakat liberal tidak dapat dipisahkan dari pengaruh pemikiran John Locke. Pemikiran John Locke banyak mempengaruhi konstitusi Amerika khususnya yang berkaitan dengan konsep-konsep seperti: hidup (*lives*), kebebasan (*liberty*), dan kepemilikan (*estates*). Kulminasi dari pemikiran itu menubuh dalam suatu fantasi politik baru yakni *Declaration of Independence*, dengan imaji masyarakat yang *equal* dan suatu pemerintahan yang melindungi hak untuk hidup, bertindak bebas, dan hak untuk mencapai kebahagiaan individu secara universal.

Beberapa dari nilai itu diringkas John Rawls (Freeman, 2008: 12) melalui prinsip-prinsip keadilan masyarakat liberal: hak dasar dan kebebasan yang setara, prioritas pada kemerdekaan atau

---

10 Apparatus merupakan konsep Foucault di mana Apparatus menjadi bagian dari teknologi kekuasaan untuk memanipulasi relasi kekuasaan. Bagi dia apparatus terrefleksikan dalam berbagai bentuk konkret, misalnya: kebijakan, scientific statement, tindakan administratif, hukum, dll (Giorgio Agamben, 2009).

kebebasan individu, dan jaminan bagi setiap anggota masyarakat untuk menikmati hak dan kebebasan yang ada di dalam dirinya.

Menarik untuk kembali ke benturan antagonisme dalam Liberalisme. Negara dalam bayang-bayang monarki dan hegemoni Gereja Katolik menjadi antagonisme Liberalisme sekaligus *constitutive outside* yang memungkinkan pembentukan wacana Liberalisme itu sendiri. Rezim teokrasi dan monarki berdiri di atas dua elemen penting yakni konsepsi mengenai *mediante papa*, dan *minister sacerdotii*. Konsep pertama memberi justifikasi pada kekuasaan gereja khususnya Paus melalui pemahaman bahwa kekuasaan dunia berasal dari Tuhan melalui Paus. Sedangkan konsep kedua, dapat dipahami sebagai teknologi kekuasaan teokrasi, yakni raja sebagai agen gereja menjalankan fungsi sekuler atau keduniaan. Jadi dapat dikatakan bahwa teokrasi mewujud dalam praktik-praktik kekuasaan monarki atau dengan kata lain monarki merupakan teknologi kekuasaan teokrasi.

Situasi historis tersebut mengkondisikan momen pendislokasian terhadap wacana teokrasi. Pendislokasian di sini diartikan sebagai subversi diskursus hegemonik oleh peristiwa-peristiwa yang tidak dapat didomestifikasikan, disimbolisasikan atau diintegrasikan di dalam diskursus. Dislokasi juga merupakan fondasi terhadap perubahan politik yang memungkinkan identitas baru terbentuk. Karakter rezim teokrasi dan monarki yang dogmatik dan otoriter menjadi kondisi ketidaktersimbolisasikan kebebasan dan supremasi kemerdekaan individu dalam wacana teokrasi. Hal ini mendorong gerak dislokasi Liberalisme terhadap teokrasi dan mekanisme monarki. Dengan kata lain pendislokasian terhadap wacana teokrasi telah menciptakan identitas baru yakni identitas liberal.

Wacana Liberalisme yang dibangun dari premis-premis individualis dan rasionalis bukanlah sesuatu yang berdiri dalam

formasi tunggal, tapi dia juga terbentuk karena benturan dengan “yang lain” dari dirinya. Kebebasan individu terumuskan karena adanya situasi di luar dirinya yakni dogmatisme teokrasi dan juga model monarki. Selain itu, Liberalisme memiliki elemen-elemen pembentuk di dalam dirinya sehingga membentuk suatu diskursus hegemonik. Berkaitan dengan ini, Liberalisme harus dipahami sebagai bangunan yang oleh Wittgenstein disebut “*Family Resemblances*”<sup>11</sup>. *Family Resemblances* saya terjemahkan dalam konteks beroperasinya ide-ide Locke, Stuart Mill, konsep *liberal governance*, demokrasi agregatif dan model deliberatif yang bermuara pada pembentukan atau totalisasi wacana Kewarganegaraan Liberal. Dengan kata lain, Kewarganegaraan Liberal menjadi poin rujukan (*nodal point*) dari berbagai elemen yang diartikulasikan.

## **Kewarganegaraan Liberal: Rasionalitas dan Teknologi Kekuasaan**

### **Spiritualitas Individualisme**

Individu merupakan bentuk khas dan menjadi poin penting dalam konstruksi wacana Kewarganegaraan Liberal. Dengan kata lain, dalam wacana Kewarganegaraan Liberal, individu menjadi metode untuk menguraikan atau menjelaskan kewarganegaraannya. Peter Schuck berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Kewarganegaraan Liberal adalah konsepsi dan institusionalisasi kewarganegaraan di mana nilai utama dari semuanya itu adalah maksimalisasi kepentingan dan kebebasan individu (Schuck, 2002: 132). Konsepsi kebebasan individu seperti ini dalam kategori

---

11 Dalam *Philosophical Investigation* Wittgenstein (1953) menjelaskan bahwa rana sosial merupakan bangunan dari relasi yang kompleks yang saling *overlapping* tetapi di dalamnya mengandung keserupaan yang tidak mutlak.

Isaiah Berlin disebut sebagai *negative liberty*, bahwa individu dalam keotonomiannya berusaha untuk mencapai tujuan mereka sendiri, bebas dari paksaan negara (Berlin, 1969). Kebebasan seperti inilah yang membedakan pemahaman terhadap konsep kewarganegaraan, bagaimana ia dipahami di dalam model liberal (*modern*) dan kebebasan di dalam konsepsi kuno (*ancient*).

Di dalam masyarakat kuno, kebebasan dipahami dalam konteks *sharing of social power* di antara warga negara satu kota. Dari sini kita dapat menjelaskan bahwa memahami *liberty* berarti menjadi manusia politik yang saling berinteraksi dan merumuskan kepentingan bersama. Masyarakat kuno sadar bahwa keberadaan mereka sebagai warga negara merupakan penerimaan mereka terhadap pluralitas di dalam ruang sosial, sehingga dalam peristilahan Roma, manusia politik merujuk pada pemaknaan *inter homines esse* (*hidup berarti berada di antara sesama manusia*).

Penalaran dan pemaknaan realitas yang menempatkan warga negara sebagai bagian integral dari denyut kehidupan negara kuno menjelaskan betapa warga negara dianggap sebagai manusia yang hidup dan berbentuk. Mempertegas hal di atas, Giorgio Agamben dengan mengutip Marsilius dari Padua, membicarakan kehidupan politik warga negara sebagai *form of life*, yakni bentuk kehidupan di dalam negara di mana manusia sebagai komunitas politik/ warga negara mencari dan menemukan kehidupan yang berguna bagi dirinya:

*“civitatem.....communitatem esse institutam propter vivere et bene vivere hominum in ea, the state is a community instituted for the sake of living and the well being of men in it” (Agamben, 2000: 4) (negara merupakan arena bagi komunitas untuk hidup dan kondisi yang nyaman/ tepat bagi manusia ada di dalam negara itu sendiri). Keterlibatan aktif dalam ruang sosial mencirikan manusia*

*sebagai Human Activa atau dalam terminologi Aristoteles sebagai bios politikos. Dua unsur yang penting dalam diri manusia sebagai makhluk politik menurut Aristoteles adalah praxis (action) dan lexis (Speech) (Hannah Arendt, 1998: 25)<sup>12</sup>.*

Berbeda dengan pemaknaan kebebasan yang dipahami di dalam masyarakat kuno, kebebasan dalam wacana modern khususnya di dalam wacana liberal dipahami sebagai penikmatan kenyamanan dan keamanan pribadi di mana dijamin oleh institusi negara (Constant, 1988: 316-18). Namun apa yang menjadi poin saya di sini bukanlah semata pada adanya perbedaan pemaknaan terhadap ide kebebasan (*liberty*) melainkan sifat mengambang dari ide kebebasan tersebut. Kebebasan menjadi penanda yang mengambang karena dia berada dalam medan diskursif yang dipenuhi oleh berbagai artikulasi yang berbeda dari setiap posisi diskursus.

Langgam individualis di dalam wacana Kewarganegaraan Liberal dipengaruhi juga oleh pemikiran John Locke dan beberapa pemikir liberal lainnya seperti John Stuart Mill. John Locke memulai konsepsi tentang individu dengan melihat individu sebagai sosok yang dikarakterisasi oleh metafora *Voice of God*. Dengan demikian individu dalam bertindak dan berpikir dipengaruhi oleh hukum alam. Sejak kelahirannya individu secara setara diberkahi oleh rasio atau nalar yang menjadi basis bagi mereka untuk menentukan keputusan-keputusannya sendiri.

Keadaan di atas digambarkan sebagai *state of nature*, apa yang dipahami di sini oleh Locke adalah suatu kondisi alamiah di bawah

---

12 Gagasan Arendt khususnya mengenai *human activa* berkaitan erat dengan penjelajannya dengan kondisi mortalitas manusia. Kondisi mortalitas merefleksikan situasi tragedi dan kerentanan dalam relasi sosial. Situasi tragedi dan kerentanan menjadi elemen penting bagi warga negara karena dalam situasi inilah konflik berlangsung dan kesadaran akan kerentanan tersebut mendorong warga negara untuk terlibat aktif dalam relasi sosial politik (Arendt, 1998; Nussbaum, 1986)

bimbingan akal tanpa otoritas politik. Dalam kondisi seperti ini orang hidup dalam kebebasan, merdeka, dan sederajat tanpa ada otoritas yang mengikat. Setiap orang mempunyai kemerdekaan alamiah untuk bebas dari kekuasaan superior di atas bumi dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislatif. Setiap orang sederajat dengan orang lain dalam pengertian dia adalah pemilik mutlak atas dirinya dan tidak tunduk pada otoritas lain. Keadaan ini tentunya berbeda dengan *state of nature* yang dibayangi oleh Hobbes. Bagi Locke, dalam kondisinya seperti ini manusia tidak berada dalam keadaan perang- *bellum omnium contra omnes*- karena sifat egoisme radikal- *homo homini lupus*<sup>13</sup>, melainkan berada dalam perdamaian oleh karena hukum alam dan akal yang menuntunnya.

Dalam keadaan alamiah individu memiliki kecenderungan untuk membentuk masyarakat politik atau yang disebut “Kontrak Sosial”, hal ini dipengaruhi oleh keinginannya untuk melindungi

---

13 Ungkapan ini pertama kali diungkapkan oleh Plautus (251-184 SM). Konsep ini awalnya dipakai dalam konteks perdagangan dan pendidikan. Plautus berpesan untuk tidak meminjamkan uang kepada orang lain yang belum dikenal jati dirinya, karena menurutnya *homo homini lupus est: manusia adalah srigala bagi yang lain*. Ia akan membawa lari uang yang dipinjamkan kepadanya. Dalam konteks pendidikan Plautus menggunakan kata ini untuk mengkritisi konsep pendidikan Romawi. Baginya jika pendidikan Romawi tidak kembali pada karakternya maka masyarakatnya akan menjadi *homo homini lupus*. Konsep ini di abad pertengahan dipakai oleh Thomas Hobbes untuk menggambarkan *state of nature* dalam bukunya *Leviathan*. Bagi Hobbes kodrat manusia tidak bersifat sosial. Satu-satunya kodrat manusia dalam kondisi *state of nature* adalah kecenderungan untuk mempertahankan dirinya. kondisi ini menimbulkan egoisme radikal di dalam dirinya- *manusia adalah serigala bagi yang lain*- kemudian mendorong terjadinya *bellum omnium contra omnes-perang semua melawan semua*. Untuk keluar dari keadaan demikian manusia perlu diperintah di bawah suatu kekuasaan tunggal hasil kesepakatan bersama. Di sanalah *power sovereignty* ada. Tetapi penentangan muncul terhadap kondisi alamiah Hobbes yang melihat manusia sebagai sedemikian kejamnya bagi yang lain-*homo brutalis*- bagi filsuf seperti Driyarkara manusia menjadi sahabat bagi yang lainnya- *homo homini socius* (Pandor, 2010: 17-18)

dirinya dari gangguan-gangguan dan membuat benteng yang dapat melindungi hak-hak yang dimilikinya. Beberapa dari sifat kontrak sosial adalah *pertama*, kontrak sosial semata-mata bertujuan untuk mencari perangkat institusional yang menjamin hak-hak individu. Perangkat institusi ini harus dipahami sebagai aparatus Liberal yang menjalankan fungsinya sesuai kehendak individu-individu. *Kedua*, Individu di dalam komunitas politik yang dibentuknya tidak menyerahkan hak-hak substansialnya melainkan menempatkan institusi yang dibentuk sebagai pelaksana dari hukum alam. Oleh karena itu menurut saya, satu sisi individu liberal memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya dan tidak dapat diganggu gugat (sifatnya kodrati) dan di sisi lain ada hak yang diolah oleh pemerintahan dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab pemerintahan (dalam pemaknaan kontrak sosial). *Ketiga*, hak tidak diberikan kepada orang tertentu tetapi kepada seluruh komunitas. Langkah akhir dari kontrak sosial adalah pembentukan pemerintahan yang memiliki kekuasaan terbatas dan menjamin hak-hak individu. Berkaitan dengan hal ini, Fukuyama mengafirmasi bahwa Kewarganegaraan Liberal merupakan ekspresi dari kehendak untuk mencapai kesejahteraan material yang hanya mungkin dilakukan ketika institusi negara dibatasi sehingga pada akhirnya warga negara merayakan kebebasan dan *personal ideals*-nya (Barke, 2009:92)

Pemerintahan yang terbatas di sini saya pahami sebagai pemerintahan yang mengakui kebebasan individu sekaligus menjamin setiap hak individu di dalamnya. Artinya, dimensi sosial kontrak Locke bukanlah model otoritarian Hobbes di bawah *Leviathan*, tetapi pemerintahan yang hadir untuk melindungi kebebasan individu di dalamnya. Kebebasan itu khususnya berkaitan dengan kepemilikan pribadi. Elemen ini menjadi sentral di dalam model Kewarganegaraan Liberal karena gagasan kepemilikan pribadi menyangkut individu yang berhak atas

kepemilikannya -didefinisikan secara luas oleh Locke sebagai *lives, liberty, dan estates*- dan memiliki kuasa untuk mengontrolnya. Dengan demikian pemerintahan hadir untuk melindungi kepemilikan pribadi tersebut. Dan pelaksanaan hukum terhadap hak kepemilikan pribadi menciptakan ketidaksetaraan tanpa ketidakadilan. Saya menafsir point ini sebagai berikut, bahwa properti yang dimiliki setiap individu tentunya berbeda sehingga diperlakukan secara berbeda. Hal inilah yang dimaksudkan akan menciptakan ketidaksetaraan, tetapi bukan berarti tanpa keadilan. Ketiga elemen ini diterjemahkan oleh C.B Macpherson di dalam teorinya *Possesive Individualism* (Macpherson,1962). Logika berpikir dalam teori ini mendasarkan posisi individu pada:

1. Kemampuan mereka untuk mendefinisikan kepentingan masing-masing
2. Kemampuan untuk mencapai status sosial tertentu
3. Berhubungan dengan individu lainnya melalui institusi privat, *contract*, dan pasar
4. Hubungan ini diyakini dapat menciptakan kesejahteraan tetapi juga melegitimasi ketidaksetaraan.

Ketidaksetaraan yang dikemukakan oleh Macpherson, dapat diatasi karena adanya *natural human sociability*. Locke menguraikan keadaan tersebut sebagai kondisi di mana individu dalam kenyataannya tidak hanya memperhatikan kepentingan dirinya, tetapi juga kepentingan orang lain. Akan tetapi, semuanya ini harus dilihat sebagai “pilihan otonom individu” untuk menentukan pengintegrasian dirinya dengan yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Jason A. Scorza dalam *Liberal Citizenship and Civic Friendship* (Scorza, 2004:86), “*Liberal citizens are citizens as private persons are free to establish amicable relations with whomever they choose.*” (Warga

*negara Liberal sebagai pribadi bebas merupakan orang-orang yang bebas untuk membangun relasi dengan siapapun yang mereka pilih.)*

Apa yang dipahami Locke sebagai warga negara adalah kewajiban dan tanggung jawab individu untuk mengakui kepentingan yang lain serta individu yang bertindak untuk memaksimalkan kepentingan yang ada di dalam dirinya. Tentunya hal ini dipahami di dalam konteks kontrak sosial. Saya perlu menegaskan bahwa individu yang dipahami oleh Locke adalah individu yang memiliki otonomi mutlak terhadap dirinya bahkan otonomi untuk memutuskan untuk tidak mengambil bagian di dalam ikatan sosial. Jadi, hal yang sosial pun harus dilihat dari posisi otonomi individu atau dalam bahasa Steven Lukes (Lukes dalam Matravers dan Pike, 2005) “the doctrin of methodological of individualism”<sup>14</sup>. Oleh karena itu Locke sebenarnya masih merayakan warga negara dalam makna individualisme.

Pada pertengahan abad ke 19, John Stuart Mill melanjutkan pemikiran Locke secara sistematis dan mencoba melihat kepentingan individu bukan hanya sebagai persoalan personal, tetapi juga sumber bagi perbaikan sosial. Bagi dia, kebebasan berpikir, mencari tahu, dan berekspresi dari individu adalah langkah menuju kebenaran dan perbaikan sosial. Akan tetapi, ada satu elemen yang ditambahkan Mill yakni pembatasan kebebasan individu oleh negara (*op cit* Schuck, 133). Relasi antara warga negara dengan negara khususnya berkaitan dengan kebebasan individu diterangkan oleh Mill sebagai berikut:

---

14 Metodologi individual merupakan doktrin yang menegaskan bahwa validitas penjelasan realitas sosial hanya dicapai di dalam fakta mengenai individu. bagi kelompok yang mengimani hal ini niscaya menegaskan kolektifitas sebagai penjas bagi eksistensi sosial.

1. Kebebasan individu cenderung bertentangan dengan tindakan negara
2. Di satu sisi negara dapat meningkatkan kebebasan individu dalam konteks perlindungan hukum melalui *law enforcement*-berkaitan perlindungan hak-dan penyediaan *public good*.
3. Di sisi lain, negara menyimpan *myopia* dalam tubuhnya yakni, sikap koruptif, dan pelaksanaan kekuasaan yang kohersif sehingga bagi Mill adalah lebih baik jika hakekat sosial diilhami oleh semangat liberal yang menekankan kebebasan individu.

Dari penjelasan di atas jelas kita melihat antinomi<sup>15</sup> pemikiran Stuart Mill, satu sisi dia menegaskan bahwa kehadiran negara penting dalam konteks pembatasan terhadap laku kebebasan individu, tetapi di satu sisi dia justru menegaskan negara memiliki hakikat kohersif dan koruptif. Dengan demikian Stuart Mill tetap meyakini bahwa menjadi warga negara berarti menjadi individu bebas, dan kebebasan individu untuk mencapai kepentingannya sendiri merupakan wilayah otoritatif individu. Jika hal itu berpengaruh pada kepentingan orang lain maka negara meregulasi agar tercapainya harmonisasi. Akan tetapi, Mill menegaskan kembali bahwa jangan sampai negara merusak kepentingan dan kebebasan individu. Dari sini kita dapat melihat bahwa dimensi konflik tidak diperlihatkan dan berusaha diabaikan dalam wacana liberal.

Rasionalitas liberal terletak pada epistemologi yang menjelaskan kebebasan individu dan di dalamnya terkandung *moral statement*, misalnya: konsepsi tentang hak universal dan posisi kesetaraan universal. Melampaui konseptualisasi tersebut, wacana liberal bergerak dalam praktik-praktik politis melalui

---

15 Antinomi saya pinjam dari konsep Imanuel Kant untuk menjelaskan pernyataan yang bertentangan atau *self contradiction* (Zizek, 2008: 105)

kompleksitas intervensi ruang politik yang menciptakan *regularity* atau keteraturan antara berbagai statemen yang menyebar untuk membentuk *docile body*- subyek yang mengimani dan bertindak oleh tuntunan logika liberal. Praktik-praktik ini dalam penalaran saya dapat dibahasakan -meminjam terminologi Laclau- sebagai artikulasi kepentingan dalam suatu wacana.

Dalam konsistensi penalaran di atas, teknologi kekuasaan liberal dapat dilacak melalui gerak perjuangan kaum Leveler di Inggris pada tahun 1647. Merujuk pada logika liberal, kaum Leveler menuangkan poin-poin perjuangan dalam dokumen “Kesepakatan Rakyat” (*the Agreement of the People*) tahun 1647. Poin-poin yang termaktub di dalamnya antara lain: hak pilih universal, perwakilan dalam parlemen yang berdasarkan populasi keseluruhan bukan kekayaan, dan pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan pemerintah dengan menekankan pada kebebasan dan pengakuan yang luas terhadap hak-hak individu. Di Amerika, artikulasi liberal termaktub dalam *Bill of Right* yang menjadi institusionalisasi Kewarganegaraan Liberal. Gerak penyebaran logika liberal sampai pada mekanisme pengaturan subyek politik liberal melalui *Federal Constitution* tahun 1787. *Federal Constitution* menekankan pada pertentangan individu yang pada akhirnya mengkonstruksi masyarakat. Artinya, individu menjadi sentral bagi pembentukan masyarakat. Masyarakat hanya dilihat sebagai efek dari setiap aktus individu (Mouffe, 1993: 28). Peristiwa-peristiwa di atas harus dilihat sebagai model intervensi kekuasaan yang pada dirinya mentotalisasi kepentingan-kepentingan politis liberal dan pada akhirnya subyek hadir dan dipahami dalam model liberal. Tentunya gerakan di atas tidak dilihat sebagai suatu rentetan yang “kebetulan” dalam arena politis tertentu tetapi harus dilihat sebagai keteraturan atau *regularity* dari suatu wacana yang sedang menghegemoni narasi sejarah mengenai kewarganegaraan.

## Warga negara dan hak individu

Melihat kewarganegaraan tanpa memahami konsepsi hak pada dirinya adalah sesuatu yang absurd. Namun perlu disadari, hak yang dipahami di sini adalah sesuatu yang melekat di dalam konstruksi Wacana Liberal. John C. Goodman (2005) dalam artikelnya *What is Classical Right* menguraikan karakteristik *right* berdasarkan deklarasi *Bill of Right* sebagai berikut:

*Pertama, Hak bersifat relasional.* Hak merupakan tanggung jawab moral yang dimiliki orang per orang. Pernyataan ini merujuk pada zona otoritatif individu untuk menentukan pilihan *per se* tanpa diintervensi oleh orang lain. Jadi dalam relasi demikianlah hak dipahami sebagai perihal relasional.

*Kedua, hak secara tidak langsung berkaitan dengan kewajiban.* Artinya, secara moral, hak berkaitan dengan aktus yang mempengaruhi munculnya kewajiban dari orang lain. Dalam kaitannya seorang memiliki kewajiban terhadap orang lain berarti dia menahan diri supaya tidak mengintervensi tindakan orang lain tersebut. Pemisalan: Ahmad memiliki hak untuk melakukan hal X, secara tidak langsung menimbulkan kewajiban bagi orang lain untuk tidak mengintervensi tindakan tersebut.

*Ketiga, Hak fundamental secara tidak langsung menimbulkan kewajiban negatif.* Hak seseorang yang secara fundamental tidak boleh diintervensi, memiliki kecenderungan negatif. Pemisalan: kebebasan berpendapat atau berbicara ketika tidak boleh diintervensi oleh pihak lain maka menimbulkan kewajiban negatif di dalamnya.

*Keempat, Hak dasar tidak dapat dicabut.* Dalam deklarasi kemerdekaan, Thomas Jefferson menyatakan bahwa hak dasar

tidak dapat dicabut. Artinya, hak tersebut tidak dapat diasingkan dari individu yang memilikinya. Individu membatasi dirinya untuk melakukan hal-hal tertentu yang merusak hak orang lain.

*Kelima, hak dasar tidak berasal dari pemerintah.* Artinya, pemerintah mendapat legitimasinya dari eksistensi hak individu. Pemerintah tidak memberikan hak kepada warga negaranya melainkan menjaga agar hak tersebut terjamin. Dalam *second treatise on government* (Locke, 1988), Locke berpendapat bahwa pemerintahan yang berlegitimasi, dalam faktanya, dibentuk untuk memfasilitasi dan melindungi hak yang dimiliki individu.

*Hak substantif dan Hak Prosedural*, dalam naskah *Bill of Rights*, dibedakan antara hak substantif dan hak prosedural. Hak substantif merupakan hak dasar yang memberi legitimasi kepada pemerintah. Dalam menjamin hak substantif ini, pemerintah perlu memiliki prosedur baku untuk melaksanakan tugasnya. Dalam konteks inilah hak prosedural diciptakan. Misalnya, konstitusi menetapkan beberapa jabatan pemerintahan harus diperoleh melalui pemilihan. Hal ini secara tidak langsung memiliki konsekuensi logis terhadap hak prosedural warga negara, yakni hak untuk memiliki atau memberikan suara (*right to vote*).

Ada empat karakter hak prosedural, yaitu:

1. Kurang fundamental dari hak substantif. Mengapa? Karena alasan munculnya hak prosedural bertujuan untuk melindungi hak substantif
2. Bersifat konvensional. Artinya, hak ini diciptakan atau dibuat.
3. Berdampak pada kewajiban positif. Artinya, setiap hak prosedural menimbulkan efek positif dalam pelaksanaannya. Pemisalan: hak untuk memilih mewajibkan seorang untuk menyediakan tempat suara, atau memastikan hari pemilihan.

4. Menciptakan kepentingan yang seimbang. Karena hak ini berfungsi untuk melindungi hak substantif maka pelaksanaannya akan menciptakan kondisi yang seimbang antara hak prosedural dan hak substantif.

Domain hak yang ditekankan dalam wacana liberal menempatkan individu sebagai sentral dari subyek yang merayakan hak sebagai sesuatu yang melekat baik secara prosedural maupun substantif. Hak di sini menjadi suatu properti yang dimiliki sehingga mengabaikan sifat hak yang konstruktif yang senantiasa terbentuk dari berbagai artikulasi identitas kewarganegaraan.

Selain itu nalar prosedural yang menguatkan dimensi substantif dari hak tidak membawa jalan keluar bagi warga negara liberal untuk membangun basis demokratis yang dapat menjamin terbukanya akses-akses politik dalam demokrasi. Hal ini dapat dijelaskan dalam subtema berikut.

## **Warga Negara Beraktus dalam Nalar Prosedural**

Pada abad ke-20, ide hak kebebasan individu khususnya *hostility of individuals* diterjemahkan ke dalam model agregatif Schumpeter dan pilihan rasional Downs. Keduanya menandakan bias ekonomi dan rasional dalam mengkerangkai warga negara. Model demokrasi agregatif memiliki karakter kalkulasi *interest* pada diri individu. Individu kemudian bertarung dalam skema elektoral untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Kritik Schumpeter terhadap model demokrasi klasik yang menempatkan *Common Goods* sebagai bagian penting demokrasi membawa dia pada perumusan Model Agregatif. Menurutnya, demokrasi harus dipahami sebagai metode pengaturan kelembagaan di mana individu berkompetisi mendapatkan kekuasaan untuk menentukan (kebijakan dll)

melalui mobilisasi hak-hak prosedural warga negara...*the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote* (Schumpeter, 2003: 269-270). Demokrasi seperti ini merupakan suatu *modus procedendi* yang memungkinkan verifikasi pada legitimasi melalui hal-hal yang sifatnya prosedural, seperti pemilu.

Setiap warga negara dalam model demokrasi agregatif berelasi dalam kalkulasi kepentingan individu dan pilihan-pilihannya merupakan sesuatu yang sifatnya rasional. Hal ini djustifikasi oleh pemikiran Downs dalam *an economic theory of democracy* (Downs, 1957: 3-7). Menurutnya, dalam demokrasi individu digerakkan oleh kalkulasi rasional untuk memilih orang-orang yang akan merepresentasikan dirinya. Rasionalitas di sini dipahami sebagai pilihan sadar karena individu memiliki perhitungan berkaitan dengan tujuan dan pencapaian yang akan dia dapat.

Pilihan rasionalitas menempatkan kepentingan sebagai dorongan warga negara dalam berdemokrasi bukan oleh hasrat. Ferguson menjelaskan bahwa hasrat bersifat destruktif karena sifatnya yang irasional dan kepentingan bersifat konstruktif karena berdasarkan nalar atau pertimbangan dengan perkiraan. Bertindak dengan dasar *interest* akan menjadikan orang memiliki kebajikan<sup>16</sup> (Varty, 1997:32-33).

Kebajikan muncul dari kepentingan yang bersifat rasional yang dimobilisasi dalam partisipasi prosedural yang bermuara pada terpilihnya wakil-wakil politis yang diharapkan dapat menerjemahkan hak-hak yang melekat dalam individu. Partisipasi ini dilihat sebagai dimensi aktif warga negara dalam model

---

16 Dalam model demokrasi passion justru menjadi bagian penting dari demokrasi. Hal ini kan dijelaskan dalam bab 3.

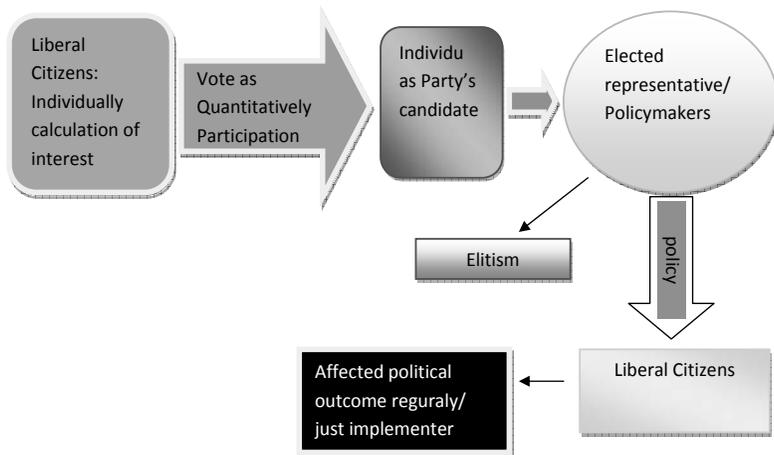
demokrasi prosedural. Penjelasan berikut mempertegas apa yang saya katakan:

*meaningful and extensive competition among individuals/ citizens and organized groups (especially political parties) for all effective positions of government power, at regular intervals and excluding the use of force; a 'highly inclusive' level of political participation in the selection of leaders and policies, at least through regular and fair elections* (Vanhanen, 2004: 29).

(Kompetisi yang luas antara individu atau warga negara dan kelompok-kelompok terorganisasi demi posisi efektif dari kekuasaan pemerintah, dalam interval yang regular yang meniadakan penggunaan paksaan; menandakan suatu partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin-pemimpin politik).

Keyakinan akan adanya kongruensi antara mobilisasi kepentingan rasional dan pembentukan rezim yang akomodatif menjadi sentral untuk menjelaskan karakter partisipatif warga negara. Partisipasi warga negara bertujuan untuk memilih representator yang diyakini akan mangakomodasi kepentingan mereka sebagai warga negara karena kompetisi bertujuan untuk merebut posisi median atau representati tersebut. Demokrasi liberal meyakini bahwa di dalam model representasi seperti ini kepentingan-kepentingan warga negara dapat dikonversi menjadi kebijakan publik yang akomodatif (Huber dan Powell, 1994: 291-326). Jadi, dalam penafsiran saya “*demokrasi liberal berasumsi bahwa partisipasi yang bersifat kuantitatif berkorelasi dengan kualitas representatif yang pada akhirnya menelurkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya feasible bagi warga negara*”.

Namun asumsi konseptual di atas menemukan ambiguitasnya dalam tendensi elitisme dari perwakilan politik. Partisipasi warga negara secara prosedural sesungguhnya mengokohkan elitisme dalam relasi kekuasaan liberal. Elitisme ini menjadi bumerang yang mengerdilkan sifat aktif yang substantif dari warga negara. Sebelum menjelaskan lebih jauh hal ini maka saya akan mengkerangkai nalar berpikir kita melalui bagan berikut:



Representasi memiliki kecenderungan menciptakan tatanan elitis, tak terkecuali dalam Liberalisme. Sehingga pertanyaan logis yang perlu diajukan adalah penjelasan apa yang menjustifikasi munculnya elitisme dalam model representasi liberal? Dalam Liberalisme, representasi dipahami dalam terang rasionalitas, independensi, dan *individual person* untuk memilih orang-orang yang dipercaya (*homo credens*). Kepercayaan terhadap lembaga perwakilan didasarkan pada situasi historis yang tidak memungkinkan keterlibatan seluruh warga negara sehingga ada

beberapa warga negara yang dipilih untuk mengurus persoalan-persoalan publik (Pitkin, 1972: 191). Menurut Madison, hal ini mengkondisikan mekanisme prosedural memilih beberapa warga negara untuk yang membentuk *well-order government*. *Well-order government* menjadi syarat agar dapat mengharmonisasikan pluralitas kepentingan dari warga negara karena hal itu telah direduksi ke dalam relasi individu-individu yang terpilih. Model pengelolaan pluralitas yang menekankan pada *well-order government* mensyaratkan ketidakberpihakan dan superioritas representator.

Privilese dan superioritas individu-individu terpilih ini menjelaskan kemunculan elitisme dalam gagasan relasi representatif prosedural (ibid, 193). Pitkin lebih lanjut menjelaskan bahwa penjelasan Madison pada akhirnya paralel dengan model elitisme Burke. Bagi Burke, superioritas representator ada karena di dalam dirinya melekat kuasa *judgement* yang disebut *natural aristocracy* (ibid, 169). Burke menegaskan bahwa representasi harus dilihat dari posisi yang berbeda antara yang diwakili dan yang mewakili (posisi superioritas). Representator memiliki kuasa *judgement*. Dengan *Judgement*, para representator menentukan segala keputusan berdasarkan nalar sehingga pada dirinya mereka memiliki diskresi dan ini yang membuat mereka berbeda dari yang diwakili. Hal ini berdampak serius terhadap cara memahami legislasi. Bagi Burke persoalan legislasi juga merupakan persoalan *reason* (ibid, 170).

Tatanan pemerintahan yang kuat harus diilhami oleh cara pandang di atas karena melalui *judgement* pemerintahan dapat berjalan efektif yang pada akhirnya dapat mewujudkan kebijakan yang baik bagi warga negara. Nalar di atas menunjukkan kepada kita bangunan politik representatif yang menghilangkan dimensi kepolitikan karena domain politik direduksi ke dalam persoalan nalar yang mengkondisikan lahirnya teknokrat-teknokrat yang berjarak dari subyek politik yang lebih luas (rakyat).

Munculnya elit dalam proses demokrasi liberal khususnya prosedural merupakan kecenderungan yang sulit dielakkan dan bagi warga negara kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri. Menurut Higley dan Burton dalam bukunya *elite foundation on liberal democracy*, penggunaan hak suara atau pemilihan oleh warga negara dalam pemilu hanya akan berpengaruh pada *political outcome* yang bersifat reguler bukan sesuatu yang bersifat substantif (Higley dan Burton, 2006:7). Hal ini mencirikan model partisipasi negatif atau pasif. Saya melihat hal ini semakna dengan model analisis Dhakidae terhadap karakter konsep *bueraucratic polity* Karl D. Jakson. Menurut Dhakidae, Jakson mendasarkan partisipasi warga negara dalam dua bidang, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam *pelaksanaan keputusan* (Dhakidae, 2003: 227). Melihat dua kategori bernas ini, apa yang dimaksud Higley dan Burton sebagai *political outcome* yang bersifat *reguler* paralel dengan kategori kedua, yakni warga negara sebagai *pelaksana keputusan*. Sehingga, elitisme di sini muncul dalam posisi superioritas yang sangat substansial dan berjarak dengan warga negara dalam hal pengambilan keputusan.

Kondisi kerentangan ini dinormalkan melalui mekanisme prosedural sehingga subyek politik sebagai warga negara tetap berada dalam kerangkeng prosedural yang melemahkan daya artikulatif politiknya. Pada posisi inilah, tawaran prosedural justru melemahkan sifat aktif yang memungkinkan warga negara secara menyeluruh dapat berpartisipasi melalui saluran politik yang tidak dibakukan dalam penataan institusi yang elitis.

Untuk mengokohkan wacana Kewarganegaraan Liberal, maka kerentanan-kerentanan Liberalisme dalam korpus prosedural segera ditanggapi dengan memasukkan elemen deliberatif sebagai alternatif bagi konstruksi Kewarganegaraan Liberal. Hal tersebut dapat dijelaskan pada subtema berikut.

## Menjalin Konsensus Antara Warga Negara: Elemen Deliberatif Wacana Kewarganegaraan Liberal

Menggemanya model demokrasi prosedural sebagai bagian dari artikulasi Liberalisme menandakan pemahaman baru di dalam demokrasi. Demokrasi harus dipikirkan sebagai *modus procedendi* yang menekankan agregasi kepentingan warga negara yang secara individual memiliki hak untuk memilih secara regular pemerintahannya atau representatornya. Oleh Antony Downs, model agregatif menjadi standar empiris teori politik. Pemikir dalam model ini mengabaikan apa yang disebut *Common Good* atau *General Will*. Bagi mereka, *self-interest* menjadi kunci bagi partisipasi atau dasar bagi individu untuk bertindak dan membentuk tatanan politiknya (Mouffe, 2000:82)

Dominasi pemikiran agregatif melahirkan gelombang baru untuk memikirkan demokrasi yang memperhatikan pluralisme kelompok kepentingan (*interest-group pluralism*) yang tidak semata-mata dikerangkai aktus politiknya melalui mekanisme prosedural. Gelombang ini lebih dikenal sebagai gelombang baru teori normatif yang diperkenalkan oleh John Rawls dan Habermas. Bagi mereka, ke depan demokrasi bergantung pada dimensi moralnya. Akhirnya, model deliberatif menginginkan konsensus dalam realitas pluralisme yang ditentukan oleh suatu masyarakat adil dan bijak (*reasonable*) atau masyarakat yang berdasar pada rasionalitas universal, yang bermuara pada masyarakat yang stabil (*well-order society*). Rawls memulai pertanyaan dengan, bagaimana hal itu mungkin, bahwa warga negara yang bebas dan setara, tapi secara mendalam bertentangan dapat hidup bersama melalui doktrin *reasonable* komprehensif dan mengafirmasi konsepsi politik dari suatu rezim konstitusional? Untuk menjawab hal ini, Rawls menjelaskan gagasan *overlapping consensus* dari *reasonable doctrine* di mana didasarkan

pada prinsip moral, yakni *justice as fairness* yang memberi legitimasi bagi warga negara dan negara. Tujuan akhir dari prinsip ini adalah suatu koeksistensi yang penuh damai atau harmoni.

Kita perlu menjelaskan secara keseluruhan prinsip deliberatif melalui elemen-elemen kuncinya, yakni *original position*, *overlapping consensus*, *public reason* dan *reasonable society*. Berikut penjelasannya.

Ide *Original Position* (posisi original) menjadi dasar bagi bangunan sistem sosial berdasar pada kebebasan dan persamaan antara warga negara. Bagi Rawls, *Original Position* merupakan perangkat representasi yang tidak berfondasi pada latar belakang institusi, sejarah, dan kecendrungan natural, tetapi pada kesepakatan yang bebas dan sama antara warga negara di bawah kondisi adil (*fair*). Artinya, posisi original merupakan kondisi bagi setiap warga negara atau individu untuk memastikan kondisi yang adil dari berbagai interpretasi yang beragam mengenai keadilan. Oleh karena itu, posisi original sangat berkaitan dengan penjelasan mengenai syarat-syarat kooperatif yang adil. Rawls mengatakan bahwa dalam kooperasi yang adil terkandung artikulasi mutual dan resiprokal. Semua yang berkooperasi harus mendapatkan keuntungan yang sama dan membagi beban yang setara dan tentunya hal tersebut karena posisi original dari masing-masing warga negara (Rawls, 1996: 300).

*Original Position* didasari oleh nalar imperatif. Nalar imperatif memungkinkan universalitas dan objektivitas politik yang mengikat orang dalam kooperasi sosial atau konsensus. Dengan kata lain, *Original Position* merupakan situasi heuristik dari kebebasan dan kesamaan yang memungkinkan setiap warga negara dalam keindividuanannya menentukan -melalui mekanisme deliberatif-

prinsip-prinsip keadilan<sup>17</sup> untuk mengorganisasikan kooperasi sosial antara warga negara yang bebas dan setara.

Posisi original warga negara yang memungkinkan adanya konsensus harus pula didasari oleh relasi *reasonable*<sup>18</sup> dan rasional antar warga negara. *Reasonable* merujuk pada kondisi kesetaraan dan melalui itu warga negara bisa membangun standar-standar yang memenuhi kaidah *fair term of cooperation*. Relasi antara warga negara *reasonable* bersifat resiprokal, *fair* dan *equal* serta menekankan toleransi dan tanggung jawab *per se*. Di dalam relasi *reasonable* antar warga negara, tindakan rasional dibutuhkan karena hal tersebut merupakan *power judgement* dalam menemukan tujuan dan mempertimbangkan kepentingan di dalam dirinya (ibid, 49-50).

Namun konsensus seperti apakah yang dibayangkan Rawls? Konsensus yang dimaksud Rawls adalah *overlapping consensus*, yakni suatu konsensus yang tidak semata-mata ditentukan oleh pengaturan kelembagaan melainkan oleh dasar moral. Hal ini terjabarkan dalam kutipan berikut:

---

17 Prinsip keadilan Rawlsian dibangun di atas Method of Kantian Constructivism yang tercermin dalam dua point berikut: Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama dan kebebasan yang sama. Kedua, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial harus diatur dengan memperhatikan **a.** Keuntungan yang besar bagi setiap warga negara (*difference principle*) **b.** Pengelolaan atau pengaturan harus memperhatikan fungsi dan posisi warga negara dalam kondisi yang *fair* dan *equal* (Mouffe, 1993: 26).

18 Ide mengenai *reasonable* berbeda dengan ide rasional. Jika rasional merujuk pada individu yang memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang baik bagi dirinya serta berpikir demi kepentingannya masing-masing dan berusaha untuk mencapainya, *reasonable* dimaknai sebagai kerangka relasi yang di dasarkan pada kesadaran akan posisi original masing-masing. kondisi ini yang membingkai proses diskusi atau deliberatif antara partisan sehingga mencapai tujuan bersama (Rawls, 1996: 48).

*Overlapping consensus that it's not merely a consensus on a set of institutional arrangement based on self interest (rationality) but the affirmation on moral ground of principles of justice that have themselves moral character (reasonable)* (Mouffe op cit, 29).

Overlapping consensus tidak semata konsensus yang dipahami dalam perangkat-perangkat pengaturan kelembagaan antara kepentingan rasional dari setiap individu tetapi juga pengafirmasian terhadap dasar moral dari prinsip keadilan (*reasonable*).

Dasar moral ini pun didasari oleh suatu doktrin, yakni *reasonable comprehensive doctrine*. *Reasonable comprehensive doctrine* memiliki tiga aspek, yakni *theoretical reason* (*Philosophy, moral judgement, religious*), *practical reason*, dan kedinamisan (Rawls *op cit*, 59). Aspek pertama berkaitan dengan landasan-landasan filosofis, moral dan spiritualitas; aspek kedua bersifat praktis. Artinya, doktrin tidak hanya memiliki abstraksi tetapi mewujudkan dalam praktik-praktik empiris, dan akhirnya doktrin bersifat dinamis sesuai kondisi di dalam dirinya.

Rawls sendiri berdiri di atas keberpihakan karena pada dasarnya konsep *reasonable comprehensive doctrine* hanya ingin menjustifikasi prinsip-prinsip liberal sebagai doktrin yang rasional pun *reasonable* untuk membentuk warga negara yang demokratis, warga negara yang memiliki pembayangan akan nalar publik (*public reason*). Nalar ini merupakan tonggak bagi warga negara liberal dalam mekanisme deliberatif dan pengakuan terhadap gagasan dasar mengenai *justice* serta merupakan dasar legitimasi dalam politik liberal. Dengan demikian model deliberatif Rawls didasari pada Liberalisme dan demokrasi (*popular sovereignty*) sebagai *system of rules* atau pedoman yang menjadi basis moral bagi warga negara dalam wacana liberal.

Logika aporiatik<sup>19</sup> dimainkan juga oleh Rawls dalam menciptakan batas (*frontier*) antara warga negara *reasonable* dan *unreasonable*. Baginya, warga negara *reasonable* adalah warga negara yang memegang prinsip-prinsip liberal sebagai *grammar of conduct* dan di luar itu -yang tidak menerima prinsip-prinsip tersebut- didefinisikan sebagai *unreasonable* (Mouffe, 1993: 152). Dari sini kita dapat melihat sifat elimimiatif juga “penundukan” terhadap artikulasi-artikulasi yang berada di luar wacana liberal demi suatu konsensus yang harmonis. Dengan kata lain, Liberalisme sebagai pedoman mendeterminasi relasi antara warga negara sehingga relasi tersebut bermuara pada adanya suara bulat yang mutlak, *e pleburus unum*.

Imajinasi sosial Rawls pada akhirnya mengarah pada kondisi stabil dalam suatu masyarakat politik, suatu tatanan demokrasi yang stabil atau *well-order*. Bagi mouffe, *well order society* merupakan kondisi di mana dimensi kepolitikan telah dieliminasi (*well-ordered society as one from which antagonism and power have disappeared*) (Mouffe, 1993: 141). Hal ini karena beberapa aspek:

1. Suatu masyarakat di mana setiap orang di dalamnya menerima **satu** prinsip keadilan yang mengatur (ide tentang pengakuan publik terhadap gagasan keadilan bersama)
2. Struktur dasar -politik dan institusi- merupakan refleksi dasar dari prinsip keadilan (berkaitan dengan regulasi yang efektif)
3. Warga negara memiliki *sense* terhadap prinsip-prinsip keadilan dan mematuhi institusi (demokrasi) yang menjadi struktur dasar demi tercapainya hal tersebut

Mekanisme deliberatif Rawlsian pada dirinya mengandung ilham Hegelian khususnya mengenai konsensus yang paralel

---

19 Konsep aporia Derrida diturunkan dari konsepsi metafisik yakni “blind spot” menjelaskan tentang oposisi biner misalnya, male/female, white/black, dll

dengan ide *versöhnung* atau rekonsiliasi dalam ide Hegel. Menurut Rawls, rekonsiliasi merupakan skema institusi untuk mencapai kebebasan yang sudah ada atau *immanent*. Tugas filsafat politik adalah memahami hal itu melalui skema kerja pemikiran. Dan apa yang dilakukan itu membawa kita pada harmoni dalam rekonsiliasi atau konsensus. Dimensi *ethic* ini harus didasari oleh prinsip-prinsip keadilan sebagai struktur dasar masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut Rawls menganjurkan bahwa Liberalisme harus memiliki budaya kepolitikan publik (*public political culture*) atau dalam istilah hegel *objective ethic* yang didasari oleh prinsip-prinsip keadilan.

Ide-ide Rawlsian di atas tidak hanya dipahami sebagai ide yang mengkerangkai relasi antara warga negara karena ide-ide tersebut menjadi refleksi suatu rasionalitas kekuasaan dan beroperasi melalui teknologi kekuasaan yang spesifik. Sebagai suatu yang khas dari rasionalitas kekuasaan liberal, gagasan-gagasan Rawls menjelma dalam berbagai kebijakan atau proyek pengembangan kewarganegaraan di beberapa tempat. Kebijakan atau proyek ini merupakan teknologi kekuasaan untuk membentuk suatu governmentalitas warga negara liberal. Hal ini tercermin dalam kurikulum kewarganegaraan di United Kingdom yang coba menerapkan prinsip-prinsip *overlapping consensus* dalam pendidikan kewarganegaraan mereka. Kita bisa merujuk pada normalisasi yang dilakukan oleh *Qualifications and Curriculum Authority* (QCA) melalui kebijakan *the Civic Mission of School* yang menekankan nilai-nilai deliberatif-independensi, toleransi, dan civilitas- dalam pendidikan (Halliday, 1999). Sekolah menjadi arena yang tepat untuk menginjeksi norma-norma Kewarganegaraan Liberal. Melalui sekolah diharapkan warga negara sebagai subyek liberal diproduksi dan menormalisasinya dengan nilai-nilai deliberatif.

Rawls tidak sendiri membangun suatu gagasan demokrasi yang berdampak terhadap relasi antara warga negara, kita juga mengenal gagasan deliberatif melalui Habermas. Jika model deliberatif Rawls menekankan pada *Reasonable* maka Habermas berbicara soal komunikasi rasional. Komunikasi rasional dalam model deliberatif Habermas tercipta dalam posisi imparial dan setara antara subyek demokrasi. Berikut prinsip-prinsip deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas dalam proses implementasi (*procedure*) sebagai penanda bagi laku politik warga negara liberal.

1. Partisipasi dalam model deliberatif ditentukan oleh norma persamaan dan simetris. Artinya semua memiliki kesempatan yang sama untuk menginisiasi diskusi dan debat terbuka
2. Orang memiliki kesempatan yang sama untuk bertanya tentang topik diskusi yang berlangsung
3. Setiap orang memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap prosedur-prosedur dalam pewacanaan yang berlangsung

Ketiga poin di atas merupakan dasar bagi Habermas untuk menjelaskan legitimasi yang berdasar pada konsensus rasional dalam mekanisme rasionalitas komunikatif. Melalui proses-proses itu, yakni relasi atau pertukaran argumentasi rasional, Habermas membayangkan hasil yang bersifat rasional. Oleh karena itu, bagi dia ide mengenai rasionalitas universal bisa mendapat kepenuhannya dalam praktik kewarganegaraan deliberatif.

## **Kewarganegaraan dan praktik *Liberal Governance***

Dalam teori liberal, komunitas politik merupakan entitas independen dan memiliki otonomi menentukan keberadaan dirinya secara rasional dengan kedaulatan individu pada dirinya.

Antara individu tersebut melalui kontrak sosial membentuk pemerintahannya atau *community of governance*. Karena komunitas ini merupakan komunitas warga negara yang bersifat independen dan *self determining* maka karakter kewarganegaraanya pun bersifat independen, *self sufficiency*, *responsible* dan rasional (Dudley, 1999: 62). Elemen-elemen inilah yang mendominasi pemikiran liberal yang telah dijelaskan baik dalam pemikiran Locke maupun dalam ide-ide teoretisi liberal lainnya. Ide ini melahirkan model warga negara liberal dan tentunya karakter pemerintahan liberal. Saya melacak keterkaitan antara ide Kewarganegaraan Liberal dan *liberal governance* yang dibentuk dalam geliat lembaga supranasional dan ide besar mengenai masyarakat sipil. Institusi supranasional dan lembaga masyarakat sipil bekerja pada wilayah pembentukan kekuasaan baru, yakni politik liberal yang hegemonik.

Sejak perang dunia II, lembaga-lembaga supranasional meningkat drastis, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade*, *World Bank*, dan berbagai lembaga donor lainnya. Kehadiran lembaga-lembaga ini menjadi penting bagi totalisasi ide Liberalisme atau dengan kata lain teknologi kekuasaan bergerak melalui propaganda-propaganda disposisi (baca:aparatus) supranasional. Teknologi itu muncul dalam statemen-statemen politis yang ingin membentuk dunia dalam totalitasnya. Harry Truman dalam statement “*fair Ideal*” mencoba membentuk suatu manajemen baru dunia (Escobar, 1995:3). Suatu langkah imajinatif *dystopian* terhadap kondisi belahan dunia lain untuk menjustifikasi utopia baru melalui kekuasaan rezim liberal Barat. Dia menegaskan bahwa:

*more than half of people of the world are living in conditions approaching misery. Their food is inadequate, they are victims of disease. Their economic life is primitive and stagnant. Their poverty is a handicap and threat both to them to more prosperous areas. For the*

*first time in history of humanity possesses the knowledge and the skill to relieve the suffering of these people...i believe that we should make available to peace loving people the benefit of our store of technical knowledge in other to help them realize their aspirations for the better life...what we envisage is a program of development based on the concepts of democratic fair dealing.*

(Lebih dari separuh orang dimuka bumi sedang hidup dalam kondisi menderita. Mereka mengalami kekurangan pangan, mereka menderita berbagai penyakit. Kehidupan ekonomi mereka masih primitif dan stagnan. Kemiskinan mereka merupakan halangan sekaligus ancaman bagi kehidupan dan pencapaian kemakmuran. Untuk pertama kali dalam sejarah kemanusiaan, pengetahuan dan keterampilan digunakan untuk mengurangi penderitaan manusia...saya percaya bahwa kita seharusnya menyediakan pengetahuan kita untuk menolong mereka menyadarkan keberadaannya untuk kehidupan yang lebih baik..apa yang kita pertimbangkan merupakan suatu program pembangunan didasarkan pada konsep demokrasi).

*Statement*<sup>20</sup> mesianis sekaligus eskatologis di atas menjadi “imperatif moral” di mana bekerjanya proses hegemoni barat terhadap dunia ketiga sekaligus promulgasi ide-ide liberal yang melat di dalam wacana tersebut. Hegemoni muncul melalui kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga supranasional yang mendukung liberalisasi dan demokratisasi politik (Abrahamsen, 2000). Selain itu, proses pengglobalan masyarakat sipil liberal menjadi penting bagi penguatan wacana liberal Barat. Negara dalam wacana liberal dilihat sebagai *myopia* yang hanya bisa diatasi

---

20 *Statement* bukanlah ujaran dalam makna sederhana melainkan unit dari suatu diskursus yang membentuk objek diskursif serta mengokoh dalam posisi subyek yang spesifik (Andersen, 2005: 11)

jika masyarakat sipil berkerja. Dalam keyakinan ini, organisasi-organisasi masyarakat sipil -bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor- diyakini sebagai organisasi penyeimbang bagi kekuatan negara (Landell-mils dan Seageldin 1991:313), sekaligus terkandung makna di dalamnya pembatasan peran negara dan pemerintahan harus bekerja dalam rasionalitas liberal<sup>21</sup> (Abrahamsen, 2000:89). Perlu disadari bahwa pada saat yang sama dalam kondisi negara yang bertindak dengan rasionalitas Liberal, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan pemerintahan akan saling *constitutive* menjadi apartus liberal, sehingga peran pemerintah adalah bertindak dari kejauhan atau *government in "action at distance"* (Miller dan Rose, 1991: 9). *Action at distance* dipahami sebagai berikut:

*Liberal government identifies a domain outside 'politics', and seeks to manage it without destroying its existence and its autonomy. This is made possible through the activities and calculations of a proliferation of independent agents including philanthropists, doctors, hygienists, managers, planners, parents and social workers.*

(Pemerintahan Liberal mengidentifikasi wilayah di luar politik, mencari dan mengelolah itu tanpa menghancurkan keberadaanya dan keotonomiannya. Hal ini mungkin melalui aktivitas dan kalkulasi agen-agen yang independen meliputi, pekerja sosial, filantropis, dll)

Dengan kata lain, dalam wacana liberal, baik pemerintah liberal maupun organisasi masyarakat sipil akan beroperasi untuk membentuk subyek liberal atau warga negara liberal yang meyakini bahwa negara dalam kapasitasnya memiliki peran yang terbatas (hanya sebagai fasilitator) dan organisasi masyarakat sipil adalah

---

21 Interpretasi saya terhadap subtema "Meliberalkan Masyarakat Sipil" di dalam kajian Rita Abrahamsen

bentuk manajemen atau pendisiplinan baru dari pengorganisasian warga negara. Elaborasi doktrin liberal mengenai kebebasan dan otonomi melalui kerja lembaga *civil society* dan pemerintahan liberal memungkinkan bekerjanya Liberalisme dengan memproduksi subyek liberal atau warga negara liberal (*ibid*). Jadi, *political governance of liberalism* dapat digambarkan sebagai bentuk manajemen populasi<sup>22</sup> atau populasi yang spesifik dari negara. Manajemen ini meluas melalui praktik-praktik diskursif seperti kebijakan yang mewujudkan dalam kerja teknologi kekuasaan. Teknologi kekuasaan ini membentuk wajah subyek liberal yang meyakini otonomi serta suatu relasi baru dengan negara dalam kedaulatan individu. Bekerjanya teknologi kekuasaan menandakan menyebarnya rasionalitas kekuasaan liberal dengan muatan prinsip-prinsip moral, epistemologi dan bahasa yang khas, sehingga dapat dikatakan bahwa rasionalitas politik liberal mendapatkan afirmasi moral dan didasarkan pada pengetahuan serta dipahami melalui bahasa

Tetapi yang menjadi persoalan di atas adalah ide liberalisasi yang hegemonik menciptakan liberalisasi warga negara melalui proses sipilisasi. Hal Ini menunjukkan ambiguitas atau paradoks yang perlu dibongkar. Normalisasi wacana pemerintahan liberal yang menekankan peran negara yang kecil dan membangun teknologi kekuasaan melalui sipilisasi subyek politik menimbulkan keterpisahan antara negara dan warga negara. Efek meluas dari mode pemerintahan ini adalah melemahnya keterlibatan aktif warga negara dalam negara itu sendiri karena negara sudah didefinisikan sebagai sesuatu yang khas begitu pula warga negara. Negara tidak dilihat sebagai warga negara itu sendiri. Dengan kata lain, ide

---

22 konsep populasi Foucault merujuk pada subyek politik yang terkandung di dalamnya relasi keteraturan dan adanya “things”/ sesuatu yang mengikat dalam kebersamaan. Konsep ini berkaitan erat dengan konsep *governmentality* dari Foucault (Curtis, 2002: 509)

liberal sebenarnya memangkas keterlibatan aktif warga negara dalam proses-proses pemerintahan negara atas nama otonomi dan kebebasan pada diri warga negara<sup>23</sup>.

---

23 Sebagai ilustrasi, saya akan merujuk pada hasil pengamatan saya saat KKN. Hal ini saya temukan di daerah Manggarai Barat saat saya melakukan KKN-PPM UGM 2010. Oleh sebuah LSM, masyarakat dicangkoki ide kemandirian-masyarakat berani berotonom dari negara-tetapi di saat yang sama mengabaikan dimensi politik atau gerakan politik masyarakat agar dapat mempengaruhi kebijakan di level negara. Penjinakan ini, diperkuat oleh logika pemerintah yang menempatkan dirinya “hanya sebagai fasilitator”. Fasilitator diterjemahkan dalam peran pemerintah yang hanya mempermudah program-program yang direncanakan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil. Poin penting dari penjelasan dan pemaparan fakta di atas adalah penjinakan “warga negara” dengan dengan menormalisasi iman liberal mengenai pembatasan peran negara (memposisikan negara sebagai fasilitator) dan pentingnya intitusionalisasi pengelolaan warga negara melalui organisasi masyarakat sipil dan lembaga donor. Hal ini sengaja diciptakan untuk membentuk wacana *liberal governance*. Muaranya adalah kemunculan warga negara yang pasif dalam konteks keterlibatan mereka yang lemah dalam proses-proses kebijakan publik atau politik karena penundukan yang halus dari relasi kuasa antara lembaga *civil society* dan rejim negara.



# BAGIAN TIGA

## Paradoks Wacana Kewarganegaraan Liberal

*The real political task in a society such as ours is to criticize the working of institution which appear to be both neutral and independent; to criticize them in such a manner that the political violence which has always exercised itself obscurely through them will be unmasked, so that one can fight them (Foucault's expounding, in Human Nature)*  
(Foucault dan Chomsky, 2006)

(Tugas kepolitikan yang sesungguhnya dalam masyarakat adalah mengkritisasi beroperasinya intitusi yang mengklaim kenetralaan dan independensi; kritisasi merupakan usaha mengungkap rasionalitas kekuasaan dan melawan setiap normalisasi yang ada).

Bagian ini menjelaskan paradoks yang terkandung di dalam elemen-elemen formatif diskursus Kewarganegaraan Liberal sehingga menjelaskan kerentanannya. Dimensi rasional, individual, konsensus dan agregatif/ prosedural menjadi sasaran kritik. Usaha merentani wacana Kewarganegaraan Liberal merupakan suatu usaha politisasi politik dengan memunculkan dimensi *political* dan berbagai elemen lain yang penting bagi proyek artikulasi warga negara yang baru yang mana hilang dari penjelasan liberal.

Kerentanan di sini saya pahami sebagai kondisi paradoks sehingga tidak memungkinkan diskursus Kewarganegaraan Liberal berada pada ruang yang *fixed, tetap*. Pada momen seperti

inilah dislokasi menjadi jelas karena kita dapat mengamati setiap ambiguitas wacana Kewarganegaraan Liberal. Pendislokasian wacana Kewarganegaraan Liberal mengoperasikan *the Psyce* yakni suatu yang melampaui efek diskursif yang meregularisasi atau menormalisasi. Dengan kata lain, *the Psyce* menjadi sesuatu yang mendenormalisasi wacana yang dinormalkan (Butler 1997: 86). Dalam nalar inilah saya menjelaskan setiap paradoks wacana Kewarganegaraan Liberal.

### **Kepolitikan yang Absen**

Kehadiran wacana Kewarganegaraan Liberal sebagai wacana yang hegemonik telah menormalisasi begitu banyak cara kita berpolitik sebagai warga negara. Mulai dari pendefinisian warga negara sebagai maksimalisasi kepentingan Individu sampai pada penciptaan kondisi optimal dalam model konsensus.

Elemen-elemen formatif liberal mengandung satu kerentanan mendasar di antara berbagai kerentanan yang akan dijelaskan dalam pembahasan bab ini. Kerentanan itu adalah hilangnya elemen kepolitikan, *the political*, dalam penjelasannya. Kepolitikan sebagai suatu elemen penting untuk menjelaskan warga negara justru hadir sebagai kekuatan penjelas dalam Wacana Agonistik.

Kepolitikan merupakan ruang bagi kekuasaan, konflik, dan antagonisme. Dalam penjelasannya, Mouffe menguraikan bahwa kepolitikan menjelaskan dimensi antagonisme yang sifatnya konstitutif terhadap relasi yang terjalin antara berbagai identitas (cf Mouffe, 2005: 8). Kepolitikan dibedakan dengan *politics*. *Politics* merujuk pada institusi dan praktik yang mana suatu tatanan diciptakan untuk mengorganisasi koeksistensi antara identitas (*ibid*).

Gagasan *politics* di atas merupakan cerminan dari cara pengelolaan warga negara dalam wacana Kewarganegaraan Liberal. Pengelolaan warga negara pada level *politics* menandakan direpresinya dimensi konfliktual yang lahir dari gesekan berbagai antagonisme. Mendefinisikan warga negara pada level *politics* menjadi kerentanan yang dapat kita temukan dalam elemen-elemen deliberatif dan juga sentralitas elemen individual dalam wacana liberal.

Elemen deliberatif Rawlsian dan Habermasian yang menekankan pentingnya demokrasi yang berdasar pada konsensus *rational* dan *reasonable* antara individu-individu atau warga negara yang bebas dan *equal* menandakan bekerjanya logika *politics*. Hal ini disebabkan oleh tujuan konsensus untuk membentuk nalar publik atau suara bulat, *e pleburus unum*, dari suatu logika deliberasi. Kita dapat merujuk pada penjelasan sebelumnya di mana deliberasi membayangkan suatu konsensus di bawah suatu doktrin komprehensif, yakni Liberalisme. Di bawah doktrin itulah suatu tatanan yang ajeg dapat dibentuk.

Cara pengelolaan keragaman ini merefleksikan pengagungan pada rasionalitas universal dalam wacana liberal. Untuk merentani ini kita dapat memulai dari kritik Stirner. Dalam perspektif Stirner, universalitas rasional adalah cara pengabaian terhadap posisi diskursif yang berbeda dari antagonisme sosial. Hal ini dapat dilihat dari logika aporiatik antara warga negara *reasonable* dan warga negara *unreasonable* atau warga negara yang rasional dan tidak rasional. Warga negara *reasonable* merujuk pada warga negara yang mengafirmasi Liberalisme sebagai landasan dalam demokrasi sedangkan *unreasonable* merupakan kelompok yang menolak nilai-nilai Liberalisme atau warga negara yang bertindak berdasarkan nalar dan yang bertindak berdasarkan hasrat yang destruktif

(Mouffe, 2000: 28-29). Berdasarkan hal itu, dalam terang berpikir Stirner kita dapat menyimpulkan bahwa gagasan Rawls merupakan bentuk marjinalisasi terhadap posisi *difference* (Stirner dalam Newman, 2005:22). Marjinalisasi melalui mekanisme konsensus ini pada akhirnya bermuara pada penunggalan atau kesepakatan akan Liberalisme sebagai cara berpolitik yang rasional.

Merujuk pada makna yang sama, bahasa Mouffe yang menjelaskan bahwa kerentanan dasar model Rawls dan Habermas adalah pembayangan akan konsensus rasional yang mengaburkan fakta pluralitas yang tidak mungkin direduksi di tengah kehadiran antagonisme yang tak pernah berakhir. Bagi dia harmonisasi ini bersifat tidak politis karena pada dasarnya harmonisasi berbicara penunggalan terhadap realitas plural dalam satu dimensi yakni *well-order society*. Mouffe menekankan pentingnya pengelolaan fakta pluralitas. Jika pengelolaan pluralitas dalam Liberalisme bersifat *arbitrary*, bagi Mouffe pluralitas harus dibingkai dalam model Kewarganegaraan Agonistik -model yang tidak melihat diversitas posisi subyek sebagai bahaya terhadap demokrasi melainkan sesuatu yang niscaya bagi demokrasi (Mouffe, 2000: 29 dan 49). Dalam cara berpikir demikian, warga negara dihadirkan dalam demokrasi yang merayakan gesekan antagonisme karena hal tersebut konstitutif terhadap demokrasi modern.

Sebagai ilustrasi, kita dapat menjelaskan terorisme sebagai suatu fakta yang muncul di atas gerak universalisasi liberal yang menegasi antagonisme. Rasionalitas liberal bergerak ke arah penegasian dimensi kepolitikan karena keyakinan akan tujuan *politics* -yang direfleksikan dalam elemen deliberatif- untuk membangun konsensus dalam model yang tunggal, yakni Liberalisme itu sendiri. Hal ini yang mengkondisikan ditutupnya jalur artikulatif bagi kelompok yang dianggap teroris, yang seharusnya dipahami sebagai

*legitimate dissent*. *Legitimate dissent* menandakan relasi agonistik yang merayakan pluralitas khususnya pembedaan antara kita dan mereka dalam relasi *adversarial*<sup>24</sup>.

Malam hari setelah serangan terhadap World Trade Center dan Pentagon, Bush mengeluarkan statemen kenegaraannya sebagai berikut:

*“Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes, or in their offices; secretaries, businessmen and women, military and federal workers; moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. The acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed; our country is strong.”* (Asad, 2007: 7)

(Selamat malam. Hari ini, rekan-rekan warga negara kita, cara hidup kita, kebebasan kita diserang oleh aksi teroris yang mematikan. Korban yang berada di pesawat, atau di kantor, sekretaris, pebisnis, perempuan, militer, pekerja federal: ayah dan ibu, teman dan tetangga. Juta'an yang hidup tiba-tiba berakhir oleh kejahatan, aksi teror yang tercela dan hina. Gambaran pesawat yang terbang menuju bangunan, kobaran api, bangunan raksasa yang runtuh, menjadikan kita sulit percaya, kesedihan yang luar biasa, dan suatu ketenangan, pantang mundur. Aksi pembunuhan massal yang bermaksud untuk merentani bangsa kita ke dalam kekacauan dan kemunduran. Tetapi mereka gagal; bangsa kita kuat).

---

24 Relasi agonistik akan dijelaskan dalam Bab IV.

Statemen Bush yang merespon aksi terorisme di atas menjelaskan dua hal, yakni **posisi subyek** dan **objek discursive**<sup>25</sup>. *pertama*, statemen tersebut menjelaskan posisi subyek atau *subject position* dalam diskursus liberal. Bahwa warga negara Amerika sebagai simbolisasi dari Liberalisme yang mengagungkan kebebasan diserang oleh antagonisme-nya, yakni identitas politik yang oleh wacana Amerika disebut Teroris, “*our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts*”. *Kedua*, Statement di atas menjelaskan juga objek diskursifnya yakni kelompok teroris, *Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror*. Tetapi yang perlu kita jelaskan di sini adalah mengapa kebebasan mereka sebagai warga negara (baca: Liberalisme) diserang? dan bagaimana antagonisme ditanggapinya?

Sudah jelas bahwa munculnya terorisme tidak dilihat sebagai kondisi yang terpisah dari Liberalisme sebagai wacana hegemonik. Berbagai kebijakan dan promulgasi rasionalitas Liberalisme menjadikan dia sebagai doktrin komprehensif yang mengkerangkai setiap gerak warga negara. Meluasnya Liberalisme berjalan seiring dengan panaklukan dan normalisasi. Normalisasi dan penaklukan melahirkan pada dirinya wilayah traumatik yang sewaktu-waktu akan meledak. Dalam konteks ini terorisme adalah wujud dari subyek traumatik yang sekian lama direpresi

---

25 Analisis terhadap statement dalam alur berpikir Foucauldian harus menjelaskan dua hal yakni objek diskursif dan subject. Suatu statement menjadi statement jika dia menciptakan objek. Objek itu merupakan objek yang bersifat diskursif dan diklasifikasi melalui statement itu sendiri. Objek yang diartikulasi menjelaskan bahwa hal itu dihadirkan sebagai fakta bukan hanya sebagai fakta diskursif tetapi juga fakta sosial sehingga dapat diartikulasi. Pada saat yang sama, statement akan menjadi statement jika menunjukkan posisi subyek. Statement mengartikulasi ruang bagi kehadiran subyek (Andersen, 2003: 11; Foucault, 1986: 88-92)

oleh penunggalan Liberalisme<sup>26</sup>. Statemen Nurdin M. Top dalam surat pertanggungjawaban bom bali 1 oktober 200 berikut sedikit menjelaskan hal di atas: “*Kami juga mengatakan bahwa musuh kami adalah penguasa-penguasa murtad yang mengganti hudud Allah dengan hukum kafir **demokrasi** dan undang-undang sekular*”. (Abas, 2008: 28).

Subyek traumatik -misalnya Nurdin M. Top yang mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok radikal- menjelaskan bahwa suatu tatanan simbolik (Liberalisme) berada dalam kisaran struktur yang akan merentani, yakni *traumatic kernel* (Stavrakakis, 1999: 38). Bahasa Lacanian ini menunjukkan betapa tindakan represi akan selalu menghadirkan atau mengembalikan apa yang telah direpresi, *the return of repressed*.

Munculnya perlawanan di atas menunjukkan gerak disolusi dari kisaran wacana demokrasi liberal yang bagi saya prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya gagal menjawab persoalan ekonomi dan politik dari berbagai identitas politik atau warga negara yang berada di bawah rezim demokrasi liberal. Mungkin di sini akan lebih afdol jika kita meringkas hal di atas dalam anekdot yang diceritakan Zizek dalam *Violance* khususnya dalam bab I: *SOS Violence* (Zizek, 2008: ).

“Ada seorang opsir atau perwira Jerman yang mengunjungi Picasso di studionya di Paris selama perang Dunia II. Dia melihat Guernica dan kaget pada lukisan “modernist chaos”. Perwira itu bertanya kepada Picasso: apakah kamu yang melakukan ini? dengan tenang Picasso menjawab: tidak, kamu yang telah melakukan ini!”.

---

26 Jelaskan bagaimana kebijakan Liberal yang menciptakan eksploitasi dll

Saat ini, dunia liberal, ketika menghadapi ledakan kekerasan seperti terorisme atau bentuk kekerasan lainnya, seolah-olah mengakui dirinya terkena amnesia historis dan politik sehingga mereka pun bertanya: siapa yang melakukan ini, kelompok fundamentalis? Kita pun menjawab seperti Picasso: tidak. Anda yang melakukan ini! ini sesungguhnya hasil dari politik anda! (cf Zizek, 2008: 11)

Radikalisasi kelompok teroris seolah-olah mengabsahkan kultur kematian, *culture of death*, dari wilayah diskursif tertentu (Asad, 2007:1). Namun keradikalan tersebut tidak perlu dilihat sebagai suatu budaya kematian melainkan lahirnya antagonisme dalam tatanan Liberalisme yang opresif. Bahwa fakta yang menunjukkan identifikasi subyek ke dalam kelompok yang dianggap teroris merupakan bentuk identifikasi baru warga negara dari negara yang menerapkan demokasi liberal. Liberalisme dan wacana kewarganegaraannya sebagai tatanan simbolik menjadi apa yang oleh Lacan disebut sebagai *the real*. *The real* merujuk pada keterbatasan internal dari suatu tatanan simbolik atau penanda. Akibatnya, pertama, identitas tidak dilihat sebagai sesuatu yang penuh atau absolut dari suatu tatanan simbolik (Newman, 2005: 59). Dalam konteks ini, warga negara -dalam suatu rezim Liberalisme- sebagai identitas yang tidak merujuk pada satu identifikasi semata: Liberalisme, melainkan senantiasa menjadi subyek yang tidak komplit atau *lack* karena adanya jarak antara subyek dengan struktur atau penanda. Dengan demikian subyek dalam proses identifikasinya tidak dapat ditunggalkan dalam satu penanda. Warga negara akan selalu berada dalam ruang signifikansi yang gagal, *fail place of signification*. Dari sanalah kita dapat memikirkan identitas warga negara yang demokratik karena sifat kontingensinya (Laclau, 1990: 44)

Namun demikian, artikulasi identitas-identitas politik yang radikal tidak direspon sebagai bagian penting dari gejolak politik di dalam demokrasi liberal; demokrasi yang merayakan polifoni kekuatan politik warga, justru sebaliknya, atas nama universalisasi, Liberalisme kelompok-kelompok itu direprepsi oleh berbagai kebijakan yang salah satunya kita kenal sebagai *counterterrorism*. *Counterterrorism* mewujud dalam aktus perang melawan terorisme.

Kata perang menurut Walzer menunjukkan tindakan legal untuk membunuh di bawah suatu konteks tertentu (misalnya, mempertahankan diri atau membela negara ketika diserang). Kata perang ini dipakai oleh Bush dan sekutu-sekutunya untuk melenyapkan terorisme.

*“I have just completed a meeting with my national security team, and we have received the latest intelligence updates. The deliberate and deadly attacks which were carried out yesterday against our country were more than acts of terror. They were **acts of war**. This will require our country to unite in steadfast determination and resolve”.*

(Saya telah menyelesaikan pertemuan dengan tim keamanan nasional, dan kita telah menerima laporan intelijen terbaru. Serangan sengaja dan mematikan oleh kelompok terorisme kemarin terhadap negari kita tidak semata tindakan teror melainkan aksi perang. Kondisi ini menuntut negeri kita untuk bersatu dalam kebulatan tekad untuk menyelesaikannya).

Setelah mengeluarkan pernyataan di atas, pemerintahan Bush dan media Amerika Serikat menggunakan frase “*War Against Terrorism or Terror*” (Asad *op cit*, hal. 7). Merujuk pada penjelasan Walzer mengenai perang sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa penegasan kata perang merupakan bentuk afirmasi terhadap tindakan Amerika dan sekutunya untuk membasmi kelompok-

kelompok teroris. Dengan kata lain, perang di sini menunjukkan legalisasi kekerasan yang memiliki efek eliminatif.

Kebijakan *counterterrorism* menunjukkan betapa kepolitikan, *political* dilenyapkan atas nama pengorganisasian koeksistensi di bawah doktrin komprehensif Liberalisme. Dengan demikian wacana Kewarganegaraan Liberal berdiri di atas bingkai *post-political*, yakni berpolitik dengan menegasi gesekan berbagai antagonisme (Mouffe, 2005).

Dalam bahasa yang lain tetapi mengandung makna yang sama, fakta di atas menunjukkan logika antagonistik Schmitian yakni *relasi kawan/ musuh*. Apa yang terjadi kemudian adalah polarisasi dua kekuatan yakni, *Civilized World* dan *Enemies of Freedom/Democracy* (*ibid*, hal. 77). Logika antagonistik ini menunjukkan relasi saling mengeliminasi. Amerika sebagai perwujudan teknologi kekuasaan wacana liberal berkepentingan untuk mempertahankan hegemoni wacana liberal sebagai cara hidup yang mengatur seluruh populasi di dunia (warga negara) sehingga dia harus mengeliminasi identitas lain yang merentaninya. Oleh karena itu, apa yang penting bagi demokrasi liberal adalah kesadaran akan konsensus antara warga negara dalam demokrasi liberal.

Konsensus yang diagungkan dalam Liberalisme menunjukkan betapa kerangka warga negara yang ingin dibangunnya, merayakan stabilisasi sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat distabilkan. Ibarat pertemanan, nalar liberal memaknai konsensus dari pluralitas sebagai inti dari soliditas pertemanan yang sesungguhnya (*prÓte philia*) di mana relasi itu dibangun di atas kesadaran akan *telos*, suatu gerak lurus yang ingin dicapai atau disasar bersama. Namun, sesungguhnya dalam pertemanan itu, *telos* tidak mungkin dicapai karena relasi intersubyek yang didasarkan pada perbedaan tidak memungkinkan kondisi itu dicapai. Ketidakmungkinan untuk

mencapai tujuan final menjadi *interdictive bar* (tiang penghalang) dalam relasi pertemanan atau dalam konteks ini konsensus (cf, Derrida, 1997: 221-222)

Berangkat dari paradoks di atas, kita tentu melihat narasi besar demokrasi liberal yang sama sekali mengandung karakter represif di dalam dirinya. Apa yang seharusnya dipikirkan saat ini adalah wacana kewarganegaraan yang memungkinkan terbangunnya egalitarianisme. Wacana kewarganegaraan yang mampu menjelaskan keragaman identitas politik warga negara tanpa cenderung untuk menciptakan kondisi optimal atau suara bulat, *e pleburus unum*, dengan mekanisme konsensus. Untuk itu kita perlu mengkerangkai penjelasan kewarganegaraan saat ini melalui model agonistik.

Berkaitan dengan isu terorisme, jika kita mengkerangkainya dalam model agonistik maka kelompok terorisme tidak dilihat sebagai musuh atau kategori *evil*, melainkan identitas yang disematkan dengan predikat *legitimate dissent*. Hal ini disebabkan karena pengakuan akan keterbukaan struktur sosial yang senantiasa diisi oleh kepelbagaian<sup>27</sup>, *difference*. Konsekuensi logisnya,

---

27 Kata kepelbagaian digunakan dengan pertimbangan semantik yang khusus. Kepelembagaan penulis gunakan untuk menghindari pemakaian kata keberagaman. Kata keberagaman memiliki ambiguitas makna jika kita melihat arti dari akar kata *ragam*. pertama kata ragam berarti bermacam-macam dan yang kedua berarti rukun (KBI, 2008: 1248). Sedangkan kata pelbagai hanya memiliki satu arti yakni bermacam-macam (ibid, hal. 1142). Menurut ahli bahasa Dr. Frans Bustan, kata keberagaman cenderung dimaknai sebagai kerukunan di antara perbedaan sehingga dampaknya perbedaan diolah untuk menemukan format yang seragam atau tunggal. Sedangkan kepelbagaian memiliki makna pluralitas yang radikal yakni merayakan perbedaan sebagai perbedaan itu sendiri tanpa meninggalkan perbedaan dalam kerukunan (hasil diskusi dengan Dr. Frans Bustan di Yogyakarta hari Senin, 21 Maret 2011, pukul 13.00). Berdasarkan penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa memaknai relasi Agonistik harus merujuk pada semantik kepelbagaian karena hal seperti itulah yang diartikulasikan dalam Agonistik, suatu perbedaan yang radikal, perbedaan yang tidak ingin dieliminasi demi suatu kerukunan.

keidentitasan kita tidak akan pernah penuh karena akan selalu ada dalam kehadiran yang lain. Dalam kesadaran seperti inilah artikulasi politik warga negara mungkin dilakukan dan kanal-kanal politik akan semakin terbuka luas.

Relasi antara warga negara ibarat pertemanan yang dibangun di atas kondisi adanya “tiang penghalang” antar subyek. Di sanalah demokrasi sesungguhnya hadir, di atas artikulasi yang berbeda dari setiap identitas yang tidak dapat dipikirkan secara instan dalam model konsensus. Demokrasi sesungguhnya selalu menghancurkan dirinya karena tidak ada kestabilan yang ajeg padanya, begitu pula warga negara akan senantiasa berada dan berelasi dalam ketidakajegan itu demi suatu emansipasi yang meluas karena menghindari dominasi.

### **Etika Humanitarian: Wajah Janus dan Pelemahan Warga Negara sebagai Subyek yang Berjuang**

Dimensi humanitarian atau humanisme menjadi salah satu penjelas dalam wacana Kewarganegaraan Liberal yang penting untuk direntani. Etika humanitarian dijelaskan oleh Stirner sebagai gagasan sekuler yang menempatkan individu dalam kebebasan dan otonominya serta kesetaraan yang universal. Namun demikian Stirner mengakui adanya wajah janus Liberalisme dalam dimensi etik ini. Stirner menegaskan bahwa Liberalisme yang menekankan kebebasan individu di satu sisi sedangkan di sisi lain etika ini meneguhkan penguasaan individu sebagai tirani yang eksploitatif (Newman, 2005).

Penekanan akan kesetaraan, otonomi dan kebebasan sebagai sifat kodrati dalam wacana Kewarganegaraan Liberal memungkinkan perluasan etika humanitarian dalam ruang politik global. Perluasan etika tersebut meneguh dalam praktik-praktik politik Liberalisme. Namun sejalan dengan kritik Stirner, Zizek melihat bekerjanya

etika humanitarian sebagai wujud dari pengoperasian wajah ganda Liberalisme yakni sifat eksploitasi dalam laku karitatifnya. Kritik Zizek ini diuraikan dalam penjelasannya mengenai Liberal Komunisme.

Liberal Komunisme mewujud dalam praktik politik liberal Bill Gate. Praktik politik Bill Gate disebut sebagai Liberal Komunisme karena penekanannya pada kebebasan individu juga dimensi etik yang sifatnya karitatif. Menurut Zizek, pengakuan akan humanitarian etik yakni kesetaraan dan kebebasan individu dalam kisaran politik Liberal Komunisme ditunjukkan dengan dukungannya terhadap penolakan atas politik apartheid di Afrika Selatan, yaitu dengan menyuarakan penghapusan segregasi sosial, penyamaan gaji bagi orang kulit hitam dan putih, dll (Zizek, 2008: 19). Dalam penjelasan ini, humanitarian etik seolah menjadi kunci penting dalam mengkerangkai relasi yang setara antar warga negara atau identitas politik. Namun hal itu menjadi paradoks ketika kita mempersoalkannya sebagai bagian dari normalisasi ideologi yang sifatnya menindas.

Bagi Zizek, pengagungan akan etika humanitarian secara tidak langsung mengaburkan sifat eksploitasi dari agenda ekonomi politik Liberalisme. Humanitarianisme dioperasikan untuk menjinaki tubuh-tubuh warga negara yang terkonstruksi dalam kisaran liberal. Karena melalui peneguhan kesadaran akan kesetaraan dan kebebasan individu, ekspansi ekonomi Bill Gates atau rezim Liberalisme dapat menjadi masif. Orang yang disadarkan akan kesetaraannya dikelabui dalam kesadaran akan akses ekonomi semata. Dalam konteks ini, warga negara dinormalisasi menjadi “konsumen” dari kapitalisme global yang sangat eksploitatif. Di sinilah kita menemukan penegasan kembali akan sifat tirani yang ditengarai oleh stirner dalam etika Liberalisme Humanitarian.

Apa yang ingin diadvokasi Zizek di sini adalah kepekaan kita sebagai warga negara terhadap kerja ideologi yang mengokoh dalam praktik normalisasi melalui etika humanitarian. Dengan menggugah kesadaran itu, kita diajak untuk mengkritisi kerja ideologi liberal yang menciptakan kebenaran pada dirinya. ideologi tidak bekerja dalam distorsi, tetapi senantiasa mengkonstruksi kebenaran obyektif yang dimungkinkan dalam praktik politik sehingga dia hegemonik.

Kesadaran kritis akan ketertundukan membuka wilayah baru bagi artikulasi perjuangan kewarganegaraan, suatu transformasi politik yang radikal yang memungkinkan dislokasi terhadap rezim opresif. Di sinilah makna hegemoni dalam wacana Kewarganegaraan Agonitik menjadi penting demi memperjuangkan kesetaraan yang menegasi relasi penindasan.

Kritik yang berbeda diajukan oleh Carl Schmitt terhadap gagasan *individualistic-humanitarian ethics*. Pemikir-pemikir liberal -Locke, Stuart Mill dan lainnya- meyakini bahwa manusia dilahirkan secara setara sejak lahir dan diberkahi oleh nalar yang menunjukkan kemuliaan manusia. Schmitt mengatakan bahwa wacana liberal tidak memberikan sumbangan berarti bagi perjuangan kebebasan dan kesetaraan warga negara yang menjadi inti demokrasi. Kebebasan dan kesetaraan yang dipikirkan dalam wacana liberal dengan mengutarakan kesederajatan manusia bagi Schmitt sama sekali tidak mempertimbangkan dimensi performatif atau perjuangan dari kesetaraan dan kebebasan. Oleh karena itu, saya berpendapat, gagasan liberal hanyalah konsepsi moral bukan politis atau dengan kata lain suatu gerak cerdik yang menyelubungi apa yang sesungguhnya (*artifice of concealment*).

Ketika dimensi kepolitikan dan perjuangan absen dari penjelasan liberal maka warga negara menjadi penerima pasif yang mendapat *privilege* filosofis semata tanpa suatu isi yang mengatifikannya. Namun demikian Schmit sendiri jatuh pada kondisi paradoks ketika dia menawarkan alternatif berpikir yang menempatkan isu kesetaraan dalam homogenitas identitas sebagai syarat bagi demokrasi. Berkaitan dengan kewarganegaraan, kesetaraan hanya muncul dalam suatu kondisi homogen atau dalam substansi yang sama. Hal inilah yang ingin dikritik oleh Mouffe melalui wacana Agonistik.

Mouffe sepakat dengan Schmitt atas kritiknya terhadap wacana liberal. Garis pemisah yang ditarik Mouffe terletak pada ketidaksepakatannya terhadap Schmitt mengenai homogenitas sebagai syarat demokrasi. Bagi Mouffe, kategori demos atau warga negara tidak dapat menjadi substansi yang sama dalam ruang demokrasi. Warga negara adalah identitas yang menempati posisi subyek yang plural dan dalam kepelbagaian itulah relasi Agonistik antar warga negara terbentuk. Konsekuensi logisnya, isu kesetaraan pun menjadi isu yang mengisi pluralitas posisi subyek warga negara. Kondisi ini menjadikan kesetaraan diletakkan sebagai etika kepolitikan<sup>28</sup> dalam relasi Agonistik. Hal ini berarti, kesetaraan menjadi landasan bagi setiap identitas kewarganegaraan untuk mengartikulasikan tuntutan-tuntutan demokratik. Mouffe di sini memberi ruang bagi proses-proses artikulasi politik bagi setiap identitas politik-warga negara- yang plural dalam perjuangan mencapai kesetaraan.

---

28 Tema ini akan dijelaskan dalam Bab IV *liberty dan equality sebagai etika kepolitikan warga negara Agonistik*

## Individualisasi Warga Negara sebagai Bentuk Pendistor-sian Artikulasi Kolektif Warga Negara

Menurut Charles Taylor, subyek liberal bersifat atomis atau dalam bahasa Hegel spirit subyektif (Mouffe, 1993: 28). Dalam konsep ini karakter dasar yang melingkupi subyek adalah *self-sufficient*. Bagi Taylor hal tersebut bersifat distortif bagi identifikasi kolektif dalam ruang publik karena kecendrungan Liberalisme membentuk *Bureaucratic Individualism*. Menurut saya, pemikir komunitarianisme seperti Taylor menekankan dimensi warga negara pada spirit obyektif yakni keterlibatan aktif dalam persoalan-persoalan publik yang hanya bisa dilakukan ketika orang berada dalam suatu komunitas politik. Pemikiran seperti ini menjelaskan gagasan Aristotelian mengenai *social animal* di mana manusia tidak dapat mencukupi dirinya dalam individualitas, tetapi dia harus berelasi dengan sesamanya. Dengan demikian *sharing of social power* dapat berlangsung dan manusia pun menjadi *bios politikos*. Dalam kolektivitas tersebut warga negara memiliki kekuatan untuk mengartikulasi kepentingannya karena intimasi dalam ruang sosial menjadi *modal sosial*<sup>29</sup> bagi suatu aktus politik warga negara yang aktif. Jadi, pengabaian wacana Liberalisme terhadap ikatan kolektif adalah ilusi besar dalam suatu sistem sosial atau politik khususnya warga negara demokratis.

Alasdair MacIntyre hadir dengan kritik yang berbeda mengenai individualisme yang dikerangkai oleh Rawls. Menurut saya kritik yang dikemukannya berkaitan dengan kritiknya mengenai posisi original di mana sebelumnya telah dijelaskan bahwa posisi original merupakan posisi di mana setiap individu sebagai warga negara tidak

---

29 Modal sosial merujuk pada pendefinisian Bourdieu yakni hubungan-hubungan dan jaringan hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan kedudukan sosial politik (Bourdieu dalam Haryatmoko, 2003:12)

ditentukan atau dikonstruksi oleh ikatan-ikatan sosial tertentu. Bagi dia, gagasan Liberalisme seperti itu menghilangkan kebajikan, *virtue*, dari suatu ikatan sosial. Kebajikan inilah yang memungkinkan adanya pertukaran pemahaman mengenai kepentingan bersama dalam suatu komunitas. Dalam konteks tersebut, kepentingan individu akan merujuk pada konsepsi kepentingan bersama yang telah ditentukan. Akhirnya, dia menegaskan bahwa penolakan liberalisme terhadap konsepsi *common goods* menjadi sumber nihilisme yang merusak ikatan kolektif (*ibid*, hal 29).

Kritik Alasdair di atas di atas setidaknya memberikan pemahaman baru bagi kita bahwa berbicara komunitas berarti penting di dalamnya membahas soal *common goods* yang mengikat setiap individu. Dalam konteks warga negara penting kiranya kita menghadirkan ide mengenai *common goods* sebagai elemen penting yang menentukan kolektivitas warga negara. Namun kita harus menarik garis pemisah di sini dengan pemikir Komunitarian. Dalam wacana Kewarganegaraan Agonistik, *common goods*<sup>30</sup> tidak dilihat sebagai sesuatu yang menunggalkan melainkan sebagai ruang kosong di mana setiap identitas politik/ warga negara merujuk kepadanya, tetapi pada dasarnya mereka tidak akan pernah sampai pada pemenuhannya. Hal inilah yang memungkinkan adanya relasi konfliktual antara berbagai identitas politik warga negara.

Perlu saya tegaskan lagi, ide Komunitarian di atas bukan berarti tidak memiliki kerentanan *per se*. Dalam ide ini, Komunalitas menjadi suatu kesatuan tunggal yakni mencirikan masyarakat *gemeinschaft*, sebuah masyarakat yang tunggal dalam kolektivitasnya sehingga menjadi bahaya yang harus dihindari. Di sinilah muncul dualisme antara *individu/ kolektif* di mana ketegasan tapal batas

---

30 Ide mengenai *common good* dalam wacana Agonistik juga akan dijelaskan dalam bab IV

antara keduanya tidak terselesaikan karena relasi itu memiliki ciri melampaui. Oleh karena itu, dualisme ini menghasilkan *kekosongan ganda* dan di dalamnya rumusan Kewarganegaraan Agonistik hadir sebagai rumusan alternatif untuk menjawab ambiguitas antara Komunitarianisme dan Liberalisme, atau dengan kata lain rumusan ini keluar dari ketegangan antara Liberalisme dan Komunitarianisme. Oleh karena itu salah satu bagian penting dari model Kewarganegaraan Agonistik adalah merumuskan komunitas politik atau identitas politik di satu sisi (*political community*) dan menjelaskan individu secara berbeda di sisi yang lain (Mouffe, 1992a)<sup>31</sup>.

Tidak seperti Liberalisme yang menekankan individualitas sebagai elemen penting bagi warga negara, Kewarganegaraan Agonistik menekankan pentingnya identifikasi kolektif dalam identitas politik. Seperti yang dikemukakan oleh Mouffe bahwa pembentukan identitas politik sebagai warga negara Agonistik tergantung pada identifikasi kolektif antara tuntutan demokratik yang kita temukan dalam berbagai gerakan, misalnya: gerakan perempuan, pekerja, ekologi, gay, waria, dll (*ibid*, hal. 70).

Untuk memahami bagaimana identitas menjadi bagian penting dari perjuangan politik secara kolektif, penting bagi kita untuk memahami metafora bahasa sebagai keserupaan penjelas bagi makna kolektifitas identitas. Sama seperti bahasa yang membutuhkan suatu komunitas bahasa untuk menciptakan maknanya, begitu juga dengan identitas membutuhkan komunitas yang kuat di mana maknanya sebagai identitas hadir dalam relasi antara satu dengan yang lain. Untuk memahami bagaimana relasi

---

31 Dalam bab sub tema bagian empat mengenai *identitas sebagai penjelas awal* ketegangan ini akan dijawab melalui penjelasan mengenai subyek lack dan sifat kontingensi dari suatu identitas politik atau warga negara

ini dapat ditransformasikan ke dalam relasi kepolitikan, maka gagasan artikulasi menjadi sangat sentral. Artikulasi memungkinkan berbagai elemen atau identitas dioperasikan ke dalam gerakan politik massa.

Jalinan penanda yang terartikulasi merepresentasikan dirinya sebagai kepentingan bersama. Sebagai contoh dalam momen “kegelisahan sosial” di mana beberapa peristiwa yang berbeda seperti, pemogokan buruh pabrik, protes mahasiswa, dan aktus atau perjuangan hak-hak sipil dapat menjadi peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain. Hal tersebut dapat ditafsir sebagai gerakan melawan hegemoni ekonomi tertentu. Dalam perbedaan identitas itu mereka dimungkinkan ada dalam suatu jalinan kepentingan bersama hanya karena artikulasi tuntutan-tuntutan yang terjadi dalam momen “kegelisahan” di atas. Dengan kata lain, artikulasi dari tuntutan-tuntutan bersama dan representasi gerakan *counter-hegemonic* memungkinkan aktus kepolitikan kolektif.

Dalam kaitannya dengan penjelasan di atas, makna hegemoni menjadi suatu keharusan bagi Kewarganegaraan Agonistik. Hegemoni menjadi penjelas bagi artikulasi warga negara Agonistik. Hal ini disebabkan karena dalam Kewarganegaraan Agonistik proses identifikasi merupakan momen di mana warga negara Agonistik, dengan interpretasinya terhadap prinsip kebebasan dan persamaan bertujuan, mengkonstruksi kita dalam suatu artikulasi jalinan ekuivalensi antara tuntutan-tuntutan demokratik (*ibid*).

## **Pasifisasi Warga Negara Melalui Kerangka Prosedural**

Kita beralih kepada kerentanan elemen Kewarganegaraan Liberal yang lain yakni elemen Agregatif Schumpeterian. Demokrasi Schumpeterian dengan elemen-elemen formatifnya menyimpan ilusi besar dalam menerjemahkan hak pilih universal (*universal*

*suffrage*) dan kepentingan individu melalui model agregatifnya. Hak pilih universal diterjemahkan dalam hak-hak prosedural warga negara. Ada paradoks besar yang ditimbulkan oleh model ini yakni munculnya warga negara yang pasif. Jika Mouffe mengkritik warga negara liberal sebagai warga negara pasif karena Liberalisme melihat hak warga negara dalam bingkai perlindungan hukum (dalam Stuart Mill) dan etika-humanitarian yang mengabaikan dimensi *political* dari hak (*ibid*: 30) maka saya melihat kepasifan warga negara tidak hanya dalam penjelasan tersebut namun juga terletak dalam mekanisme Agregatif khususnya model perwakilan.

Model relasi kewarganegaraan dalam model Agregatif yang menyumbang kepasifan politik disebabkan oleh beberapa hal berikut: *pertama*, mobilisasi warga negara melalui sistem prosedural hanya menempatkan warga negara dalam partisipasi yang bersifat kuantitatif. *Kedua*, tendensi oligarkis dalam model representasi agregatif. Hal ini disebabkan karena keyakinan liberal tentang representasi bermuara pada penyerahan wewenang kepada para representator untuk menentukan kebijakan yang diyakini sebagai refleksi dari kehendak warga negara. Kondisi ini menimbulkan tendensi oligarkis atau superioritas di dalam lembaga representasi. Keputusan politis yang diserahkan kepada representator pada dasarnya merasionalisasikan *gap* dalam tubuh warga negara antara yang diwakilkan dengan yang mewakilkan, yakni pembuat kebijakan. Situasi ini berakibat pada partisipasi yang bersifat *regular* atau warga negara hanya sebagai pelaksan kebijakan. Di sini jelas bahwa warga negara tidak memiliki keterlibatan aktif-karena *gap* yang muncul- dalam proses menentukan kebijakan karena kendala representasi.

Kepasifan warga negara dalam wacana Kewarganegaraan Liberal dapat pula dilacak dari premis-premis demokrasi yang

didefinisikan oleh Weber dan Schumpeter. Bagi Weber, Demokrasi diartikan sebagai penciptaan kepemimpinan politik yang efektif dalam masyarakat birokratis modern. Weber membagi dua kategori warga negara, yakni elemen-elemen yang aktif secara politik dan yang pasif secara politik. yang aktif secara politik adalah orang-orang yang menduduki jabatan publik sedangkan yang pasif adalah mereka yang diwakili. Dari pemilahaan tersebut, kita mengenal istilah “Keengganan Rakyat” yang diperkenalkan oleh Weber. Reduksi demokrasi menjadi sekadar mekanisme untuk melegetimiasi otoritas elit politik telah dielaborasi oleh Schumpeter. Dia menyatakan bahwa peran rakyat dalam demokrasi hanya semata-mata melahirkan pemerintah (Dalam Abrahamsen, 2004:114). Oleh karena itu, terbatasnya pengaruh pemilih bukanlah suatu kondisi yang perlu disesalkan.

Apatisme politik dalam mekanisme prosedural pun kadang secara ekstrim dianggap sebagai pencapaian positif dari demokrasi. Kelompok pendukung demokrasi prosedural menanggapi hal tersebut sebagai bentuk kepercayaan terhadap pemimpin politik. Selain itu apatisme juga dinilai menguntungkan bagi pluralisme politik. Apatisme dan ketidakaktifan bukan hanya dianggap sebagai bentuk esensial dari demokrasi namun juga merupakan petanda adanya pengertian dan toleransi terhadap keragaman manusia. dengan kata lain Apatisme merupakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan demokrasi dan nilai-nilai liberal seperti toleransi, kebebasan, dan kesetaraan (*ibid*, hal. 116).

Kepasifan yang dianggap mulia ini merupakan cerminan dari politik yang melahirkan penjelasan mengenai elitisme politik kewarganegaraan. Ruang negosiasi menjadi wilayah eksklusif dari para pemimpin politik yang telah dipilih melalui mekanisme prosedural. Hak-hak warga negara menjadi domain yang

terformalkan dalam agenda-agenda elit. Cara pandang seperti ini pada akhirnya mengabaikan dimensi aktif warga negara dalam mempengaruhi setiap kebijakan publik.

Memperkuat tesis di atas, tulisan Michael Bakunin tentang *the illusion of universal suffrage* merupakan uraian kritis yang penting untuk dirujuk. Dia mengkritik bahwa sistem representasi yang dibangun di atas mekanisme pemilihan hanyalah fiksi ketika menegaskan bahwa hubungan antara warga negara dengan badan perwakilan sebagai *representation of interest*. Yang terjadi bagi dia adalah munculnya lembaga superioritas dan koruptif yang didiami oleh elit-elit yang tidak merepresentasi kehendak warga negara (Bakunin dalam Woodcock, 1977: 108-110).

Kerentanan yang terakhir dalam model ini adalah radikalisasi relasi yang bersifat personal antar warga negara. Kita tidak dapat memungkiri bahwa mekanisme perwakilan dalam demokrasi prosedural telah meneguhkan ritual-ritual personalisasi wilayah publik salah satunya tercermin dalam relasi patronase. Hal ini ditegaskan oleh Aragon dalam tulisannya mengenai *Persaingan Elit di Sulawesi Tengah* (Aragon dalam Nordholt *et al*, 2007: 50-52). Dia menegaskan bahwa Pemilu-pemilu telah mendorong patronase tertentu untuk mengamankan dan melestarikan keuntungan dari jabatan publik.

Dalam kacamata Agonistik saya berpendapat bahwa melalau relasi seperti ini maka wilayah emansipasi akan semakin sulit ditemukan pun sulitnya warga negara membangun relasi ekuivalensi karena model relasi yang sangat bersifat personal. Oleh karena itu, untuk mendislokasi personalisasi relasi kekuasaan maka perlu kiranya kita membangun relasi ekuivalensi<sup>32</sup> yang didasarkan pada kesadaran kontekstual -untuk membuka kanal-kanal politik- dari berbagai identitas warga negara.

---

32 Relasi ekuivalensi akan dijelaskan pada bab IV

Pertanyaan yang paling penting saat ini adalah apakah representasi hanya menjadi wilayah yang memproduksi elit? Ataukah kita memikirkan secara berbeda bagaimana mengkonstruksi penjelasan mengenai representasi yang sifatnya demokratis? Tentu dengan melihat konstruksi liberal yang dijelaskan sebelumnya, representasi hanya menjadi ruang bagi terciptanya elit, namun bukan berarti representasi menjadi suatu yang membahayakan demokrasi dan juga menjebak warga negara dalam gambaran elit semata. Untuk itulah kita perlu membangun penjelasan yang berbeda.

Representasi adalah suatu kondisi *sine qua non* dalam relasi kuasa antara warga negara. Menjelaskan representasi dalam tubuh warga negara Agonistik adalah memahami relasi ekuivalensi yang membentuk *empty signifier*. *Empty signifier* memainkan fungsi representasi karena merupakan bentuk identifikasi dari identitas warga negara yang partikular. Sehingga dia merupakan sesuatu yang mengkonstitusi totalitas dari partikularitas yang terjalin dalam ekuivalensi. Penjelasan demokratisnya, totalitas tersebut mencirikan rujukan identifikasi dan hal itu tidak memungkinkan *empty signifier* otonom dari jalinan ekuivalensi antara warga negara.

Dalam penjelasan yang berbeda, representasi warga negara Agonistik mencirikan dua nalar yang beroperasi secara serempak, yakni homogenitas dan heterogenitas. *Empty Signifier* mencirikan homogenisasi berbagai tuntutan partikular warga negara. Homogenisasi tidak menjelaskan ciri eliminatif terhadap partikularitas karena homogenisasi hanya dapat terbentuk dari relasi ekuivalensi antara partikularitas identitas warga negara. Sehingga representasi yang muncul sifatnya konstitutif bukan sesuatu yang dikotomis antara yang direpresentasi dengan yang merepresentasi (Laclau, 2005: 162-163).

Relasi antara *Empty signifier* yang memainkan fungsi hegemonik dan jalinan ekuivalensi merupakan wilayah konstitutif bagi warga negara. Dalam terang berpikir demikianlah representasi yang demokratis akan hadir sebagai cara berpolitik warga negara.

### **Paradoks warga negara sebagai subyek otonom**

Subyek dalam pengertian liberal adalah subyek yang otonom pada dirinya. Subyek ini dipikirkan dalam suatu ruang yang hanya dapat dijelaskan melalui kemandirian ego yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan membentuk realitasnya. Logika berpikir seperti ini merupakan kekhasan dalam semangat zaman pencerahan yang menempatkan manusia rasional sebagai pusat dari realitas. Kita bisa merujuk pada adagium Descartes, *cogito ergo sum* (saya berpikir maka saya ada). Hal ini mengandaikan individu sebagai subyek rasional memiliki kesadaran dan keberadaan yang otonom.

Subyektivisme ini pun mendapat kritikan tajam dari Gabriel Marcel yang mengartikulasikan partisipasi dalam eksistensi manusia. Bagi dia manusia ada dan hidup dalam kebersamaan dan tidak semata-mata ditentukan oleh subyektivitasnya. Atas dasar itu dia menyari pemikirannya dalam adagium *Esse est co-esse* (ada berarti ada bersama) (Hadi, 1994: 43-49). Kritikan Marcel tentu memberi efek positif bagi keberadaan individu yang tidak terisolasi dalam rasionalitasnya melainkan berada dalam identifikasinya dengan dunia sosial. Hal ini menjadi energi penting bagi rumusan warga negara yang senantiasa menjadi kekuatan politik yang penting hanya dalam proses identifikasinya.

Berbeda dengan kritik Marcel terhadap subyek rasional yang otonom, Mouffe melalui jalinannya dengan gagasan psikoanalisis khususnya Lacan berpendapat bahwa subyek politik tidak semata ditentukan oleh rasionalitasnya karena subyek senantiasa bersifat

konstruktif. Subyek yang jauh dari keotonomiannya dan *self-reflective* seperti subyek *cogito* yang melihat dirinya sebagai ego yang stabil dan kohesif. Subyek senantiasa berada dalam jalinan yang rapuh sehingga dia akan selalu berada dalam proses identifikasi dalam suatu diskursus tertentu (cf Mouffe, 2009:333; Newman, 2005:56-57).

Penjelasan terakhir menjadi salah satu cara kita memaknai identitas kewarganegaraan di mana warga negara tidak dijelaskan sebagai subyek otonom yang menentukan dirinya oleh dirinya melainkan selalu berada pada jalinan yang tidak lengkap atau inkomplit dalam dirinya sehingga menggerakannya dalam proses identifikasi ke dalam berbagai representasi atau komunitas-komunitas politik. Sebagai penegasan akhir kita dapat merujuk pada pernyataan Lacan bahwa *the I only has meaning and sense of its "self" in relation to the signifier that stand in to represent it.* (Saya hanya memiliki makna dan arti pada dirinya dalam relasi dengan penanda yang merepresentasikannya). Dalam kaitannya dengan warga negara kita dapat mengatakan bahwa “warga negara mempunyai makna dan pengertian dari dirinya hanya dalam relasi dengan penanda (identitas kolektif yang dibentuk).”

## **Konsensus Mengeliminasi Hasrat dan Merayakan Rasionalitas**

Salah satu elemen penting dari wacana Kewarganegaraan Liberal adalah elemen rasional. Melalui elemen ini, warga negara dipikirkan sebagai subyek yang semata-mata digerakkan oleh rasionalitasnya. Warga negara yang rasional merupakan warga negara yang digerakkan oleh kepentingan individunya untuk memaksimalkan keuntungan dan menghindari kerugian (Marsh dan Stoker, 1995: 79). Gagasan kewarganegaraan seperti ini terlihat

dalam model demokrasi prosedural dan juga deliberatif. Dalam model prosedural, warga negara dengan dimensi rasionalnya akan senantiasa berkompetisi demi kepentingan pribadinya. Sedangkan dalam model deliberatif, rasionalitas menjadi elemen penting dalam konsensus antara warga negara.

Terlepas dari perbedaan antara Habermas dan Rawls, mereka berada pada satu titik bahwa konsensus yang dibangun adalah konsensus antara individu yang rasional. Walaupun Rawls mengedepankan aspek *reasonable* atau moral namun dalam penjelasan mengenai posisi original Rawls sendiri menunjukkan bias rasional dalam konsensusnya bahkan rasionalitas bagi dia merupakan *power judgement*. Perlu saya jelaskan di sini, posisi original dalam suatu konsensus merupakan suatu posisi yang berjarak dari latar belakang historis dan kultural dan senantiasa berdiri di atas nalar imperatif yang menjadi kondisi heuristik bagi warga negara untuk menentukan prinsip keadilan dalam konsensus. Sekali lagi, anggapan Rawls ini menunjukkan bias rasional dalam momen konsensus.

Bagi saya penjelasan yang sama dikemukakan oleh Habermas dalam konsensus yang didasarkan pada komunikasi rasional. Apa implikasi dari konsensus rasional yang dipikirkan dua pemikir di atas? Konsensus melalui aktus rasional pada dasarnya merepresi peran penting hasrat dalam memobilisasi tuntutan-tuntutan demokratik yang sangat menentukan bagi identifikasi kolektif warga negara. pertanyaan lebih lanjut yang kita ajukan adalah, “Dapatkah kita memiliki hasrat tanpa bersifat destruktif?”

Warga negara demokratik seharusnya diradikalisasi dalam relasi yang mengakui kepelbagaian atau pluralitas. Apa yang sebenarnya membedakan warga negara demokratik adalah dimensi konflik yang melekat antara berbagai antagonisme dan menolak setiap bentuk

harmonisasi dalam model konsensus rasional. Dalam kerangka ini, keragaman antagonistik dalam mendefinisikan konsepsi mengenai *goods* tidak dilihat sebagai sesuatu yang negatif dan seharusnya dieliminasi, tetapi sesuatu yang seharusnya dirayakan. Oleh karena itu ketidaksepakatan adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. dengan demikian warga negara Agonsitik tidak mungkin mengeliminasi sifat relasi yang konfliktual, dislokatif, dan antagonistik.

Sifat dislokatif dan antagonistik menunjukkan betapa identitas warga negara ditentukan oleh persoalan identifikasi. Dalam proses identifikasi inilah mobilisasi hasrat berperan penting. Jadi, subyek warga negara tidak mendapat kepenuhannya dalam rasionalitasnya semata tetapi senantiasa beridentifikasi dalam identitas politik dan itu dimungkinkan oleh adanya hasrat (cf Mouffe, 2000:103; 2005:25).



## BAGIAN EMPAT

### Wacana Kewarganegaraan Agonistik: Mengisi Jejak Kerentanan dalam Liberalisme

*The Political might be seen as the unconscious dimension of politics its self; it is traumatic place that disavowed, repressed, and yet which has potentially destabilizing effects on dominant institutions and discourses through the production of new meanings and symbolization (Newman, 2005: 153)*

(Kepolitikan mungkin dilihat sebagai dimensi bawa sadar dari politik itu sendiri; Kepolitikan merupakan wilayah traumatik yang diingkari dan direpresi tetapi secara potensial memiliki efek destabilisasi terhadap institusi dan diskursus yang dominan melalui produksi makna baru dan simbolisasi.)

Kerentanan wacana Kewarganegaraan Liberal mengantar kita pada suatu titik untuk memikirkan perubahan radikal. Perubahan yang menjadi fragmen baru dari suatu penjelasan mengenai wacana kewarganegaraan. Fragmen baru dipahami sebagai suatu permulaan yang berbeda-*another fragment from the same folio*<sup>33</sup> *contains a different version of beginning*. Setidaknya pernyataan tersebut menemukan makna metaforisnya dalam jejak pergeseran

---

33 Same folio sebagai metafora bagi kewarganegaraan.

kita terhadap penjelasan mengenai wacana kewarganegaraan. Jejak pergeseran merupakan implikasi dari subversi terhadap Liberalisme sebagai wacana dominan. Subversi ini pada akhirnya membuka ruang penjelasan baru terhadap wacana kewarganegaraan yakni wacana Agonistik, sekali lagi inilah momen dislokasinya.

Perbedaan pewacanaan mengantar kita pada suatu perbedaan secara konseptual dan strategis cara mengkerangkai dan menjelaskan kewarganegaraan. Penjejukan dapat dimulai dengan cara kita memaknai identitas politik. Hal ini menjadi penting untuk memahami Kewarganegaraan Agonistik. Oleh karena itu pada subtema yang pertama saya akan menjelaskan identitas dengan menjawab pertanyaan berikut, *identitas kepolitikan seperti apakah yang menjadi garapan dari artikulasi Kewarganegaraan Agonistik?*

Berangkat dari penguraian identitas sebelumnya maka pada subtema yang kedua saya akan menjelaskan warga negara dalam relasi Agonistik dan Antagonistik. Kedua relasi ini menandakan karakter kepolitikan dari relasi antara warga negara. karakter kepolitikan ini membutuhkan suatu dasar yang mbingkai relasi itu sendiri. Hal tersebut dijawab dalam subtema ketiga yakni penjelasan mengenai etika kepolitikan Kewarganegaraan Agonistik.

Karakter aktif dan artikulatif dari wacana Kewarganegaraan Agonistik menjadi keharusan bagi kita untuk menjelaskan artikulasi berbagai posisi warga negara dalam suatu relasi hegemonik. Hal ini menjadi penting dalam suatu ruang demokrasi di mana berbagai identitas harus mengartikulasikan tuntutan-tuntutan demokratisnya. Oleh karena itu pada subtema terakhir saya akan menjelaskan sesuatu yang baru dari penjelasan kewarganegaraan yakni hegemonisasi relasi antara warga negara.

## Identitas sebagai penjelas awal

Perang Dingin menyajikan kepada kita dunia *dwi polar* serta relasi konfliktual antara dua kutub esensial, yaitu Komunisme dan Liberalisme. Sejak keruntuhan Komunisme pada era 1980-an kita memasuki suatu titik puncak normalisasi wacana Liberalisme dan mengikuti kecendrungan itu. Terlampau ambisius, Fukuyama merayakan kemenangan Liberalisme dengan menyuarakan “akhir dari sejarah”, dengan kata lain sejarah kini mencapai titik kesempurnaannya di mana konflik dapat diatasi dalam tatanan liberal (Fukuyama, 1992; Zizek, 2008: 141). Bahasa pseudo-Hegelian tersebut tentunya mengandung ambiguitas pada dirinya karena keniscayaan yang dipikirkan berbenturan dengan sifat kontingensi dari ruang sosial. Kontingensi ini secara gamblang terjelaskan melalui berbagai gejala identitas, mulai dari gerakan seksisme, keagamaan sampai pada gerakan kultural. Dengan demikian kita harus menunda bahkan menyimpan ambisi universalitas Liberalisme.

Berbagai gejala identitas dipikirkan sebagai kemunculan atau kehadiran berbagai identitas yang telah direpresi dalam kisaran perdebatan dua kutub esensial (Laclau *ed*, 1994: 1). Kutub dwipolar yang menjejaki langkah represi kemudian mereduksi berbagai identitas politik ke dalam kategori fundamental, yakni Komunisme dan Liberalisme. Namun suatu kondisi disolusi<sup>34</sup> menjadi nyata dalam meledaknya berbagai konflik yang tidak dapat disederhanakan sebagai konflik antara dua kutub. Dengan kata lain, gejala atau konflik dari berbagai identitas menandakan langkah menjauh dari ikatan-ikatan kategori fundasional: Komunisme dan Liberalisme itu sendiri (Laclau dalam Docherty, 1993: 335-336).

---

34 Dissolusi merupakan konsep Heidegger tentang keterputusan dari kategori-kategori fundasional

Menanggapi kemunculan berbagai ketegangan identitas politik saat ini maka langkah maju yang perlu kita pikirkan adalah suatu respons konstruktif, yakni memikirkan persoalan tersebut dalam kerangka kewarganegaraan khususnya Kewarganegaraan Agonistik. Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah sebagai berikut: *identitas politik seperti apakah yang penting bagi proyek Kewarganegaraan Agonistik?* Pertanyaan ini selain menjadi titik tolak kita untuk memikirkan identitas politik dalam bingkai kewarganegaraan juga merefleksikan betapa kewarganegaraan harus dilihat sebagai master dari identitas politik dalam universum demokrasi (Isin dan Wood, 1999: 12).

Menjawab pertanyaan di atas, kita pertama-tama perlu menjelaskan makna identitas dalam wacana Agonistik. Identitas dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk oleh proses identifikasi dalam sistem yang bersifat terbuka<sup>35</sup>. Identitas tidak dapat lepas dari sifat konstitutif dari berbagai wacana yang menentukan posisi subyeknya dalam arena sosial. Berbagai bentuk identifikasi menggambarkan kepelbagaian identitas sehingga berdampak pada sifat identitas yang tidak pernah terfiksasi. Hal ini disebabkan oleh karakter relasional dari berbagai identitas karena setiap identitas tidak pernah berada dalam ruang tertutup melainkan bersifat eksternal (tidak secara total) dalam internalitasnya yang tidak total. Relasi berbagai identitas menyebabkan identitas selalu rentan dan berada pada jalur yang terus menerus berubah bentuknya karena medan diskursivitas yang diisi oleh berbagai diskursus yang terus-menerus terkonstruksi (Mouffe, 1992a: 28). Apa yang dijelaskan di sini mengenai identitas adalah *pertama*, bahwa identitas itu tidak

---

35 Hal ini mencirikan nalar posmodernisme yang mana meyakini bahwa tidak ada identitas yang final karena identitas senantiasa berada dalam sistem yang terbuka (Hargens, 2006: 42)

pernah bersifat esensial atau bersifat alamiah. *Kedua*, identitas selalu bersifat subversif, artinya setiap usaha fiksasi dari identitas akan berbenturan dengan kehadiran yang kontingen. *Ketiga*, identitas menjadi medan *overdeterminasi*. *Overdeterminasi* diadopsi dari pemikiran Althusser dengan interpretasi demokratis oleh Mouffe. *Overdeterminasi* sendiri merupakan istilah psikoanalisis dan linguistik yang dipakai oleh Althusser yang melampaui makna metaforisnya. Dalam pemikiran Freud, *overdeterminasi* bukanlah proses fusi yang biasa melainkan suatu tipe fusi khusus yang mengandung dimensi simbolik dan pluralitas makna. Sehingga apa yang dikatakan Althusser bahwa ranah sosial itu bersifat overdeterministik berarti ranah sosial tercipta sebagai suatu tatanan simbolik. Ranah simbolik ini menunjukkan ketiadaan arti esensial yang harafiah dari setiap relasi sosial. Masyarakat dan agen sosial tidak punya esensi apapun, dan keteraturan mereka sebagai identitas hanya ada dalam makna fiksasi yang relatif dan rapuh. Atau dengan kata lain identitas dalam medan overdeterminasi merupakan identitas yang tak pernah dibentuk secara final (Laclau, 1985: 97-104).

Memikirkan warga negara sebagai identitas berarti memikirkan soal identifikasi pada dirinya. Warga negara sebagai subyek politik senantiasa mengidentifikasi dirinya dengan berbagai identitas politik. Di sini bermakna bahwa identitas tidak bersifat *pregiven*, tetapi identitas warga negara senantiasa ada karena proses identifikasi. Dalam Kewarganegaraan Agonistik warga negara dipahami bukan sebagai kesatuan subyek melainkan agen yang terbentuk dari artikulasi berbagai posisi subyek dan dikonstruksi dalam diskursus yang spesifik dan selalu rentan dalam keterjalannya dengan posisi-posisi politik tertentu sehingga karakter Kewarganegaraan Agonistik mencirikan *mode of identification* dari kelompok-kelompok politik (Mouffe 1993: 71; 1996).

Untuk menjelaskan dasar dari identifikasi warga negara maka kita perlu merujuk pada gagasan subyek yang dikarakterisasi oleh *lack* (Laclau 1990, 1994; lihat juga Laclau et al, 2000). Istilah Lacanian di sini penting untuk dimasukkan sebagai kategori konseptual untuk menjelaskan warga negara Agonistik. Pemaknaan terhadap *Lack* merujuk pada ketidakmampuan untuk merepresentasikan dirinya sementara identitas merupakan bentuk representasi *per se*. Agensi kewarganegaraan adalah bentuk aktus identifikasi yang terus menerus mencari representasi dalam identitas, misalnya identifikasi ke dalam etnisitas, nasionalitas, ras, gender, dan agama. Namun representasi ini tidak bersifat esensialis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya melainkan tergantung pada formasi hegemonik dan denormalisasi subyek.

Melalui proses identifikasi ini secara tipikal kita memahami warga negara bukan saja dalam pemaknaan status legal melainkan sebagai praktik menjadi subyek warga negara dalam berbagai ruang dan skala (Isin dan Nielsen, 2008). Menjadi subyek warga negara dengan demikian diisi oleh berbagai kontestasi melalui praktik artikulasi dari berbagai identitas (Benhabib, 2004). Artikulasi berbagai identitas menceritakan juga keragaman ritual dan kebiasaan identitas politik untuk mengisi kontestasi pada ranah politik. Oleh karena itu subyek warga negara pun erat kaitannya dengan habitus-habitus yang menubuh dalam keidentitasannya (Bourdieu, 1994). Habitus -sebagai internalisasi atau penubuhan cara berpikir atau bertindak- menjelaskan cara warga negara hadir dalam ranah sosial dan politik dengan kekhasannya- dengan berbagai posisi subyek yang melekat. Melalui hal itu berbagai pertukaran atau kontestasi menjadi hal yang imanen dalam medan sosial.

Penjelasan di atas secara terbuka menguraikan kompleksitas identitas dalam ranah sosial. kompleksitas itu merujuk pada

berbagai kepentingan yang melingkupinya. Berbagai kepentingan ini secara tersurat menjelaskan sifat identifikasi dan relasional dari berbagai identitas politik.

Membahas warga negara sebagai identitas politik berarti melihat warga negara sebagai bagian dari persoalan identitas politik yang dibentuk oleh berbagai diskursus yang melingkupinya serta terkandung makna di dalamnya mengenai hak-hak yang diperjuangkan. Hal terakhir yang saya sebutkan bermakna bahwa identitas sebagai warga negara merupakan identitas yang di dalamnya subyek politik memosisikan dirinya sebagai bagian dari komunitas politik dan subyek-subyek itu memiliki kesadaran akan hak-hak -yang lahir dari proses identifikasi- untuk diperjuangkan (Isin, 2008: 18). Warga negara tidak lagi dibayangkan dalam batasan legal formal melainkan harus dipahami sebagai subyek yang menyadari hak-haknya serta mengartikulasikan berbagai hak yang dikonstruksi dalam diskursus masing-masing dalam kontestasi radikal. Dengan demikian warga negara menjadi subyek yang memiliki berbagai tuntutan dan kepentingan yang teridentifikasi secara politik ke dalam komunitas politik tertentu atau sebagai komunitas politik yang berada dalam wilayah diskursif tertentu.

Penegasan Laclau dan Mouffe berikut bagi saya menjadi tesis kunci untuk menjelaskan identitas politik dan warga negara. Laclau dalam *on Populist Reason* menegaskan bahwa kesatuan dari kelompok (identitas) merupakan artikulasi dari berbagai kepentingan atau tuntutan politik (Laclau, 2005: ix). Sedangkan Mouffe dalam rumusan bahasa yang berbeda menjelaskan bahwa komunitas politik senantiasa berada dalam wilayah diskursif yang mencerminkan berbagai tuntutan atau kepentingan politik dan melaluinya proses identifikasi sebagai identitas beroperasi.

Berbagai tuntutan itu merujuk pada kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*). Namun ide mengenai *common good* tidak dipahami dalam pengertian komunitarian yang mengikat kolektivitas secara tunggal. *Common good* dalam wacana Agonistik dipahami sebagai “*vanishing point*”, suatu titik yang tidak nampak sebagai tujuan akhir atau *telos* melainkan rujukan bagi setiap aktus politik warga negara di mana dengan kepelbagaian identitas politik dalam tubuh warga negara menjelaskan ketidakmungkinan perjuangan itu mencapai kepentingan bersama yang tunggal. *Common good* di sini berperan sebagai “*social imaginary*” yakni kondisi ketidak mungkinan untuk mencapai representasi yang penuh dalam gagasan mengenai kepentingan bersama tetapi melaluinya berbagai tuntutan mungkin diartikulasi sehingga menjadi imaji bersama (Mouffe, 1992: 30; Howarth *etc*, 2000:15).

Apa yang dikatakan oleh Laclau dan Mouffe menjelaskan tiga poin penting dalam memaknani warga negara sebagai identitas politik. *Pertama*, mereka ingin menegaskan bahwa membahas warga negara dalam kaitannya dengan identitas politik berarti harus memahami *mode of articulation* berbagai hak-hak pada subyek yang kita sebut warga negara. *Kedua*, warga negara tidak semata-mata berbicara soal bagaimana subyek mempertahankan kepentingannya melainkan menjelaskan soal bagaimana warga negara membentuk identitas-identitasnya melalui artikulasi atau perjuangan-perjuangan politik serta proses identifikasi di mana relasi kekuasaan beroperasi (Laclau, 1994: 37). *Ketiga*, warga negara bertindak dalam logika komunitas yang sifatnya diskursif sehingga setiap arah tindakannya tidak merujuk pada pemenuhan yang tunggal dari artikulasi keidentitasnya.

Jika model berpikir kita seperti yang sudah dijelaskan di atas maka ketika kita berbicara isu-isu yang terkait dengan warga

negara seperti hak, kesetaraan dan kebebasan maka yang perlu kita pikirkan adalah dimensi konstruktif yang mengkondisikan perjuangan dan kontestasi terhadap isu-isu tersebut. Atau dengan kata lain hak, kesetaraan, dan kebebasan bukanlah properti yang hanya dipikirkan dalam jaminan konstitusional semata tetapi harus dipahami sebagai penanda yang senantiasa mengisi arena perjuangan warga negara sebagai identitas politik<sup>36</sup>.

Gagasan Laclau dan Mouffe dapat sedikit diperjelas dengan menyoal sekilas dan secara acak ilustrasi-ilustrasi berikut. Ilustrasi pertama tentang persoalan Waria Yogyakarta<sup>37</sup> sebagai persoalan identitas sekaligus kewarganegaraan. Proses identifikasi mereka ke dalam komunitas Waria dipahami sebagai cara mereka untuk diakui atau terjelaskannya kesadaran akan *lack* sehingga mereka mengidentifikasikan dirinya ke dalam komunitas Waria. Melalui komunitas itu mereka secara politis bertindak dengan berbagai ritual politik untuk mempertegas identitasnya sebagai warga negara. Apa yang menarik di sini adalah bukan hanya pada persoalan kepentingan apa yang mereka miliki tetapi bagaimana mereka menjadikan kepentingan itu sebagai dasar bagi pembentukan

---

36 Perjuangan perempuan di Chiapas dapat menjadi rujukan kita untuk memaknai hak sebagai elemen penting dari warga negara yang senantiasa ada dan dihadirkan sebagai elemen artikulatif dalam perjuangan warga negara. Melalui Congreso Nacional Indígena (CNI), perempuan mengartikulasikan, otonomi di bidang ekonomi melalui tuntutan pembukaan akses terhadap alat produksi dan lahan, otonomi politik melalui tuntutan recomposisi hak-hak perempuan, otonomi fisik dan otonomi kultural (Harvey dan Halverson dalam Howarth et al, 2000: 162)

37 Jika kita merujuk pada penelitian Titik Widayanti mengenai *Politik Identitas Waria di Yogyakarta*, maka kita dapat mempelajari berbagai aspek relasi kekuasaan yang menandakan hadirnya dimensi kewarganegaraan dari identitas kewarian di Yogyakarta. Namun demikian, kajian ini gagal untuk menjelaskan dimensi yang sangat penting dalam relasi antara warga negara yakni relasi hegemoni (Widayanti, 2008: 2)

identitas dan di dalamnya kekuasaan beroperasi. Kita tidak dapat menegasi bahwa setiap pembentukan identitas mencerminkan bekerjanya kekuasaan. Hal ini dipertegas oleh Dyrberg (1997), melalui analisisnya terhadap kekuasaan dan identitas, dia berpendapat bahwa berlangsungnya pembentukan identitas dalam arena kepolitikan menunjukan beroperasinya kekuasaan. Dalam wilayah identifikasi dan kekuasaan ini Waria menjelma menjadi warga negara karena keberadaan mereka adalah wujud khas dari artikulasi politik melalui relasi kekuasaan.

Sebagai bahan komparasi kita dapat melihat dinamika politik Gay atau seksual-gender di Vancouver. Untuk beberapa warga negara, aktivitas mereka dikaitkan dengan seksualitasnya. Demikian mereka mendeklarasi kediriannya dengan pengakuan “saya adalah gay”. Deklarasi ini menjadi bagian dari artikulasi politik mereka untuk mengidentifikasi diri dengan identitas gender tertentu, berikutnya menjadi kekuatan politik untuk menembus wilayah-wilayah politik atau kebijakan (Ramussen *op cit*, 182). Sebagai artikulasi politik, pernyataan “saya adalah gay” menjadi bagian penting dari fungsi bahasa dalam artikulasi politik. Bahasa tidak sekadar soal gramatikal melainkan bahasa sebagai ujaran performatif. KONSESPI Austin menjadi kontekstual ketika kita mempertegasnya dalam uraian Bourdieu. Bagi Bourdieu ujaran performatif tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu institusi dari penutur. Institusi adalah relasi sosial yang memberi bentuk kekuasaan atau melaluinya posisi subyek terdefinisikan (Rusdiarti, 2003). Berkaitan dengan ini institusi itu dapat kita pahami sebagai identitas yang bertindak sesuai dengan rasionalitas kekuasaannya. Untuk mempertegas hal ini, dalam menguraikan rasionalitas kekuasaan Foucault sendiri menjadikan bahasa sebagai bagian penting dari operasi kekuasaan. Bagi Foucault, bahasa memungkinkan suatu realitas diterima sebagai kebenaran dalam diskursus tertentu (Miller dan Rose *op*

*cit*). Oleh karena itu, gay atau waria sebagai warga negara dapat memainkan fungsi bahasa dalam mengartikulasikan berbagai kepentingannya sehingga mereka diterima sebagai bagian penting dari komunitas politik atau dilihat sebagai identitas politik yang kehadirannya memberi wajah baru bagi tatanan demokrasi.

Pergolakan berbagai identitas politik atau warga negara menandakan antagonisme sosial yang hidup dan terus menerus menentukan relasi politik yang ada. Berbagai identitas politik muncul sebagai antagonisme karena antagonisme menjadi bentuk identifikasi (*mode of identification*) yang mana relasi antara penanda dan petanda muncul dalam proses penamaan atau pendakuan identitas. Melalui relasi antagonisme ini setiap posisi warga negara dalam diskursusnya masing-masing mendefinisikan siapa musuh dari posisi politik yang ada (Cf Panizza, 2005: 3). Tetapi relasi antara warga negara dalam bingkai antagonisme perlu ditarik kepada penjelasan demokratik. Hal tersebut mungkin jika kita mengkerangkainya dalam relasi Agonistik, “*agonistic confrontation is the very condition for democratic existence*” (Mouffe, 2000: 30). Bertolak dari nalar ini maka pada subtema berikut saya akan banyak menjelaskan mengenai relasi warga negara dalam bingkai Antagonistik dan Agonistik.

## **Warga negara dalam relasi Antagonistik dan Agonistik**

Pada bagian tiga kita telah melihat kerentanan wacana Kewarganegaraan Liberal dalam menjelaskan sekaligus memosisikan warga negara dalam demokrasi. Model deliberatif yang menekankan pada konsensus rasional yang telah menegasi dimensi konflik yang sebenarnya tidak terhindarkan dalam setiap moment keputusan, *decision moment*, dalam antagonisme sosial (Mouffe, 2005: 12). Apa yang terjelaskan sebelumnya sekarang diisi oleh suatu usaha

baru untuk menempatkan warga negara bukan sebagai kepunyaan atau pencapaian dalam negara, tetapi sebagai sesuatu yang secara kontinyu diperjuangkan dalam sifatnya yang kontingen. Untuk itu perlu kita membahas warga negara dalam relasi Agonistik dan Antagonistik.

Yang menjadi dasar dari Agonistik politik adalah relasi konfliktual yang tidak mungkin dilynepkan melainkan menjadi titik tolak untuk memikirkan demokrasi. Meradikalisasi warga negara tidak lain dari usaha kita untuk menjadikan relasi konfliktual sebagai sentrum untuk memikirkan demokrasi. Radikalisasi demokrasi bermakna sama dengan meradikalisasi warga negara.

Relasi konfliktual tercermin dari gagasan kepolitikan (*political*), sebagai ontologi berpikir Mouffe dan Laclau. Ontologi dikaitkan dengan proses mendasar terinstitusinya masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, *political* merujuk pada dimensi antagonisme yang mana bersifat konstitutif terhadap relasi dalam masyarakat atau warga negara. Namun selalu ada praktik dan institusionalisasi untuk membangun suatu tatanan dan mengorganisasi koeksistensi masyarakat atau warga yang pada dasarnya selalu dipengaruhi oleh kondisi konfliktual karena tatanan itu selalu direntani oleh dimensi kepolitikan (Mouffe, 2000, 2005). Berkaitan dengan konteks wacana Kewarganegaraan Liberal, kepolitikan, *political*, menjadi ruang traumatik yang direpresi dalam institusionalisasi warga negara melalui mode deliberatif atau Liberalisme. Kepolitikan inilah yang harus dihadirkan saat kita berbicara kewarganegaraan Agonistik (Mouffe, 2000, 2005).

Dimensi antagonisme dalam tubuh sosial berbeda dengan kontradiksi. Kontradiksi berbicara mengenai oposisi dua identitas yang masing-masing lengkap dalam dirinya. Contoh yang dapat dilihat untuk menjelaskan oposisi identitas itu adalah kategori

Marxis mengenai kelas. Antagonisme menjelaskan relasi antar identitas secara berbeda yakni keberadaan liyan menghalangi satu identitas untuk sepenuhnya menjadi dirinya. Relasi muncul bukan dalam totalitas-totalitas yang lengkap namun dari ketidakmungkinan pembentukan totalitas yang lengkap itu (Laclau dan Mouffe, 2008: 189-190). Dalam bahasa Derrida, Antagonisme berkaitan dengan *constitutive outside*. Artinya, setiap konstruksi identitas tidak akan lengkap karena akan selalu ada liyan yang menyebabkan ketidakpenuhan kita dalam mengkonstruksi kekitaan. Konstruksi akan 'kita' selalu ditentukan oleh keberadaan 'mereka.' Hal ini membuat relasi antara antagonisme bersifat kontingen dan konstitutif ( Mouffe *op cit*, 21).

Dengan terang berpikir secara kepolitikan kita menarik perdebatan kewarganegaraan pada posisi relasional dari berbagai identitas yang kita sebut warga negara. Warga negara merefleksikan logika kepolitikan yang berperan konstitutif terhadap perkembangan demokrasi melalui arena *Battlefield*. Arena pertempuran (*battlefield*), oleh Isin dijelaskan sebagai berikut “.....*the battle ground through which groups define their identity, stake their claims, wage their battles, and articulate citizenship rights, obligations, and principles*” (Isin, 2002: 283–284). Jadi, Warga negara dalam dimensi kepolitikannya senantiasa berada dalam arena pertempuran, tempat relasi konfliktual hadir merefleksikan artikulasi berbagai kepentingan warga negara serta di dalamnya proses identifikasi berlangsung terus menerus sesuai dengan posisi subyek yang dipengaruhi oleh berbagai diskursus.

Sekarang kita membedah dua tipe relasi kepolitikan sebagai pijakan kita untuk memikirkan relasi antara warga negara. Relasi itu masing-masing adalah Antagonistik dan Agonistik. Kemunculan relasi Antagonistik dapat dilacak dari cara subyek

mengidentifikasi diri dalam identitas politik. Di sini Mouffe mencoba menggunakan Freud sebagai rujukannya. Analisis Freud mengenai proses identifikasi bekerja pada level pembentukan identitas kolektif dan menjadi dasar bagi kemunculan antagonisme. Mouffe menggunakan konsep identifikasi Freud untuk menjelaskan pembentukan identitas kolektif dan merupakan petunjuk untuk melihat proses kemunculan antagonisme. Dalam *Civilization and Discontent*, dia memproyeksikan bahwa realitas masyarakat kita merupakan realitas yang terus menerus terancam karena meningkatnya agresi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Menurut Freud,

*“Man are not gentle creature who want to be loved, and who at the most can defend themselves if they are attacked; they are in the contrary, creatures among whose instinctual endowment is to be reckoned a power full share of aggressiveness (instinct of life and death).”*

Freud mau menjelaskan bahwa manusia tidak semata-mata sebagai ciptaan yang lemah lembut (*gentle*) untuk dicintai, tetapi juga bertindak dengan agresivitas dalam relasi sosial (Freud 2001: 1). Bagi Freud, evolusi peradaban manusia ditentukan oleh dua basis libidinal yakni *eros*/ cinta dan *death*/ agresivitas. Keduanya bergerak pada dua arah yang bertentangan. Eros atau cinta membentuk kolektivitas identitas dan pada sisi lain manusia hidup dalam manifestasi agresi libidinal. Agresi libidinal inilah yang menciptakan permusuhan atau antagonistik dalam medan sosial.

Yang dijelaskan oleh Freud dapat disederhanakan dalam konstruksi identitas antara “kita dan “mereka”. Menurut Schmitt relasi ‘kita’ dan ‘mereka’ merupakan relasi antara teman dan musuh, *friend/ enemy relation*. Relasi Teman dan Musuh ini bersifat eliminatif pada dirinya. Artinya yang lain bisa dihancurkan demi eksistensi kekitaan (Schmitt, 1976: 70). Menarik ke makna

yang lebih jauh, kita sepakat untuk mengatakan bahwa relasi antagonisme mengandung makna identifikasi di dalam dirinya khususnya berkaitan dengan konstruksi siapa kita dan siapa mereka. Sehingga Panizza menjelaskan bahwa antagonisme merupakan cara identifikasi di dalam mana relasi antara bentuk dan isinya terbentuk melalui proses pendakuan yang membentuk siapa yang lain dari kita (*Op cit* Panizza)

Jika warga negara dipikirkan dalam relasi Antagonistik maka konflik yang terjadi antara warga negara sebagai identitas politik bersifat eliminatif satu sama lain. Padahal “yang lain” atau “mereka” menjadi penting untuk dipikirkan dalam konteks politik pengakuan<sup>38</sup>. Kompleksitas identitas sebagai warga negara tentunya perlu diakui. Oleh karena itu, proyek demokrasi hanya bisa berlangsung ketika kita dapat mentransformasi relasi Antagonistik antar warga negara menjadi relasi Agonistik.

Sebelum kita menjejaki lebih jauh relasi Agonistik, pertamanya kita harus memahami etimologi kata Agonistik. Kata Agonistik berasal dari bahasa Yunani *agon* yang berarti pertandingan/ kontes, diimbuhkan pada suatu kondisi masyarakat pluralis. Dengan demikian konsepsi *agon*<sup>39</sup> menandakan relasi konfliktual antara

---

38 Politik pengakuan merupakan isu penting bagi kewarganegaraan khususnya berkaitan dengan cara kita berada dalam pluralitas universum sosial. Politik pengakuan-“*Politic of recognition*”-menyebar dalam kesadaran akan posisi identitas politik dan laku operasi serta eliminatif dari definisi berbagai antagonisme yang menguasai wacana politik. Politik pengakuan adalah gerak identitas untuk meruntuhkan subordinasi dalam wacana-wacana politik dan kultural tertentu serta perjuangan untuk menempati posisi equality dalam rana sosial. Sehingga *Politic of recognition* merupakan bagian penting dari peruntuhan struktur inequality. Dalam konteks ini “yang lain/lian/others” tidak lagi dibingkai dalam cara pandang *enemy* tetapi justru harus dilihat dan disebut dengan bahasa “dignity” yakni *legitimate dissent* (Gutmann, 1994).

39 Agon yang kemudian kita menyebutnya agonistik merupakan kombi-

berbagai identitas politik dan menjadi dasar bagi penguatan demokrasi. Konsep *agon* sendiri lebih jauh bermakna perjuangan. Dimensi perjuangan ini merujuk pada performativitas berbagai identitas politik yang senantiasa mengartikulasikan tuntutan-tuntutan politiknya dalam relasi yang bersifat konfliktual dan kontingensi (Schap, 2009: 1& 16).

Berangkat dari sifat pluralitas dan konfliktualnya, relasi Agonistik tidak berusaha untuk menghilangkan oposisi antara “kita” dan “mereka”. Politik demokrasi dalam pengertian Agonistik mengkonstruksi “mereka” tidak lagi dalam pengertian musuh, *enemy* yang harus didestruksi melainkan menjadi lawan, *adversary*, oposisi yang berlegitimasi atau *legitimate dissent*. Oleh karena itu antagonisme tidak hilang dari relasi tersebut. Yang berubah adalah cara kita memikirkan musuh. Musuh dipikirkan sebagai musuh yang memiliki legitimasi.

Konsekuensi logis kita memikirkan warga negara dalam relasi Agonistik adalah *pertama*, konflik menjadi arena relasi kekuasaan antara berbagai posisi subyek. *Kedua*, adanya ruang pengakuan bagi keragaman tanpa ada pretensi mengharmonisikannya dalam suatu rasionalitas tunggal, *ketiga*, terbukanya ruang partisipasi dari berbagai kanal atau akses politik dari beragam identitas politik untuk menentukan keputusan politik. Makna yang sama dengan penjelasan berbeda dapat kita uraikan di sini. Partisipasi dan keterbukaan kanal politik menjelaskan dimensi perjuangan dari berbagai elemen yang berbeda. Partisipasi merujuk pada sifat

---

nasi dari berbagai elemen seperti kontestasi, pertandingan, performativitas, kontingensi untuk menentang struktur hegemonik Esensialisme Rasional Metafisika Barat (Schap, 2009). Dalam bahasa yang lain, agonistik sebagai suatu spiritualitas politik mengangkat emansipasi yang didasarkan pada pengakuan akan fakta pluralitas dan perentanan terhadap tatanan baku.

aktif warga negara dan dalam kisaran ini perjuangan menjadi penting untuk mengartikulasikan berbagai tuntutan demokratik. *Keempat*, dalam model Agonistik, ruang bagi mobilisasi berbagai hasrat (*passion*) dari identitas politik penting untuk menguatkan demokrasi (Mouffe, 2000: 104). Hasrat dalam logika deliberatif dieliminasi karena menekankan pada aspek rasional. Sedangkan dalam wacana Kewarganegaraan Agonistik hasrat justru sebagai bagian penting dari perjuangan demokratik. Mobilisasi hasrat berarti perjuangan identitas yang mengandung makna identifikasi atau pendefinisian identitas sebagai warga negara dalam ruang politik yang dipenuhi berbagai kontestasi diskursif. Hasrat dapat berperan dalam pembentukan identitas kolektif atau dalam bahasa Lacan hasrat yang beroperasi dalam *enjoyment*. *Enjoyment* merupakan cara konkret di mana melalui hasrat dan fantasi<sup>40</sup> dalam ruang *sosio politiko*, subyek mengidentifikasi dirinya dan membentuk identitasnya (cf Zizek, 1993: 201).

Namun refleksi lebih lanjut adalah, menyoal pendasaran bagi bekerjanya logika Agonistik antara warga negara. Oleh karena kita penting mengajukan pertanyaan berikut: “*apa yang mendasari relasi Agonistik atau adversarial antara warga negara bersifat konstitutif bagi demokrasi?*” Warga negara perlu dilihat dari posisi subyeknya masing-masing. Posisi subyek yang menjelaskan berbagai diskursus yang melingkupinya menjadi penjelas bagi berbagai medan interpretasi mengenai kehidupan publik. Namun berbagai interpretasi itu didasari oleh prinsip yang oleh Mouffe disebut *ethico political*. Etika kepolitikan itu adalah kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*). Kedua etika kepolitikan ini menjadi dasar

---

40 Fantasi merupakan dimensi yang hadir untuk mempertahankan relasi subyek dengan penanda (identitas yang menjadi representasi subyek) (Stavrakakis, 1999: 46-47)

bagi keberlangsungan relasi Agonistik dalam pluralitas warga negara. Sebelum kita menjelaskan dua elemen dasar ini maka perlu kita menggarit penjelasan mengenai perbedaan mendasar cara memosisikan ide *liberty* dan *equality* dalam wacana Agonistik. Dalam wacana Agonistik, kesetaraan dan kebebasan tidak direduksi semata-mata menjadi hak utama individu dan seolah-olah bersifat imanen sejak lahir, tetapi harus dipahami dalam konteks kontestasi dari berbagai identitas politik demi terciptanya ruang pengakuan dan redistribusi. Pengakuan akan kesetaraan dan kebebasan menjadi pengakuan akan sifat kontestasi dalam relasi Agonistik di mana warga negara oleh etika kepolitikan tersebut memperjuangkan hak-hak atau tuntutan politiknya dalam kebebasan dan posisi yang setara dalam arena yang demokratis.

Dalam penjelasan lain, persamaan dan kebebasan tidak hanya menjadi etika kepolitikan, tetapi juga rujukan dari artikulasi pluralisme dan demokrasi. Kebebasan dan kesetaraan bukan capaian karena geliat kita dalam demokrasi dan pluralisme senantiasa berangkat dari imaji tentang persamaan dan kesetaraan. Melalui relasi Agonistik, artikulasi antara pluralisme dan demokrasi menjadi kondisi bagi perluasan ide mengenai equality dan kebebasan (Mouffe dalam Trend, 1996: 21).

### ***Liberty* dan *equality* sebagai etika-kepolitikan Kewarganegaraan Agonistik**

Prinsip kebebasan dan persamaan menjadi salah satu fundasi untuk menjelaskan kewarganegaraan dalam wacana Agonistik. Prinsip ini menjadi kunci bagi praktik demokrasi dari apa yang kita sebut demos (elemen kunci dalam teori demokrasi). Dalam bahasa Wittgenstein *equality* dan *liberty* berperan sebagai “*grammar of conduct*”, yakni suatu yang menjadi landasan bagi setiap aktus politik.

Merayakan kebebasan adalah suatu usaha untuk membuka ruang bagi artikulasi dan ekspresi politik berbagai warga negara karena pada dasarnya kebebasan harus bersuara lebih keras dari suatu tirani. Melalui prinsip ini warga negara terlibat dalam pemenuhan dirinya sebagai subyek politik yang mempengaruhi ruang publik (Berlin, 1969: 162-166). Satu sisi kebebasan politik menjadi jalan bagi terbukanya ruang artikulasi politik yang memiliki konsekuensi logis bagi terbukanya posisi-posisi egalitarian antara berbagai subyek politik. Dari sanalah makna kesetaraan hadir sebagai penjelas.

Suatu yang ditegaskan dalam tulisan ini adalah penjelasan mengenai relasi konfliktual. Dalam wacana Kewarganegaraan Agonistik, relasi konfliktual yang dibangun pada dirinya menarik batas inklusi dan eksklusi dari relasi antar warga negara. batas-batas itu pun harus berdasar pada etika kepolitikan yakni *kebebasan dan persamaan*. Prinsip dasar ini diadopsi dari penjelasan Oakeshott mengenai *respublika*.

Simpul yang bisa dijalin antara ide *respublika* dengan fondasi Agonistik adalah penjelasan mengenai konsep *societas*, gagasan ini merujuk pada partisipan yang dihubungkan oleh kondisi otoritas yang spesifik dari setiap identitas untuk mendefinisikan apa yang menjadi urusan publik mereka. Gagasan ini mengandung makna partikular. Hal ini berbeda dengan gagasan *universitas* yang merujuk pada keterikatan warga negara dalam tujuan bersama seperti dalam ide komunitarian (Mouffe, 1993: 67).

Melalui gagasan *Societas*, Oakeshott menguraikan konsep *respublika* di mana titik tekannya ada pada basis moral dari suatu aturan permainan. Bagi dia artikulasi dari suatu urusan bersama yang mana pencapaian dari setiap tujuan, promosi dari seluruh kepentingan, kepuasan dari seluruh keinginan akan dirumuskan melalui aturan-aturan yang yang disesuaikan dengan berbagai

kepentingan sehingga tidak adanya sifat doktrinal dari suatu tujuan bersama (*ibid*, 68).

Memaknai ide Oakeshott di atas, respublika pada dasarnya menawarkan suatu pertimbangan moral untuk menentukan tindakan dari setiap identitas politik. Dengan demikian, pertimbangan ini dalam wacana Agonistik adalah loyalitas terhadap prinsip kebebasan dan persamaan (Mouffe, 1992b: 1). Hal ini berdampak pada tidak adanya pemaksaan atau doktrinasi dalam menentukan rumusan bersama mengenai tujuan politik tertentu antara warga negara<sup>41</sup>. Prinsip kebebasan dan persamaan pun menjadi dasar bagi perangkat aturan dan praktik yang menguraiakan aturan main tertentu dalam tubuh kewarganegaraan. Dalam konteks pembahasan kita, hal ini bermakna bahwa warga negara dengan kesadarannya akan etika kepolitikan bertindak dan terlibat dalam berbagai komunitas politik atau posisi diskursif tertentu untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya khususnya berkaitan dengan isu-isu redistribusi dan politik pengakuan. Oleh karena itu konflik yang didasarkan pada etika kepolitikan dalam wacana Kewarganegaraan Agonistik dipahami dalam konteks dengan perjuangan-perjuangan redistribusi dan politik pengakuan.

Semangat egalitarian yang tercermin dalam etika kepolitikan menjadi alasan bagi setiap aktus politik untuk menentang keberadaan rejim subordinatif dewasa ini. Kita dapat merujuk pada penjelasan Mouffe yang mengatakan bahwa:

---

41 Etika kepolitikan yang meniadakan watak doktrinasi menjelaskan betapa etika kepolitikan menjadi *the real* dalam wacana kewarganegaraan Agonistik. Mengapa? *The Real* merupakan *ethics of dis-harmony* yang menjelaskan kondisi kepelbagaian di mana setiap identitas mendefinisikan “tuntutan-tuntutan” politiknya (cf Mouffe, 2000: 139). Saya meyakini perjuangan-perjuangan emansipasi muncul dalam konteks tersebut.

*“Radical democratic interpretation of the political principles emphasizes the numerous social relations where subordination exists and must be challenged if the principles of equality and liberty are to apply.”* (Mouffe dalam Trend op cit, 24).

“Interpretasi demokrasi radikal terhadap prinsip kepolitikan menekankan penentangan terhadap relasi subordinasi jika ingin menerapkan prinsip kesetaraan dan kebebasan.”

Dengan kata lain, Kewarganegaraan Agonistik, melalui etika kepolitikan, sedang mengadvokasi perjuangan melawan sifat eliminatif dan penunggalan yang biasanya diterjemahkan sebagai rezim yang menyubordinasi keberadaan identitas-identitas politik tertentu melalui lakon eliminatif.

Penegasan *equality* pada identitas-identitas politik menjadi penanda yang berbeda dengan konsespi Liberal yang mereduksi *equality* hanya pada persoalan hak individu. Wacana Agonistik menjadi penjelas yang berciri postindividualistik yang mana *equality* tidak direduksi hanya pada hak yang menjadi milik personal melainkan menempatkan *equality* sebagai dasar bagi solidaritas antara kelompok-kelompok (warga negara) yang diopresi<sup>42</sup> (Mouffe, 1988: 103).

## **Hegemoni dan Kewarganegaraan**

Warga negara dalam wacana Agonistik dilihat sebagai warga yang aktif yang senantiasa berada dalam medan perjuangan untuk mengartikulasikan berbagai tuntutan demokratik dan mendasarinya dengan kerangka relasi konfliktual. Perjuangan ini senantiasa bermakna jika berbagai perjuangan dalam tubuh identitas warga

---

42 Kondisi opresi menjadi suatu momen yang merangsang suatu gerakan hegemonek dari aktus politik warga negara

negara yang plural dijelaskan dalam kerangka perjuangan hegemoni. Laclau dan Mouffe berpendapat bahwa hubungan artikulatif antar identitas politik harus terjadi sehingga memungkinkan terjadinya relasi hegemonik (Laclau dan Mouffe 1985: hal x). Dalam kaitan dengan ini, konsep hegemonik tentunya menjelaskan relasi kuasa dalam tubuh warga negara di mana dalam pluralitas dan situasi konfliktual terjadi momen *decision* yang membentuk kekuatan bersama -hegemoni- demi mencapai pengakuan dan terbukanya akses-akses terhadap sumber daya (redistribusi) (cf Mouffe, 2000: 130; 2005:12). Pada momen itulah makna radikalisme demokrasi muncul dalam wacana Agonistik. Dalam wacana Agonistik, radikalisme berarti usaha transformasi terhadap relasi kekuasaan yang ada dan membangun hegemoni baru (*ibid*, hal. 52 & 53).

Membahas dimensi hegemoni dalam korpus kewarganegaraan merupakan usaha baru dan menantang. Hegemoni di sini tidak hanya dipahami sebagai teori politik melainkan sebagai strategi untuk mengkerangkai artikulasi warga negara dalam medan sosio-politiko. Kita terbiasa untuk membahas hegemoni dalam domain Marxisme khususnya melalui penjelasan Gramsci tanpa menariknya untuk menjadi penjelas bagi geliat politik kewarganegaraan. Hal itu mungkin menjadi gejala normal saat normalisasi Liberalisme menguasai ide mengenai warga negara yakni reduksinya terhadap individualisme dan privilese sebagai “penerima pasif” karena berkah yang diberikan oleh negara (cf Mouffe, 1992a). Pada titik itu hegemoni luput menjadi penjelas bagi kewarganegaraan.

Hegemoni menjadi salah satu inti penting untuk membahas diskursus Kewarganegaraan Agonistik. Hegemoni menjadi struktur pusat analisis politik. Dalam setiap bentuk hubungan politik selalu ada kemungkinan untuk menciptakan hegemoni sehingga setiap bentuk relasi sosial selalu menghadirkan hegemoni (Laclau

dan Mouffe dalam Hargens, 2006: 61). Jika demikian kita bisa menyimpulkan di awal bahwa relasi Agonistik memiliki penjas khusus bagi relasi hegemonik antara warga negara.

Seperti yang telah disentil sebelumnya bahwa hegemoni kadang menjadi privilese dari tradisi marxisme dan di sisi lain kita coba menariknya sebagai penjas bagi relasi Agonistik. Oleh karena itu, menjadi wajar jika kita memulai pembahasan ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan, “apakah hegemoni yang akan menjadi penjas bagi gerakan warga negara Agonistik membuka retakan baru yang teramat dalam dengan tradisi Marxisme?” secara cepat, pertanyaan ini dapat dijawab dengan jawaban negasi yakni tidak. Rujukan terhadap marxisme merupakan langkah yang perlu dilakukan walaupun kita sampai pada pergeseran tertentu. Pergeseran itu memunculkan suatu penanda baru dalam menjelaskan hegemoni yakni post-marxisme. Untuk menjelaskan terminologi ini maka kita harus berangkat dari penjelasan Heidegger mengenai *destruction*.

Penggunaan terminologi *destruction* dalam pemaknaan Heidegger tidak berarti pengambilan jarak yang tegas dengan tradisi. Bagi dia, *destruction* tidak menandakan operasi negatif atau penegasian yang murni atau penolakan total terhadap tradisi tetapi menjadi sebuah langkah radikal untuk melampaui tradisi dengan meninggalkan kemungkinan untuk tetap menjalin beberapa simpul penjas dengan tradisi yang ada. Dalam pengertian seperti ini, istilah Postmarxisme sebagai *moment of destruction* terhadap Marxisme bermakna melampaui fakta ontologis mengenai kelas modal, materialisme historis, dll (Laclau, 1987: 331).

Penjelasan mengenai *destruction* menjadi logika bagi kita untuk menjejaki konsepsi hegemoni dari tradisi marxisme sampai

Postmarxisme<sup>43</sup>. Sehingga mengawali subbab ini saya akan secara cepat menguraikan geneologi<sup>44</sup> konsep hegemoni.

Mengurai hegemoni dapat dimulai dari konsepsi Rosa Luxemburg khususnya mengenai arti penting pemogokan massal sebagai alat politik. Tema ini menjadi gambaran bagi pencapaian cita-cita sosialis yakni kesatuan kelas dan revolusi di Eropa. Bagi Rosa Luxemburg pemogokan massal menandakan *spontanisme*<sup>45</sup> dari suatu aktus politik di mana tidak ada gerakan dengan tuntutan parsial yang terus menerus megurung diri dalam batas-batas perjuangannya sendiri: secara tak terelakan pemogokan massal menjadi simbol bagi dari resistensi yang memiliki efek meluas dalam bentuk-bentuk yang tidak dapat diramalkan sebelumnya.

Suatu yang penting di sini adalah pengakuan Rosa Luxemburg akan fragmenasi sosial dan relasi *overdeterminasi*. Bahwa fakta sosial merupakan polifoni dari berbagai identitas sehingga dimetaforkan sebagai kesatuan simbolik. Artinya melimpahnya penanda oleh petanda. Dengan demikian Luxemburg melihat kesatuan kelas sebagai kesatuan simbolik di mana kesatuan itu tidak mencirikan kelas sebagai identitas tunggal. Di sinilah logika hegemoni muncul dalam penjelasan Luxemburg karena pengakuan dan penegasannya pada pengalaman fragmentasi dan ketidakkakuan artikulasi-

---

43 Hegemoni yang menjadi kerangka dasar penjelasan bagi strategi artikulasi warga negara adalah hegemoni dalam pemaknaan postmarxisme.

44 Geneologi di sini bukanlah suatu usaha pelacakan sejarah di mana suatu konsep sejak awal memiliki kandungan isi yang lengkap. Meminjam istilah foucault, yang dimaksud geneologi di sini adalah membangun arkeologi dari sebuah kebiasaan. Oleh karena itu melacak geneologi konsep hegemoni berarti menjejaki setiap kekosongan yang dijelaskan dari berbagai alur berpikir mengenai konsep tersebut (cf Laclau, 2001: 7)

45 Gagasan Spontanisme Luxemburg merefleksikan bentuk khas perjuangan dominan revolusi Rusia yang menjadi penting untuk melihat masa depan perjuangan buruh di Jerman (Laclau *terj*, 2008: 3)

artikulasi di antara perjuangan dan posisi-posisi perjuangan yang berbeda-beda (Laclau, 2001: 13).

Namun kita akan menemukan ambiguitas dari logika Rosa Luxemburg karena penegasannya pada keniscayaan historis yakni keyakinan akan peran kapitalisme dalam menentukan sejarah proletarianisme. Penegasan ini menandakan tidak lepasnya diskursus Luxemburg dari kategori ekonomistik dalam struktur sosial (*ibid*). Luxemburg masih melihat determinasi keniscayaan historis bagi kesatuan kelas.

Namun demikian titik tekan pada metafora kesatuan simbolik menjadi langkah maju jika dibandingkan dengan pemikiran dalam internasional II seperti Lenin. Dalam diskursus Leninis, hegemoni melibatkan kepemimpinan politik dalam aliansi kelas. Hegemoni yang tercermin dari gagasannya mengenai aliansi kelas yang masih menunjukkan sentrum gerakan pada kaum proletar. Proletarianisme menjadi identitas rujukan dari berbagai elemen di luarnya. Artinya, berbagai identitas politik yang ada berada di bawah satu naungan kelas proletar membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama. Proletarianisme memiliki isi spesifik dalam dirinya sebagai identitas politik. Isi lengkap ini hadir dalam relasi kontradiksi<sup>46</sup> dirinya dengan borjuis serta kepentingan historis yang secara niscaya terdefiniskan. Hal ini menjadi gerak cerdas untuk menyelubungi yang sesungguhnya (*artifice of concealment*) atau bentuk niscaya dari suatu esensi (Laclau, 2008).

Namun gagasan hegemoni dalam tubuh Marxisme sedikit mendapat pencerahan melalui gagasan Gramsci. Gramsci memperluas wilayah rekonstruksi politik dan hegemoni serta

---

46 Relasi kontradiksi kita pahami sebagai relasi di mana antara identitas mendapat kepenuhan maknanya atau dengan kata lain A itu sepenuhnya A sehingga menjadi bukan A (Laclau *terj*, 2008: 187)

bergerak melampaui kategori aliansi kelas Lenin. Kategori yang ditawarkan adalah blok historis. Blok historis merujuk pada posisi-posisi subyek tertentu yang melintasi sektor kelas dan pada akhirnya membentuk suatu sintesis yang lebih tinggi, suatu kehendak kolektif dan melalui ideologi hal ini menjadi pengikat organik. Kategori blok historis merupakan kategori moral dan intelektual yang menentukan ikatan organik dari suatu praktik hegemoni. Yang baru di sini adalah kehadiran ideologi sebagai perwujudan konkret dari sistem relasional dan keseluruhan yang organik serta mewujudkan dalam institusi-institusi dan aparatus-aparatus yang mempersatukan suatu blok historis di seputar artikulasi dasar.

Pergeseran dalam pemikiran Gramsci mengantar kita pada titik krusial lain tentang lepasnya kategori keniscayaan. Bagi dia, subyek-subyek politik bukanlah kelas-kelas namun adalah kehendak kolektif yang kompleks. Selain itu elemen-elemen ideologis yang diartikulasikan oleh suatu kelas hegemonik tidak secara niscaya menjadi milik kelas tertentu (*ibid*: 98). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kehendak kolektif merupakan suatu hasil dari artikulasi politiko-ideologis dari kekuatan-kekuatan historis yang terpecah-pecah dan terfragmentasi. Poin ini menjadi penting karena menjadi landasan bagi strategi hegemonik dari kekuatan warga negara dalam posisi-posisi subyek yang plural.

Gramsci memang telah menenun dimensi demokratik dari suatu praktik hegemoni namun ketidakkonsistennya muncul saat dia masih meyakini kelas buruh sebagai inti artikulatoris dari suatu blok historis (Laclau, 2001: 76). Namun kita tinggalkan ambiguitas Gramsci dan kembali pada spirit demokratik dari pemikiran hegemonik yang telah diuraikan Gramsci.

Hegemoni memiliki dua karakter utama, yakni otoritarian dan demokratik. Karakter otoritarian muncul dalam kondisi seperti pendefinisian secara apriori terhadap identitas kelas dan

meyakini gerak sejarah secara saintifik. Perwujudannya ada dalam model aliansi kelas Lenin di mana watak determinasi kelas buruh dalam gerak sejarah menuju Sosialisme menjadi penjas utama bagi hegemoni. Dimensi eskatologis tersebut, sebagai bahasa keselamatan, memosisikan kelas buruh sebagai agen yang diasumsi membawa perubahan bagi sejarah. Asumsi dasar inilah yang melahirkan watak otoritarian dalam konsep hegemoni Marxisme.

Tentu kita harus melepas kategori otoritarian di atas dan saatnya kita merayakan watak demokratik dari konsepsi hegemonik. Watak demokratik ditandai oleh *pertama*, runtuhnya batas tegas pendefinisian identitas sehingga sifat kontigensi menjadi cara berada dari identitas politik. Seperti yang dikemukakan oleh Mouffe, dua penjas sentral dari hegemoni adalah kontingensi dan karakter konstitutif (Mouffe, 2005: 17). Sifat kontingensi memungkinkan relasi antara berbagai identitas tidak ditentukan secara apriori sehingga dapat melangkah melampaui partikularitas yang dimiliki. Dalam kondisi seperti itu artikulasi politik dari berbagai identitas dapat menjadi suatu polar hegemonik tertentu. Oleh karena itu, sifat hegemonik selalu konstitutif bagi suatu gerakan politik.

*Kedua*, dimensi konstitutif<sup>47</sup> dipahami dalam logika terbentuknya identitas baru dari suatu praktik hegemonik. Relasi

---

47 Dimensi konstitutif juga penting untuk memahami *the Real* dalam tubuh sosial. *The Real* merupakan kondisi di mana kepelbagaian berada dalam situasi konfliktual yang tidak dapat direkonsiliasi melalui kalkulasi rasional semata. Menyadari hal itu, hadirnya *the Real* dalam tubuh sosial menggugah kita untuk memikirkan bagaimana sebenarnya membangun jalinan di atas fakta konfliktual tersebut? Mouffe di sini menjadikan elemen konstitutif sebagai penjas. Bagi dia *the Real* yang mawujud dalam antagonisme pada dasarnya bersifat konstitutif dari yang sosial (Mouffe, 2000: 139). Karena sifatnya yang konstitutif maka berbagai antagonisme pun dapat dikonversi menjadi kekuatan demokratik melalui relasi hegemoni. Hegemoni yang mengandung makna konstitutif memungkinkan kondisi keragaman warga negara terjalin dalam situasi kontekstual tertentu yang mendorong warga negara untuk mengartikulasikan tuntutan-tuntutan demokratiknya.

hegemonik dalam artian demokratik melepas segala bentuk isi identitas yang terbentuk karena suatu keniscayaan esensial. Di sini kita bergeser lebih jauh karena dalam jalur kontingensi praktek hegemoni membuka ruang bagi terbentuknya kultur baru yang terbentuk dari relasi konstitutif antara berbagai identitas. Laclau mengemukakan bahwa,

*Hegemony is not a type of articulation limited to the field of politics in its narrow sense but it involves the construction of a new culture – and that affects the levels where human beings shape their identity and their relations with the world (Laclau, 1990: 189).*

(Hegemoni bukanlah tipe artikulasi yang terbatas pada arena politik dalam maknanya yang sempit tetapi juga meliputi konstruksi budaya yang baru dan mempengaruhi manusia pada tataran pembentukan identitas serta relasinya dengan lingkungan atau dunia).

Pembentukan identitas baru selain dibaca sebagai sifat konstitutif dari suatu relasi juga dapat dilihat sebagai ciri dislokatif suatu praktik hegemonik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berbicara soal dislokasi berarti berbicara soal fundasi di mana perubahan politik dimungkinkan dan identitas-identitas baru terbentuk. Warga negara mengisi penjelasan ini ketika berbagai posisi subyek dalam sifat kontingensinya mengartikulasikan berbagai tuntutan politik demokratik dalam konteks perjuangan tertentu.

Namun, bagaimana perjuangan atau artikulasi dari berbagai identitas kewarganegaraan dibingkai dalam suatu strategi hegemoni?

Penjelas utama bagi warga negara dalam wacana Agonistik adalah karakter aktif yakni dimensi perjuangan dalam medan sosio-politiko. Dimensi perjuangan ini tidak serta merta berbicara soal artikulasi kepentingan melainkan artikulasi yang terbingkai

dalam suatu praktik hegemoni. Menyoal hegemoni sebagai bagian penting dari perjuangan warga negara berarti memperhatikan strategi hegemonik yang mesti dipraktikkan dalam artikulasi warga negara sebagai subyek politik. Oleh karena itu aspek-aspek berikut menjadi kunci bagi strategi hegemoni warga negara.

1. Berbicara hegemoni dalam artikulasi warga negara berarti memainkan suatu **strategi diskursif**<sup>48</sup> tertentu (cf Laclau dan Mouffe *terj*, 2008: 90) ; strategi diskursif menjelaskan berbagai artikulasi dari berbagai elemen untuk mendefinisikan suatu posisi politik baru. Seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal bab ini bahwa memahami warga negara dalam wacana Agonistik adalah memahami mereka sebagai identitas politik yang berdiri dalam tataran diskursif yang plural. Identitas-identitas ini berada dalam medan perjuangan karena mereka senantiasa mengartikulasikan berbagai tuntutan politiknya. Di mana penegasan logis antara karakter hegemonik dengan warga negara? ketika kita berbicara soal warga negara

---

48 Jika kita membuat ilustrasi kekitaan sebagai warga negara Indonesia berkaitan dengan konsep ini maka kita dapat berangkat dari realitas ketertindasan kita dalam berbagai kebijakan diskriminatif seperti yang dialami oleh warga negara di Aceh, Papua, Riau, dan di berbagai daerah di negeri ini. Kesadaran akan ketertindasan itu dapat dipastikan menjadi kesadaran sebagaimana besar warga negara yang memiliki posisi politik masing-masing. Hal itu secara cepat dapat kita lihat dari gerakan separatis yang sebenarnya menggambarkan kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Pada kenyataannya gerakan itu luput dari penjelasan hegemonik karena memang kita sulit menemukan strategi diskursif yang dioperasikan. Jika kita mengadopsi gagasan ini maka yang seharusnya dilakukan adalah membangun jalinan artikulasi antara berbagai elemen (baca: warga negara) dari Aceh, Riau, Papua, dll kemudian memainkan suatu strategi diskursif, misalnya Populisme. Istilah Populisme di sini dipakai sebagai penjelas bagi kepentingan warga negara yang tertindas. Populisme pun menjadi poin rujukan dari berbagai elemen sekaligus tapal batas (frontier) dengan rejim yang berkuasa.

dalam dimensi Agonistik maka suatu keharusan adalah menyoal artikulasi karena artikulasi menjadi praktik yang memungkinkan bangunan relasi antara berbagai elemen (identitas warga negara). Bangunan relasi antara berbagai elemen terstruktur merupakan makna dari diskursus. Jadi hegemoni ada dalam suatu strategi diskursif dan diskursus lahir dari praktik artikulasi, praktik artikulasi merupakan elemen kunci dari warga negara. inilah logika yang bisa kita tenun berkaitan dengan hegemoni dan kewarganegaraan. Makna lain dari strategi diskursif adalah pluralitas yang diakomodasi karena diskursus tidak hadir dalam suatu ketunggalan elemen. Dengan demikian suatu praktik hegemonik berbicara soal pluralitas yang distrukturkan dalam diskursus. Oleh karena itu, aktus hegemonik warga negara bermakna jalinan relasi antara berbagai posisi subyek (baca: plural) yang memamainkan diskursus tertentu untuk membangun suatu tatanan politik.

2. Hegemoni terjalin dalam suatu **relasi equivalensi**<sup>49</sup> antara warga negara. Relasi equivalensi dibangun melalui

---

49 Kita bisa mengilustrasikan point ini dengan satu tema khusus yakni relasi ter-subordinasinya kelompok-kelompok minoritas seperti Waria, Lesbi, dan gay. Kelompok-kelompok ini tentunya memiliki partikularitasnya masing-masing sebagai identitas politik. Tetapi ada suatu kondisi kultural, politik dan sosial yang mengkondisikan mereka dalam suatu situasi kontekstual yang sama yakni eksklusi dalam rana sosial, budaya dan politik. Situasi kontekstual ini seharusnya menjadi stimulus atau pendorong bagi mereka untuk “mengosongkan” kepentingan-kepentingan partikularnya yang berbeda-beda satu sama lain dan merumuskan suatu kepentingan bersama antara berbagai elemen yang tertindas atau dengan kata lain kondisi yang memungkinkan waria, lesbian, gay menjalin relasi kesamaan atau *chain of equivalensi*. Kepentingan itu misalnya “pengakuan dan redistribusi. kepentingan akan pengakuan dan redistribusi (akses terhadap berbagai sumber daya) menjadi penanda utama yang dihasilkan dari usaha mengosongkan penanda partikular dari setiap elemen (waria, lesbian, gay) sehingga dua hal ini menjadi *empty signifier*.

relasi identitas yang melampaui partikularitasnya. Relasi “melampui” ini kemudian dikondisikan oleh posisi kontekstual tertentu sehingga memungkinkan berbagai identitas warga negara menjalin relasi ekuivalensi. Situasi kontekstual yang mengkondisikan relasi ekuivalensi dapat berupa keadaan politik tertentu, misalnya situasi opresif<sup>50</sup> atau penindasan. Situasi inilah yang mendorong berbagai identitas kewarganegaraan menjalin relasi ekuivalensi atau kesamaan untuk menentang rezim opresif yang ada (*ibid*, hal. 91). Berbagai tuntutan-tuntutan dari setiap warga negara dalam jalinan ekuivalensi direpresentasi dalam satu kepentingan bersama yang menjadi penanda dari sejumlah tuntutan yang ada. Artinya, partikularitas tuntutan dari identitas-identitas warga negara dikosongkan makna partikularnya sehingga menjadi *empty signifier*. Seperti yang dijelaskan oleh Laclau bahwa “*a signifier is emptied when it is disengaged from a particular signified and comes to symbolize a long chain of equivalent signifieds*” (suatu penanda menjadi kosong ketika penanda itu berubah dari petanda partikular lalu menjadi simbol dari rantai petanda-petanda yang ekuivalen) (Laclau, 1989: 81). Dalam konteks ini *empty signifier* muncul untuk memainkan fungsi universal karena jalinan-jalinan partikularitas berbagai identitas warga negara mengosongkan makna partikularnya dan membentuk penanda umum dalam kaitannya untuk menentang tatanan opresif. Oleh karena

---

50 Relasi penindasan atau opresif dibedakan dengan relasi subordinasi. Jika subordinasi menandakan penundukan satu pihak terhadap keputusan pihak lain maka relasi opresif berbicara soal relasi subordinasi yang melahirkan antagonisme. Munculnya antagonisme ini tidak hanya ada karena praktik represif dalam relasi kekuasaan namun juga dikondisikan oleh eksterior diskursif yang berperan untuk menggugah kesadaran akan posisi diopresi. Eksterior diskursif ini misalnya demokrasi (Mouffe dan Laclau, 2001: 153-154)

itu *empty signifier* merupakan kondisi yang memungkinkan bagi relasi hegemoni warga negara (*empty signifiers is the very condition of hegemony*) (Laclau, 1996: 43).

3. Hegemoni bertujuan untuk menstabilisasi *nodal point*. Artinya, stabilisasi *nodal point* yang membentuk dasar tatanan konkret dengan mengartikulasi berbagai elemen yang ada-*floating signifier*<sup>51</sup>. Bagaimana elemen yang berbeda ini menjadi *nodal point* atau elemen yang terstruktur? Elemen-elemen mengambang ini haruslah membentuk *empty signifier* karena *nodal point* merupakan *empty signifier* yang dapat menciptakan makna tetap terhadap berbagai penanda mengambang dengan mengartikulasikan mereka dalam sebuah rangkaian kesamaan atau *chain of equivalence*. Jika berbagai identitas warga negara ingin membangun suatu tatanan hegemonik maka setiap identitas yang berbeda harus terjalin dalam rangkaian kesamaan dan membentuk point rujukan (*nodal point*) dari gerakan mereka. Point rujukan ini tentunya disesuaikan oleh fakta politis yang dihadapi bersama oleh berbagai elemen warga negara.
4. Relasi hegemoni menggaris area **tapal batas politik** (*political frontier*) karena adanya polarisasi baru. Polarisasi ini didasari oleh relasi ekuivalensi karena membangun relasi ekuivalensi berarti menciptakan tapal batas dan mendefensikan siapa yang menjadi lawan (*adversary*). Laclau dan Mouffe menegaskan hal ini sebagai berikut:

*“if one is to build a chain of equivalences among democratic struggles, one needs to establish a frontier and define an adversary,*

---

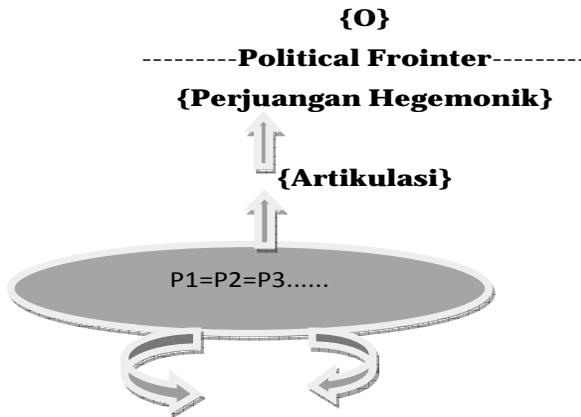
51 *Floating signifier* atau penanda mengambang merupakan elemen-elemen ambigu yang disebabkan oleh pluralitas pemaknaan dalam rana diskursif. Kita menyebut berbagai identitas warga negara sebagai *floating signifiers* karena posisi subyek yang plural dan merayakan makna yang berbeda dalam posisi diskursifnya.

*but this is not enough. One also needs to know for what one is fighting, what kind of society one wants to establish* ( Laclau dan Mouffe, 2001: xix).

Dari penjelasan di atas sesungguhnya bukan saja tapal batas yang harus dipikirkan melainkan juga tujuan dari gerakan hegemoni. Tujuan itu dalam konteks demokrasi biasanya merupakan usaha transformasi terhadap tatanan yang opresif. Tapal batas selain dijelaskan oleh relasi ekuivalensi juga merupakan fakta dari relasi hegemonik yang terbentuk oleh antagonisme. Antagonisme memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan hegemoni, karena penciptaan suatu antagonisme sosial meliputi penciptaan musuh yang akan menjadi sesuatu yang penting bagi terbentuknya *political frontier* yang dikotomik (Hutagalung dalam Laclau dan Mouffe *terj*, 2008: xxxix-xl). Jalinan relasi antara posisi diskursif tertentu dari warga negara yang megartikulasikan tuntutan demokratiknya pada saat yang sama menciptakan tapal batas dengan rejim yang sedang dilawan. Di sinilah proses identifikasi berlangsung secara internal dan eksternal artinya pada moment yang sama ada identitas kolektif yang terbentuk (internal) dari beragam identitas bersamaan dengan pengidentifikasian terhadap “yang lain” (eksternal) dari yang sudah terbentuk. Relasi ini tidak memungkinkan pembentukan identitas yang final karena antagonisme berada dalam ruang logika kontestasi yang terus menerus bergeser. Relasi hegemonik dari suatu rangkaian jalinan kesamaan antara warga negara bagi saya dapat pula dijelaskan dalam logika Agonistik. Refleksi kita berangkat dari kesadaran akan adanya relasi konfliktual antara berbagai antagonisme yang muncul. Antagonisme ini menunjukkan pluralitas dari berbagai

kepentingan politik warga negara. Dalam pluralitas itu selalu ada kondisi khusus yang mengantar berbagai identitas warga negara menjalin relasi di antara mereka. Kondisi itu sebelumnya kita sebut *chain of equivalence*. Namun bagi saya rantai kesamaan ini tidak meluluh didasarkan pada situasi kontekstual tertentu melainkan dapat terbentuk karena adanya kesadaran akan identitas yang terbentuk dalam logika *adversarial*. Yang menjadi “yang lain” dalam relasi antara satu identitas dengan identitas antara warga negara dipandang sebagai *legitimate dissent*. Posisi inilah bagi saya yang memungkinkan relasi berbeda itu bisa disolidkan dalam suatu kerangka hegemonik karena adanya apresiasi terhadap “yang lain” dari suatu fakta plural.

Untuk memudahkan kita memahami pembacaan aktus warga negara dalam bingkai hegemonik maka berikut saya mendeskripsikannya dalam satu bagan<sup>52</sup>.



52 Bagan diadopsi dari buku *on Populist Reason* (Laclau, 2005: 130)

## {Identitas warga negara yang terangkai dalam relasi ekuivalensi (chain of equivalence)}

*Penjelasan bagan*

*O= rejim opresif*

*H= kekuatan hegemonik*

*P1-P3= identitas-identitas politik warga negara yang terjalin dalam relasi ekuivalensi*

**O** merupakan rejim opresif yang menindas. Antara kekuatan hegemonik (**H**) dan **O** dibatasi oleh garis atau *political frontier*. **H** dibentuk oleh kekuatan-kekuatan identitas politik yang beragam atau plural yang memiliki posisi diskursif tertentu yang terjalin dalam relasi *chain of equivalence*. Mereka merupakan partikularitas-partikularitas yang membentuk perjuangan bersama untuk menentang rezim opresif. *Chain of equivalence* ini merupakan perjuangan artikulatif yang pada akhirnya membentuk *nodal point* yang akan mendislokasi hegemoni yang represif. Kondisi hegemoni juga dimungkinkan oleh adanya *empty signifier-the presence of empty signifier is the very condition of hegemony* (Laclau, *op cit*). Ini dikarenakan relasi hegemonik merujuk pada ketidakpenuhan penanda partikular atau dengan kata lain setiap penanda partikular hadir dalam relasinya dengan penanda partikular yang lain (identitas yang lain). *Empty signifier* memainkan peran representasi dan menjadi kondisi *sine qua non* bagi kemunculan kekuatan hegemoni.



# BAGIAN LIMA

## Postskriptum

### Refleksi Kekitaan dalam Dua Paradoks

Realitas kekinian kita khususnya berkaitan dengan kewarganegaraan banyak dipahami melalui logika liberal. Apa yang sedang dirayakan adalah individualisme, rasionalitas, harmonisasi melalui konsensus dan kerangka prosedural dalam tubuh warga negara. Singkat kata kewarganegaraan dalam wacana Liberal sebenarnya mengalami antiklimaks karena dioperasikan dalam ruang yang kita sebut *post-democracy*. Terminologi Ranciere ini secara bebas dapat diterjemahkan sebagai suatu kondisi di mana terjadinya penghapusan relasi kepolitikan atau *adversarial* yang menjadi spirit dasar bagi aktus warga negara yang plural (cf Ranciere, 1991: 102).

Hal itu menyentil kesadaran kritis dan diwujudkan dalam artikulasi baru gagasan kewarganegaraan, yakni Kewarganegaraan Agonistik. Kewarganegaraan Agonistik menekankan penjelasannya pada identitas politik yang aktif dan senantiasa mengartikulasikan kepentingannya sebagai wujud perjuangan politik dalam suatu relasi hegemonik serta berdiri di atas gesekan konfliktual yang konstitutif terhadap demokrasi.

Dari setiap elemen yang dijelaskan di atas saya merasa perlu untuk “membumi” atau mengkontekstualisasikan gagasan itu dengan kondisi keindonesiaan dengan berangkat dari dua paradoks kekitaan, yakni paradoks prosedural dan paradoks antagonistik.

Sesuatu yang kita tidak dapat sangkal saat ini adalah kegandrungan kita moda berpolitik melalui mekanisme prosedural. Lakon Prosedural yang secara nyata dirayakan secara musiman dengan ritual-ritual Pemilu telah meradikalisasi basis politik pada individu-individu melalui mekanisme representasi. Di atas praktik politik yang demikian, kita akan kesulitan membangun relasi hegemonik antar warga negara. Oleh karena itu, menghadirkan warga negara di Indonesia tidak dapat dipikirkan melalui skema prosedural tetapi melampaui itu, kita perlu mendorong perluasan gagasan-gagasan Kewarganegaraan Agonistik.

Berangkat dari kesadaran di atas maka usaha logis kita saat ini adalah mengembalikan *political* pada posisi primasi-nya. Dengan menjadikan kepolitikan sebagai primasi maka kita akan berada dalam kisaran artikulasi yang menentukan pembangunan politik (cf Laclau 1990: 33). Dalam konteks inilah warga negara dihadirkan di tengah maraknya lakon politik secara prosedural.

Warga negara menjadi kategori politis yang berdimensi *political* karena senantiasa dibangun diatas basis artikulatif yang melekat di dalam dirinya. Melalui karakter ini warga negara dengan keragaman posisi diskursifnya dapat memperjuangkan tuntutan-tuntutan politis sehingga akses-akses terhadap sumber daya terbuka bagi setiap identitas politik. Hal ini mendekonstruksi praktik elitisme yang teradikal dalam skema prosedural yang ada. Oleh karena itu, menghadirkan warga negara sebagai basis penting untuk membangun politik di Indonesia menandakan usaha kita membangun demokrasi itu sendiri.

Perjuangan warga negara menandakan berfungsinya sistem demokrasi. Demokrasi menjadi sistem yang memungkinkan hadirnya geliat massa yang terorganisasi (baca: warga negara) (Priyono, Prasetyo & Tornquist, 2003). Demokrasi yang dipikirkan di sini adalah Demokrasi Radikal. Memahami Demokrasi Radikal berarti mengakui keterbukaan kanal-kanal politik dari berbagai identitas politik yang beragam. Ilustrasi Demokrasi Radikal dan Kewarganegaraan Agonistik dapat saya jelaskan dalam metafora “kota” (*city*) sebagai *difference machine*. Menurut Isin, kota adalah suatu ruang perselisihan atau pertentangan (*difference machine*) sejauh itu dipahami sebagai tempat yang dibentuk oleh proses-proses konfliktual dari berbagai identitas yang memiliki posisi identifikasi beragam. Melalui pertemuan dan posisi yang melekat mereka mendefinisikan kepentingan-kepentingan politisnya dan memobilisasi segala sumber daya yang ada (Isin, *op cit*). Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa, Demokrasi Radikal bersifat terbuka bagi aktus kewarganegaraan yang aktif dan senantiasa berelasi secara konfliktual (agonistik) dalam ikatan-ikatan kolektif yang ada. Dia melepaskan kategori kelembagaan yang mengkrangkeng melalui pengaturan bersifat prosedural dari aktivitas politik.

Ambiguitas lain dari lakon politik prosedural kita adalah luputnya penjelasan mengenai kesadaran kontekstual yang memungkinkan terbangunnya relasi hegemonik antara berbagai gerakan warga negara. Hampir pasti kita tidak dapat menyimpulkan kerumunan orang dalam kampanye politik sebagai refleksi kekuatan hegemonik warga negara karena memang yang dirayakan di sana adalah interaksi personal antara individu dengan konstituen bukan suatu relasi kekuasaan yang mendorong identifikasi identitas ke dalam perjuangan populisme. Oleh karena itu situasi paradoks ini harus direntani dengan penjelasan warga negara yang hegemonik melalui totalisasi ide dan praktik wacana agonistik.

Paradoks kedua yang menjadi refleksi politik Indonesia adalah paradoks antagonistik. Paradoks ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan eliminatif yang menandakan relasi antagonistik antara posisi subyek (rezim) dengan identitas kelompok tertentu. Nalar ini beroperasi, misalnya, dalam kebijakan pemerintah yang tertuang dalam SKB tiga menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) no. 3 tahun 2008. Dalam Keputusan Bersama tersebut secara spesifik dalam diktum ke dua dijelaskan bahwa:

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Pada momen ini saya tidak sedang masuk dalam pemaknaan keagamaan (dari sisi keimanan), tetapi melihat bekerjanya logika pemerintah dalam mendefinisikan identitas keagamaan. Peristiwa ini saya lihat sebagai pertarungan antagonistik antara identitas Islam yang 'benar' dan identitas Islam yang dianggap 'menyimpang'. Hal ini dicirikan oleh, *pertama*, sifat eliminatif dari kebijakan pemerintah. Ini disebabkan oleh pemaknaan identitas yang ajeg. Ajeg dalam arti, melihat produksi dan posisi subyek agama sebagai identitas yang tidak berubah di dalam dirinya, Hal ini berdampak pada munculnya pandangan bahwa pergeseran pemaknaan yang mendorong identifikasi terhadap identitas tertentu dianggap sebagai penyimpangan. *Kedua*, penggunaan kategori dogmatik yang mengandung definisi benar dan salah-*good and evil*- untuk merepresi artikulasi politik keagamaan tertentu. Dalam momen

inilah logika penundukan mengkonstitusi identitas, “*that one identity can only be validated or worse constituted by suppression of another*”. (Dryzek, 2005: 219).

*Ketiga*, persoalan di atas juga menggambarkan model pengelolaan antagonisme politik dengan pendekatan kulturalisasi politik. Perbedaan ditengarahi sebagai perbedaan nilai sehingga mengelolah perbedaan adalah membangun toleransi di antara yang berbeda. SKB dapat dilihat pada tataran ini juga yakni, selain bersifat konstitutif terhadap keidentitasan juga sebagai langkah membangun “toleransi” yang pada saat yang sama bersifat eliminatif terhadap perbedaan.

Nalar kulturalisasi rezim yang ada menunjukkan betapa mereka gagal untuk mendefinisikan kehadiran Ahmadyah bukan semata-mata sebagai identitas keagamaan (kategori kultural) tetapi sebagai identitas politik yang memiliki tuntutan-tuntutan politis di Negara yang kita sebut demokratis ini. Mengkonstruksi Ahmadyah sebagai identitas keagamaan semata adalah kulturalisasi atau netralisasi posisi politis<sup>53</sup> mereka ke dalam wilayah kultural sehingga seolah-olah bisa diselesaikan dengan pendekatan kultural semata (yakni melarang mereka untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaannya atau

---

53 Zizek mempersoalkan kecenderungan yang sering kita pikirkan tersebut dengan menukik masuk ke dalam logika multikulturalisme. Dia memulai dengan beberapa pertanyaan berikut: mengapa kita tidak berbicara soal ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidaksetaraan yang merefleksikan situasi kerentangan dan perbedaan antara berbagai identitas politik? Mengapa kita cenderung terjebak dalam kategori kultural semata untuk menjelaskan perbedaan? Bagi Zizek gagasan multikultural merupakan pengoperasian Ideologi Liberal di mana hal itu bekerja dalam logika netralisasi. Isu-isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan dinetralisasi menjadi isu kultural atau dengan kata lain perbedaan yang bersifat politik dikulturalisasi melalui perluasaan ide multikultural (culturalisation of politic) (Zizek, 2008: 140). Apa yang penting dari sentilan bernas Zizek adalah mengembalikan politik sebagai penjas bagi fakta pluralitas.

dengan mengajak mereka kembali kepada kebenaran). Bekerjanya logika liberal ini menyelubungi realitas ketertindasan Ahmadiyah yang seharusnya dibaca sebagai fakta politik. Hanya dengan menghadirkan Ahmadiyah sebagai perwujudan identitas politik kita dapat mengkerangkai Ahmadiyah sebagai warga negara.

Relasi antagonistik yang dibangun menjelaskan absennya kesadaran Agonistik. Relasi Agonistik menjadi penting untuk merentani laku politik di atas karena: *pertama*, menyematkan legitimasi dalam perbedaan melalui basis identifikasi identitas yang bersifat konstitutif (misalnya melihat yang lain sebagai ketidaksepakatan yang berlegitimasi, *legitimate dissent*). Dengan demikian konflik senantiasa menjadi refleksi nyata dari usaha pembukaan kanal-kanal politik atau akses politis. *Kedua*, melihat ruang sosial dalam logika perbedaan. Bahwa setiap proses identifikasi, misalnya menjadi Ahmadiyah, merupakan watak khas dari sifat kontingensi identitas. Sifat inilah yang yang mengkondisikan kompleksitas posisi subyek politik (Derrida, 1994, 1997).

*Ketiga*, mengembangkan langgam Agonistik memiliki arti yang sama dengan penguatan kesadaran *civic culture* dalam perbedaan. Nalar atau teknologi kekuasaan yang diterapkan oleh pemerintah melalui SKB tentu meniadakan ruang negosiasi dalam membangun relasi yang pluralistik. Padahal demos membutuhkan suatu budaya kewargaan, yakni kondisi di mana perbedaan tidak hanya diakui dan dirayakan, tetapi sekaligus dinegosiasikan secara terus-menerus (Sutanto, 2011:142). Negosiasi yang berlangsung di sini dibayangkan dalam suatu kondisi di mana kepentingan dan identitas partikular mengalami pembelahan diri atau dalam artian tidak bertahan dalam esensialisme kediriaanya atau pendakuan. Spiritualitas seperti inilah yang harus dikembangkan oleh pemerintah untuk memastikan kehadiran *demos* dalam ruang yang demokratis.

*Keempat*, relasi Agonistik mengandung dimensi perjuangan karena menekankan pentingnya artikulasi politik dari berbagai identitas. Berkaca pada realitas pluralisme di Indonesia yang kian diwarnai oleh berbagai tindakan represif baik dalam bentuk kebijakan (yang kadang bernuansa penindasan kultural) maupun kekerasan fisik kita seolah melihat kegagalan wacana liberal untuk merentani logika represif yang ada. Ketika kita bertumpuh pada Liberalisme sebagai pilihan profetis maka kita justru akan terjebak pada kategori-kategori moral semata untuk mengelola pluralisme, yakni dengan menekankan pada aspek toleransi dan konsensus yang sama sekali absen menjelaskan dimensi hegemonik. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk membaca persoalan Ahmadyah sebagai persoalan warga negara sehingga berikutnya dikerangkai dalam penjelasan hegemonik.

Mengambil penjelasan yang berbeda, Robertus Robet mencoba melihat persoalan terrepresinya Ahmadyah sebagai persoalan kegagalan negara menjamin hak-hak warga negara. Untuk menjelaskan itu dia memulai dengan penjelasan mengenai dua tingkat identifikasi. Bagi dia, keidentitasan Ahmadyah harus dilihat dalam dua tingkat identifikasi, yakni yang partikular dan universal. *Pertama*, persoalan identifikasi partikular Ahmadyah dalam hubungannya sebagai anggota komunitas muslim secara luas; dan *kedua*, bagaimana implikasi dari identifikasi partikular terhadap status identifikasi universal sebagai warga negara. Apakah penolakan dalam identifikasi partikular mesti diakomodasi dengan penolakan dalam identifikasi universalnya? Artinya apakah kemudian penolakan terhadap Ahmadyah menjelaskan penolakan terhadap Ahmadyah sebagai warga negara yang punya privilese sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak sipil dan sosial yang harus diakui dalam sebuah masyarakat demokratis (robet, 2009: 31).

Bagi Robet, SKB tiga menteri merupakan dalih untuk melindungi hak universal Ahmadyah sebagai warga negara dengan melepaskan identitas partikularnya. Dengan kata lain SKB mengisyaratkan bahwa perlindungan negara terhadap Ahmadyah sebagai warga negara mesti menjadi bukan Ahmadyah terlebih dahulu. Jika Ahmadyah masih mempertahankan identitas partikularnya maka dia kehilangan status kewarganegaraanya (*ibid*, 32). Berikutnya Robet menjelaskan posisi pembelaanya, baginya mengeliminasi identitas partikular Ahmadyah sama halnya tidak mengakui identitas universalnya. Apa yang seharusnya dilakukan negara adalah memberi jaminan hak bagi Ahmadyah karena itu merupakan privilese yang dimiliki warga negara.

Jika status istimewa sebagai warga negara tidak dijamin oleh negara maka Ahmadyah hanya menjadi *homo sacer*. Mengutip dari Agamben, apa yang dimaksud sebagai *homo sacer* adalah makhluk yang kehilangan hak dan perlindungan dan kematiannya pun tidak perlu diratapi dan pembunuhan terhadapnya tidak perlu dipersoalkan (Agamben, 1998: 65)

Menurut saya, apa yang dijelaskan oleh Robet mengandung kerentanan mendasar. *Pertama*, Robet gagal menjelaskan karakter warga negara yang aktif karena posisi penjelasannya menandakan hadir dan beroperasinya Liberalisme sebagai wacana. Dia masih melihat warga negara sebagai subyek dengan status istimewa yang harus dilindungi haknya oleh negara. Cara pandang seperti ini gagal menjelaskan warga negara yang menjadikan hak bukan sebagai privilese melainkan sebagai sesuatu yang harus diartikulasikan dalam gerakan politik. Hanya dengan penjelasan seperti itu, persoalan egalitarian atau emansipasi dapat menubuh dalam suatu jalinan perjuangan warga negara yang hegemonik.

*Kedua*, menyoal warga negara sebagai bentuk identifikasi universal menjelaskan kategori homogen warga negara dalam ruang demokrasi. Warga negara sebagai suatu kategori politik harusnya dipahami dalam bentuk partikularnya karena hal itu menjelaskan keragaman tuntutan atau kepentingan yang ada di dalamnya. Sesuatu yang universal-bukan dalam arti yang homogen- justru hadir dalam bentuk artikulasi dari berbagai partikularitas warga negara untuk memperjuangkan atau menentantang suatu tatanan yang menindas dalam setiap praktik kekuasaannya (*chain of equivalence*). Namun, secara umum kritik saya terhadap penjelasan Rober adalah luputnya hegemoni sebagai elemen penting untuk menjelaskan warga negara dalam ruang demokrasi. Hegemoni menjadi penting untuk mentransformasi Ahmadyah sebagai *homo sacer* menjadi warga negara Agonistik.

Melanjuti hal di atas, persoalan terepresinya kelompok-kelompok minoritas di Indonesia dalam kaca mata Agonistik bukan semata-mata karena gagalnya negara menjamin hak warga negara atau kegagalan membangun masyarakat toleransi melainkan disebabkan basis gerakan hegemonik yang lemah dari kelompok-kelompok atau identitas politik yang terepresi untuk mengartikulasikan tuntutan-tuntutan demokratiknya dalam jalinan ekuivalensi. Sebagai warga negara Ahmadyah seharusnya mampu mentransformasi *traumatic event* menjadi kondisi yang mendorong terbentuknya jalinan ekuivalensi di antara warga negara. Relasi ekuivalensi mengandaikan setiap identitas yang terrepresi mengosongkan penanda partikularnya agar bisa berelasi dengan identitas warga negara yang lain yang mengalami nasib yang sama. Pengosongan ini melahirkan apa yang kita sebut sebelumnya *empty signifier*, suatu kondisi yang memungkinkan gerakan hegemoni dari kelompok-kelompok yang terrepresi.

Selain gerak “melampaui” identitas partikular, jalinan ekuivalensi harus memainkan strategi diskursif yang menyatukan elemen-elemen warga negara yang berbeda. Dalam konteks ini kita dapat mengatakan strategi diskursif sebagai penyematan predikat yang menjelaskan posisi politik, misalnya strategi diskursif dengan penamaan “barisan warga negara menuntut kebebasan beragama”.

Menggugah kesadaran kontekstual sehingga mampu mendorong gerakan hegemonik warga negara merupakan proyek demokrasi yang harus kita kerjakan dewasa ini khususnya di Indonesia. Hanya dengan cara itu kita dapat membangun kultur demokrasi; sekali lagi kita harus meyakini bahwa

*“Hegemony is not a type of articulation limited to the field of politics in its narrow sense but it involves the construction of a new culture – and that affects the levels where human beings shape their identity and their relations with the world.”* (Laclau, 1990: 189).

(Hegemoni bukanlah tipe artikulasi yang terbatas pada arena politik dalam maknanya yang sempit tetapi juga meliputi konstruksi budaya yang baru dan mempengaruhi manusia pada tataran pembentukan identitas serta relasinya dengan lingkungan atau dunia.)

Melalui inilah Demokrasi Radikal dan Kewarganegaraan Agonistik menjadi kultur politik baru di negara ini.

Kita tidak ingin berlamentasi terhadap paradoks-paradoks keindonesian atau jatuh pada penyesalan mendalam dengan kekeliruan historis yang ada. Paradoks telah menyediakan ruang traumatik. Ruang ini merupakan kondisi potensial bagi hadirnya identitas yang direpresi menjadi kekuatan politik baru (*how the action of repression invites the return of repressed*) (cf Sayyid, 1997: 3). Sebagai warga negara, optimisme yang kita perlu bangun

adalah mengartikulasikan Wacana Agonistik sebagai kesadaran *argionamento*, yakni dengan menghadirkan dan menjadikan wacana Agonistik sebagai cara hidup karena hanya dengan itu kita benar-benar menjadi warga negara demokratis.

## Postscriptum

Kewarganegaraan sebagai suatu diskursus tentunya tidak mendapatkan posisi ontologis sehingga dia tidak dapat menjadi fondasi yang memiliki makna tetap. Kewarganegaraan senantiasa bergerak di atas mengambangny sifat penanda dalam medan diskursif. Namun usaha untuk memfiksasikan kewarganegaraan menjadi usaha politis yang beroperasi dalam rasionalitas kekuasaan tertentu.

Berangkat dari sifat diskursif, tulisan ini menguraikan bagaimana kewarganegaraan dihadirkan dalam posisi diskursif yang khas, yakni Liberalisme dan Agonistik. Wacana Kewarganegaraan Liberal menjadi wacana yang menghegemoni ruang politik kewarganegaraan saat ini. Normalisasi yang mewujud dalam setiap teknologi kekuasaannya mendorong terbentuknya subyek-subyek Liberal. Hegemonisasi tidak hanya bermakna terbentuknya subyek Liberal tetapi juga bermakna menguatnya elemen-elemen formatif yang diartikulasikan pada kisaran diskursus Kewarganegaraan Liberal.

Elemen-elemen yang diartikulasikan dalam Wacana kewarganegaraan Liberal adalah elemen rasional, individual, prosedural, dan konsensus. Menguatnya elemen ini menimbulkan paradoks dalam korpus warga negara yang menjadi basis penting untuk menjelaskan demokrasi. Beberapa paradoks itu antara lain:

1. Kegagalan Liberalisme mendefinisikan Warga negara yang aktif karena kungkungan prosedural. Melalui kerangka

- prosedural warga negara dilihat sebagai subyek rasional semata pun sebagai subyek yang mengakui dirinya sebagai *homo credens* melalui mekanisme perwakilan.
2. Hilangnya dimensi perjuangan dalam geliat politik warga negara karena sifat moralistik yang mendominasi penjelasan Liberal khususnya bias *individualistic-humanitarian ethic* dalam wacana tersebut
  3. Absenya dimensi kepolitikan sebagai basis penting relasi konfliktual antara warga negara karena sifat konsensus yang rasional dan *reasonable*
  4. Gagalnya Wacana Liberal menjelaskan dimensi hegemonik dalam relasi kepolitikan antara warga negara.
  5. Penekanannya pada subyek otonom yang mengabaikan sifat identifikasi subyek ke dalam penanda tertentu yang merepresentasikannya.

Bagi penulis paradoks-paradoks di atas menjadi ruang traumatik yang mendorong kita untuk mendislokasi hegemoni Wacana Kewarganegaraan Liberal. Melalui logika *psyce*,-sesuatu yang mendenormalisasi wacana yang dinormalkan- momen pendislokasian diisi oleh suatu artikulasi baru mengenai kewarganegaraan yakni Wacana Kewarganegaraan Agonistik. Saya sematkan kata artikulasi tidak semata-mata karena sifat diskursifnya tetapi menunjukkan posisi politis penulis dalam mengartikulasi isu kewarganegaraan saat ini.

Wacana Kewarganegaraan Agonistik sebagai suatu rasionalitas kekuasaan menawarkan jalan lain yakni strategi baru untuk mengkerangkai gerak warga negara sebagai primasi bagi ruang politik demokrasi yang radikal.

Kewarganegaraan Agonistik menyakini bahwa memahami kewarganegaraan berarti menjelaskan agen yang terbentuk dari

artikulasi berbagai posisi subyek. Sehingga warga negara senantiasa dikonstruksi dalam diskursus yang spesifik dan selalu rentan dalam keterjalannya dengan posisi-posisi politik tertentu. Mouffe menentang konsepsi esensial mengenai subyek dan melihat identitas sebagai warga negara merupakan cerminan dari *mode of identification* terhadap kelompok-kelompok politik (Mouffe 1993: 71; 1996).

Kewarganegaraan Agonistik merentani konsepsi liberal individualisme. sehingga warga negara Agonistik bergantung pada bentuk kolektif dari identifikasi di antara tuntutan-tuntutan demokratik yang ditemukan dalam gerakan yang beragam, misalnya: kelompok gay, pekerja, buruh, ekologi, dll.

Konsekuensi logis kita memikirkan warga negara dalam relasi Agonistik dapat saya ringkas dalam beberapa poin berikut: *pertama*, konflik menjadi arena relasi kekuasaan antara berbagai posisi subyek. *Kedua*, adanya ruang pengakuan bagi keragaman tanpa ada pretensi mengaharmonisasikannya dalam suatu rasionalitas tunggal; *ketiga*, terbukanya ruang partisipasi dari berbagai kanal atau akses politik dari berbagai identitas politik untuk menentukan keputusan politik. Partisipasi dan keterbukaan kanal politik menjelaskan dimensi perjuangan dari berbagai elemen yang berbeda. Partisipasi merujuk pada sifat aktif warga negara dan dalam kisaran ini perjuangan hegemonik menjadi penting untuk mengartikulasikan berbagai tuntutan demokratik. *Keempat*, dalam model Agonistik, ruang bagi mobilisasi berbagai hasrat dari identitas politik berarti penting untuk menguatkan demokrasi (Mouffe, 2000: 104).

Akhirnya, aktus politik kewarganegaraan dalam wacana Agonistik ditentukan oleh etika kepolitikan, yakni kebebasan dan kesetaraan. Etika ini dipahami dalam dimensi perjuangan. Artinya, kedua hal tersebut menjadi etika yang melegitimasi setiap artikulasi berbagai tuntutan politik yang beragam agar mampu menyuarakan

tuntutan kontekstual melalui artikulasi ekuivalensi (baca: relasi hegemoni) yang bertujuan untuk membuka kanal-kanal politik (perjuangan redistribusi) dan mendapatkan pengakuan sebagai subyek politik.

## Daftar Pustaka

- Abas, Nasir. 2008. *Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra & Noordin M. Top*. Jakarta: Grafindo
- Asad, Talal. 2007. *On Suicide Bombing*. New York: Columbia University Press
- Abrahamsen, Rita. 2000. *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*. Terj. Heru Prasetya. Lafadl Pustaka
- Agamben, Giorgio. 1998. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford California: Stanford University Press
- , 2000. *Means without Ends: Note on politics*. Minneapolis: University of Minnesota Press
- , 2009. *What is an Apparatus*. Stanford California: Standford University Press
- Arendt, H. 1958. *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press
- Andersen, Niels A. 2003. *Discursive Analytical Strategies*. The Policy Press
- Aragon, Lorraine V. 2007. *Persaingan Elit di Sulawesi Tengah*. dalam Henk S. Nordholt dan Garry van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Obor

- Barke, Derek. 2009. *Tragedy and Citizenship: Conflict, Reconciliation, and Democracy from Haemon to Hegel*. New York: State University of New York Press
- Bakunin, Michael. 1977. *The Illusion of Universal Suffrage*. dalam George Woodcock (ed). *The Anarchist Reader*. London: Fontana
- Bellamy, Richard. 2008. *Citizenship: a very short introduction*. New York: Oxford University Press
- Butler, Judith. 1997. *The Psychic Life of Power: theories in subjection*. Stanford, CA: Stanford University Press
- Burchel, David. 2002. *Ancient Citizenship and its Inheritors*. Dalam Engin F. Isin dan Bryan S. Turner ed. 2002. *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage Publication
- Berlin, Isaiah. 1969. *Two Concepts of Liberty*. Oxford: Oxford University Press
- Benhabib, S. 2004. *The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Polity Press
- , 1994. *Practical Reason: On the Theory of Action*. Stanford: Stanford University Press
- Constant, Benjamin. 1988. *Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press
- Cherryholmes, C. 1988. *Power and Criticism: Poststructural investigations in education*. New York: Teachers College Press
- Downs, Anthony. 1957. *An Economic theory of democracy*. New York: Harper dan Row

- Derrida, Jacques. 1982. *Margin of Philosophy*. terj. A. Bass. Brighton: Harvester Press
- , 1994. *Specters of Marx: the State of Debt, the Work of Mourning and the New International*. London: Routledge
- , 1997. *The Politics of Friendship*. London: Verso
- Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dyrberg, Torben Bech. 1997. *The Circular Structure of Power*. London: Verso
- Dudley, Janice *et al.* 1999. *Poststructuralism, Citizenship and Social Policy*. London: Routledge
- Escobar, Arturo. 1995. *Encountering Development: The making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press
- Foucault, M. 1972. *Archeology of Knowledge*. New York: Harper Colophon Books.
- Foucault, Michel dan Noam Chomsky. 2006. *Chomsky-Foucault Debate on Human Nature*. The New Press
- , [1978-79], 2008. *The Birth of Biopolitics*. New York: Palgrave Macmillan
- Freeman, Samuel. 2007. *John Rawls: Lectures on the Philosophical History*. The Belknap Press of Harvard University Press
- Gutmann, Amy (ed). 1994. *Multiculturalism, Examining the Politics of recognition*. UK: Princeton University Press
- Hadi, Hardono. 1994. *Epistemologi*. Yogyakarta: Kanisius

- Hargens, Boni. 2006. *Demokrasi Radikal: Memahami Paradoks Demokrasi Modern dalam Perspektif Postmarxis-Posmodern Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe*. Jakarta: Parhesia
- Harvey, Neil dan Halverson Chris. 2000. *The Secret and the Promise: women's struggle in Chiapas*. dalam David Howarth et al (eds). *Discourse Theory and Political Analysis: Identities, hegemonies, and Social Change*. Manchester: Manchester University Press
- Held, David . 1999. *The Transformation of Political Community: Rethinking democracy in the context of globalization*. dalam I. Shapiro& C. Hacker-Cordon (Eds.): *Democracy's edges* New York: Cambridge University Press.
- Higley, John dan Michael Burton. 2006. *Elite Foundations of Liberal Democracy*. Rawman & Littlefield Publisher, inc
- Howarth, David, Stavrakakis, dan Norval (eds). 2000. *Discourse Theory and Political Analysis: Identities, hegemonies, and Social Change*. Manchester: Manchester University Press
- Huber, John D. dan G. B. Powell. 1994. *Congruence between Citizens and Policy-makers in Two Vision of Liberal Democracy*. The John Hopkins University Press
- Hutagalung, Daniel. 2008. *Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Laclau dan Mouffe*. dalam Laclau dan Mouffe (terj). *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book
- Inis, Engin F dan Patricia K. Wood 1999. *Citizenship and identity*. London: Sage publications
- Inis, E. F. 2002. *Being Political: Genealogies of Citizenship*. Minneapolis: University of Minnesota Press

- Inis, Engin F. dan Greg Nielsen (ed). 2008. *Act of Citizenship*. Zed Book
- Jorgensen, Marianne dan Louise Phillips. 2002. *Discourse Analysis as Theory and Method*. London: Sage Publication
- Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. (1985). *Hegemony and Socialist Strategy*. London: Verso
- Laclau, Ernesto. 1990. *New Reflection on the Revolution of our Time*. London: Verso
- , 1993. *Politics and the Limits of Modernity*. dalam Thomas Docherty (ed). *Postmodernism: a reader*. New York: Harvester
- , 1996. *Emancipation*. London: Verso
- , (ed). 1994. *The Making of Political Identities*. London: Verso
- Laclau, E. dan Mouffe, C. 2001. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Edisi kedua. London: Verso
- Laclau, Ernesto. 2005. *On Populist Reason*. London: Verso
- , 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan gerakan sosial baru*. terjemahan Eko Prasetyo Darmawan. Yogyakarta: Resist Book
- Landell-Mills, P. Dan I. Serageldin. 1991. *Governance and External Factor. Proceeding of the World bank Annual Coference on Development Economics 1991*, Washington
- Ludwig Wittgenstein, Ludwig. 1958. *Philosophical Investigations*. Oxford
- Locke, John. 1960. *Two Treatises of Government*. P. Laslett ed. Cambridge: Cambridge University Press

- Lacey, A. R. 1996. *A Dictionary of Philosophy*. edisi ketiga. Routledge
- Mouffe, Chantal. 1988. *New Political Subjects: Toward a new concept of democracy*. Terjemahan oleh Stanley Gray, dalam C. Nelson and L. Grossberg (eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture*. University of Illinois Press
- 1992b. *Democratic Politics Today*, dalam Chantal mouffe (ed). *Dimension of Radical Democracy: Pluralisme, Citizenship, Community*. London: Verso
- , 1993. *The Return of the Political*. London: Verso
- , 1996. *Radical Democracy or Liberal Democracy*. Dalam D. Trend (ed.), *Radical Democracy: Identity, Citizenship, and the State*, Routledge: New York
- , 2000. *Democratic Paradox*. London: Verso
- , 2005. *On the Political*. London: Routledge
- ,2009. *Post-Marxism: Democracy and Identity*. dalam G. Henderson and M. Waterstone (eds.). *Geographic Thought: A Praxis Perspective*. London: Routledge
- Mulhall, S. 1996. *Heidegger and Being and Time*. London: Routledge
- Marshall, T.H. 1950. *Citizenship and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press
- Matravers, Derek dan Jon Pike ed. 2003. *Debate in Contemporary Political Philosophy: an anthology*. London: Routledge
- Mill, John Stuart. 1951. *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*. New York: E. P. Dutton & Co

- Macpherson, C. B. 1962. *The Political Theory of Possesive Individualism: Hobbes to Locke*. Oxford: Oxford University Press
- Nussbaum, Martha. 1986. *The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press
- (1997). *Cultivating Humanity: a Classical Defense of Reform in Liberal Education*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Newman, Saul. 2005. *Power and Politics in Poststructuralist Thought: New theories of the political*. London: Routledge
- Ohoitimur, Johanis. 2006. *Metafisika sebagai Hermeneutika*. Jakarta: Obor
- Pandor, Pius. 2010. *Ex Latina Claritas, Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*. Jakarta: Obor
- Pitkin, Hanna F. 1972. *The Concept of Representation*. California University Press
- Panniza, Francisco (ed). 2005. *Populism and the Mirror of Democracy*. London & New York: Verso
- Priyono A.E., Prasetyo, S.A., & Tornquist, O. 2003. *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: DEMOS
- Ramussen, Claire dan Michael Brown. 2002. *Radical Democratic Citizenship: Amidst Political Theory and Geography*. Dalam Engin F. Isin dan Bryan S. Turner ed. 2002. *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage Publication
- Rawls, John. 1996. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press
- (1999). *A Theory of Justice*. edisi revisi. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University

- Ranciere, Jacques. 1991. *Disagreement*. Minneapolis: University of Minnesota Press
- Schuck, Peter. 2002. *Liberal Citizenship*. dalam Engin F. Isin dan Bryan S. Turner ed. 2002. *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage Publication
- Schumpeter, Joseph. 2003. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Taylor & Francis e-Library
- Sayyid, Bobby S. 1997. *A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism*. London and New York: Zed Books Ltd
- Smith, C . L. 1999. *Is Citizenship a Gendered Concept?* Dalam A. C. Cairns, J. C. Courtney, P. MacKinnon, H. J. Michelmann, & D. E. Smith ( Eds.), *Citizenship, Diversity, and Pluralism: Canadian and comparative perspectives* (pp. 137-162). Montreal: McGill-Queen's University Press
- Schmandt, Henry J. 2005. *Filsafat Politik: kajian historis dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soysal, Y. (1994) *Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe*, University of Chicago Press, Chicago, IL.
- Schmitt, Carl. 1976. *The Concept of the Political*. Terj. George Schwab. New Brunswick
- Schaap, Andrew. 2009. *Law and Agonistic Politics*. UK: University of Exeter
- Bagir, Zainal A., AA GN Ari D & Farid W. & M. Rahayu & Trisno S. 2011. *Pluralisme Kewargaan*. Yogyakarta: Mizan & CRCS

- Stavrakakis, Yannis. 2002. *Lacan and the Political*. London: Routledge
- Trend, David (ed). 1996. *Radical Democracy: Identity, Citizenship, and State*. London: Routledge
- Vanhanen, Tatu. 2004. *Prospects of Democracy: a study of 172 countries*. Taylor & Francis e-Library
- Waluyo, Herman J. 2001. *Drama: Teori dan Pengajarannya*. Yogyakarta: Hanindita
- Widayanti, Titik. 2008. *Politik Subaltern: Studi tentang politik identitas waria di Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: JIP UGM
- Zizek, Slavoj. 2008. *Violence*. New York: Picador
- Zizek, Slavoj. 1993. *Tarring with the Negative*. Durham: Duke University Press

### **Jurnal dan Majalah:**

- Abowitz, Knight K. dan Jason Harnish. 2006. *Contemporary Discourses of Citizenship*. American Educational of Research Association. Vol. 76, No. 4, 653-690
- Curtis, Bruce. 2002. *Foucault on Governmentality and Population: The Impossible Discovery*. The Canadian Journal of Sociology/ Cahiers Canadiens de Sociologie. Vol. 27, No. 4, 505-533
- Dryzek, John S. 2005. *Deliberative Democracy in Divided Societies: aternative to Agonism and Analgesia*. Political Theory, Vol. 33, No. 2, 218- 242
- Goodman, John. 2005. *What is Classical Liberalism*. Sebuah manuskrip, diundu dari <http://www.ncpa.org/pub/what-is-classical-liberalism>, Rabu 2/ 02/ 2011, pkl. 19. 45

- Haryatmoko. 2003. *Menyingkap kepalsuan Budaya Penguasa*. Basis. No. 11-12, Tahun Ke 52
- Haryatmoko. 2007. *Derrida yang Membuat Resah: Rezim Dogmatis dan Kepastian*. Basis. No. 11-12, Tahun Ke 56, 4-15
- Halliday, John. 1999. *Political Liberalism and Citizenship Education: Towards Curriculum Reform*. British Journal of Educational Studies, Vol. 47, No. 1, 43- 55
- Laclau, Ernesto dan Amy G. 1987. *Psychoanalysis and Marxism*. The University of Chicago Press. Vol. 13, No. 2, 330-333
- Laclau, Ernesto. 1989. *Politics and the Limits of Modernity*. Duke University Press. No. 21, 63-82
- Mouffe, Chantal. 1992a. *Citizenship and Political Identity*. The MIT Press. Vol. 61. 28-32
- Robet, Robertus. 2009. *Gagasan Manusia Indonesia dan Politik kewargaan Indonesia kontemporer*. dalam Prisma, *Senjakala Kapitalisme dan Krisis Demokrasi*. Vol. 28, Juni 2009, 24-39.
- Rose, Nikolaus dan Peter Miller. 1992. *Political Power Beyond the State*. British Journal of Sociology. 1992, 43, 2, 172-205
- Scorza, Jason A. 2004. *Liberal Citizenship and Civic Friendship*. Sage Publication. Vol. 32, No. 1, 85- 108
- Rusdiarti, Suma Riella. 2003. *Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan*. Basis. No. 11-12, Tahun Ke 52, 31-40
- Varty, John. 1997. *Civic or Commercial? Adam Ferguson's Concept of Civil Society*. Democratization, 4: 1, 29-48

## **Peraturan**

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No. 3, Tahun 2008: KEP- 033/ A/JA/6/ 2008 Nomor: 199 tahun 2008

## **Diskusi**

Saresehan *stakeholders* Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Nunang, Sano Nggoang, 30 Juli 2010

## **Lain-lain**

Concise Oxford English Dictionary. Edisi ke 11, 2004. Oxford University Press

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional